



UNIVERSITAS INDONESIA

**Pengaruh Modernisasi Militer China Terhadap Kebijakan Amerika Serikat
di Asia Pasifik**

TESIS

**Aldrin Erwinsyah
0906589740**

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
PROGRAM PASCA SARJANA HUBUNGAN INTERNASIONAL
2011



UNIVERSITAS INDONESIA

**Pengaruh Modernisasi Militer China Terhadap Kebijakan Amerika Serikat
di Asia Pasifik**

TESIS

**Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Hubungan
Internasional**

**Aldrin Erwinsyah
0906589740**

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
PROGRAM PASCA SARJANA HUBUNGAN INTERNASIONAL
2011**

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

Tesis ini adalah hasil karya saya sendiri, dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar.

Nama : Aldrin Erwinsyah
NPM : 0906589740

Tanda Tangan :

Tanggal : 20 Desember 2011

UNIVERSITAS INDONESIA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
DEPARTEMEN ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL
PROGRAM PASCASARJANA

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING TESIS

Nama : Aldrin Erwinsyah

NPM : 0906589740

Judul : Pengaruh Modernisasi Militer China terhadap Kebijakan Amerika Serikat di Asia Pasifik

Dosen Pembimbing

Broto Wardoyo, MA

HALAMAN PENGESAHAN

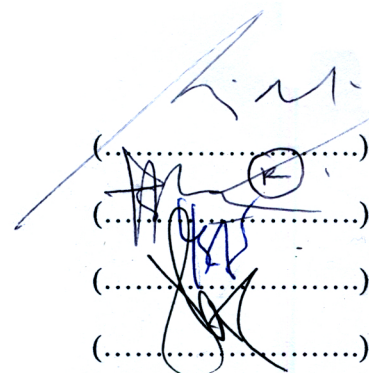
Tesis ini diajukan oleh :

Nama : Aldrin Erwinsyah
 NPM : 0906589740
 Program Studi : Hubungan Internasional
 Judul Tesis : Pengaruh Modernisasi Militer China Terhadap Kebijakan Amerika Serikat di Asia Pasifik

Telah berhasil dipertahankan dihadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Magister pada Program Pasca Sarjana Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Indonesia.

DEWAN PENGUJI

Ketua Sidang : Dr. Makmur Keliat
 Sekretaris : Asra Virgianita, MA
 Pembimbing : Broto Wardhoyo, MA.
 Penguji Ahli : Andi Widjajanto, MS, M.Sc



(.....)
 (.....)
 (.....)
 (.....)

Ditetapkan di : Depok
 Tanggal : 29 Desember 2011

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

=====

Sebagai sivitas akademik Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Aldrin Erwinsyah
NPM : 0906589740
Program Studi : Hubungan Internasional
Departemen : Pasca Sarjana
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Jenis Karya : Tesis

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia **Hak Bebas Royalti Non Eksklusif (*Non-exclusive Royalty Free Right*)** atas karya ilmiah saya yang berjudul:

Pengaruh Modernisasi Militer China Terhadap Kebijakan Amerika Serikat di Asia Pasifik

Dengan hak bebas royalti noneksklusif ini Universitas Indonesia Berhak menyimpan, mengalihmedia/ formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/ pencipta dan sebagai pemilik hak cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di: Depok

Pada tanggal : 20 Desember 2011

Yang menyatakan,

(.....)

**UNIVERSITAS INDONESIA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
DEPARTEMEN ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL
PROGRAM PASCA SARJANA**

**Aldrin Erwinsyah
0906589740**

Pengaruh Modernisasi Militer China Terhadap Kebijakan Amerika Serikat di Asia Pasifik.

ABSTRAK

Modernisasi militer China adalah bagian dari kekuatan militer yang terus dikembangkan oleh militer China. Kekuatan militer China ditujukan untuk menjaga kedaulatan negara, menjaga kepentingan nasional, menjaga sumber-sumber energi dan berfungsi sebagai kekuatan regional. Untuk mencapai tujuan tersebut, China memerlukan strategi militer guna menghadapi kekhawatiran akan persepsi ancaman China dengan melakukan diplomasi bahwa China merupakan kekuatan damai, militer China juga aktif dalam peran internasionalnya.

Tesis ini mencoba membahas pengaruh modernisasi militer China terhadap kebijakan Amerika Serikat di Asia Pasifik. Dengan memakai pendekatan realis, penulis berusaha memahami strategi pertahanan dan militer China dalam menjaga kepentingan nasionalnya. Metode penelitian yang digunakan penulis adalah deskriptif analitis melalui penelitian kepustakaan. Kekuatan militer AS yang dominan menyebabkan strategi yang digunakan oleh China tidak konfrontatif tetapi bersikap low profile. Dengan terus menaikkan anggaran militernya pertahunnya dan melakukan modernisasi militer China, China dapat menjadi kekuatan regional mengimbangi dominasi pertahanan AS dan aliansinya di Asia Pasifik.

Kata kunci :

Modernisasi militer China, strategi militer, ancaman China.

**UNIVERSITAS INDONESIA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
DEPARTEMEN ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL
PROGRAM PASCA SARJANA**

**Aldrin Erwinsyah
0906589740**

The Impact from China's Modernization of the United State policy in Asia Pacific

ABSTRACT

The modernisation of the China military was part of the strength of the military that continued to be developed by the China military. The strength of the China military was aimed to maintain the sovereignty of the country, maintain the national interests, maintain sources of energy and function as the regional strength. To achieve this aim, China needed the military strategy in order to faces the concern would the perception of the Chinese threat by carrying out diplomacy that China was the strength of peace, the China military was also active in his international role.

This thesis tried to explain the impact of the China's military modernization towards United States policies in the Asia Pacific region. By using the realist's approach, the writer tried to understand the defence strategy and the China military in maintaining his national interests. The research method that was used by the writer was descriptive analistis through the bibliography research. The strength of the US military that was dominant so the strategy that was used by China not confrontational but have an attitude low profile. China also developed the strategy peaceful rising countering the perception of the China Threat. By continue rising the budget of his military every year and carried out the modernisation of the China military, China could become the regional strength matched the domination of the US defence and his alliance.

Key Words :

China's military modernization, hegemony , military strategy, China's Threat

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis sampaikan kepada Allah S.W.T yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan tesis ini. Walaupun banyak hambatan yang penulis temui terutama hambatan psikologis, namun dengan bimbingan dan perlindungan-Nya akhirnya penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini.

Dengan kesadaran penuh, bahwa tesis ini masih jauh dari kata sempurna, namun yang terpenting penulis telah berusaha mencurahkan kemampuan yang dimiliki semaksimal mungkin dengan harapan semoga dapat berguna kelak dikemudian hari terutama bagi rekan akademis. Tesis ini ditujukan untuk memenuhi syarat dalam menempuh ujian siding program sarjana Strata dua (S-2) pada jurusan Ilmu Hubungan Internasional Universitas Indonesia, dengan Judul: “Pengaruh Modernisasi Militer China Terhadap Kebijakan Amerika Serikat di Kawasan Asia Pasifik”.

Penulis,

Desember 2011

UCAPAN TERIMAKASIH

Atas terselesainya tesis ini, penulis ingin mengucapkan syukur yang sebesar-besarnya kepada Allah SWT yang telah memberikan kemudahan, petunjuk, kesehatan, keselamatan, semangat dan segalanya saat penulis mengerjakan tesis ini. Selain itu, penulis juga ingin mengucapkan terima kasih kepada:

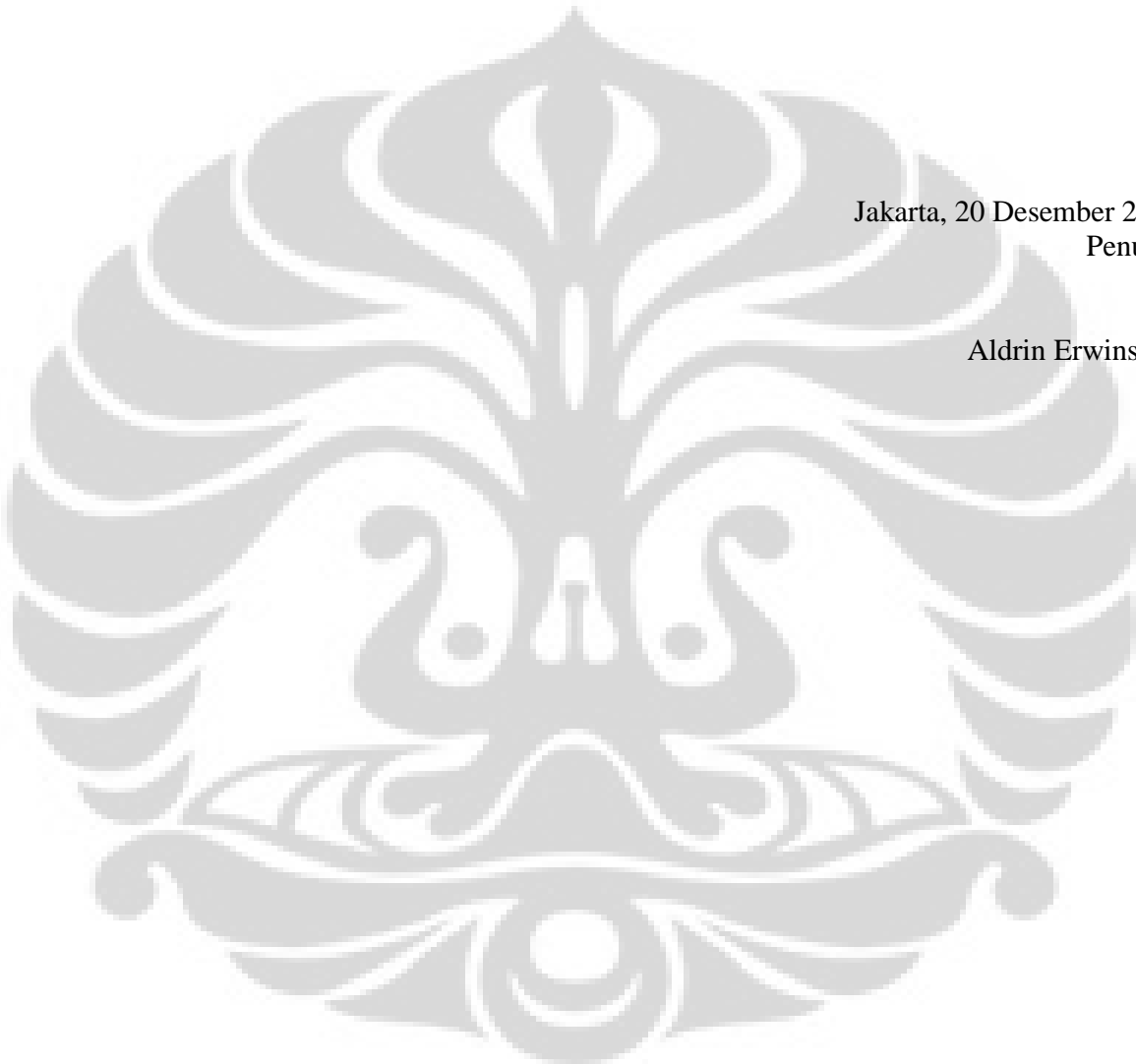
1. Broto Wardoyo, MA selaku pembimbing tesis yang telah mencurahkan waktu untuk membimbing penulis dari awal sampai akhir.
2. Kedua orang tua: mom Elly Nurachmah dan dad Alm. Alexchan Tanjung yang tak putus-putus memberikan semangat, rasa optimis, dukungan moril dan materiil selama penulisan tesis ini. Dan juga kakak-kakak tersayang teteh Early, Aa Adnan, Aa Adri, teh Lilis, yang memberikan semangat dorongannya. Keponakan-keponakan ku tersayang yang cakep dan cantik-cantik ka Agi, de Ila, de Alya.
3. Para pengajar S2 HI yang telah mengajarkan ilmu-ilmu baru selama penulis belajar di FISIP UI 2009-2011 terutama untuk mba Asra yang sangat membantu penulis.
4. Staf Sekretariat HI UI, Mbak Iche, Pak Udin, dan Mbak Lina yang sangat membantu perkuliahan penulis selama ini.
5. *Here comes*, yang paling special, sang pacar tercinta Gadis Aditya Siregar (and family) yang sudah sangat setia menemani membantu serta mendukung dan menyemangati dari awal kuliah hingga pembuatan tesis ini selesai.. (*please be patient and wait for the day!*).
6. Rekan-rekan HI UI angkatan 18: Awigra, Fanny, Fauzan, Lukman, Putra, Ziah (Lia Fauziah), Sabriana, Kaori, Abbas, Lee Dam, Shaka, Wira, Vera, Nimas, Fifi, Gita, Gadis, Banda, Irma, Haura, Andri, Dudi, Martin, dan semuanya atas masa-masa kuliah yang menyenangkan.
7. Kepada Alm. Emir “qnoy”, Mas deni, Alfred, Nasa, Tato, Rusdy dan anak-anak bengkel Anugrah-PRM yang telah memberikan petuah-petuah bijak. Walaupun ada petuah yang kurang bijak namun penulis sangat merasa terhibur disela waktu yang padat. *Cheers guys!*
8. Kawan-kawan FH-UI yang sudah berumur seperti bang Iwan, ka’Joepar, Don Nathano, Bima, Reagan, Agung Cahyono, Safri, Daniel, Joko, dan seluruh wanita eksis yang ada di kantin Justisia (Dece, Rena, Jiun, Dini, mba eva, dll)
9. Teman-teman Jibal, (saa jadi...) apit, Jihad, omen, picco, roimona si sang “rising artist”, agunk, cidot palele, bang karjo, saga band. Sungguh kalian sangat membuat hidup saya tambah gila dengan kalmia “bisa” dan “mungkin”.
10. Teman-teman sastra FIB UI , Nandia, Sophan, Imel, Nilam, Nisa, dll yang tidak dapat disebutkan satu persatu. Terima kasih banyakk.

11. Terakhir, terima kasih kepada semua benda dan teknologi yang telah memudahkan penulis menyelesaikan tulisan ini.

Akhir kata, Penulis berharap Allah SWT akan membalas semua bantuan yang telah diberikan. Semoga tesis ini bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan.

Jakarta, 20 Desember 2011
Penulis,

Aldrin Erwinsyah



DAFTAR ISI

Halaman Judul	i
Lembar Pernyataan Orisinalitas	ii
Lembar Persetujuan Pembimbing Tesis	iii
Lembar Pengesahan Tesis	iv
Lembar Persetujuan Publikasi Karya Ilmiah	v
Abstrak	vi
Abstract	vii
Kata Pengantar	viii
Ucapan Terima Kasih	ix
Daftar Isi	x
BAB I Pendahuluan	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Perumusan Masalah	9
1.3 Tujuan Penelitian	9
1.4 Kerangka Penelitian	9
1.5 Hipotesa	20
1.6 Model Analisa	20
1.7 Metode Penelitian	21
Bab II Kebijakan Amerika Serikat terhadap China	22
2.1 Strategi Global Amerika Serikat	22
2.1.1 Dilema Keamanan (Security Dilemma)	22
2.1.2 Persepsi Ancaman	23

2.1.3 Strategi Engagement and Enlargement	24
2.2 Strategi Amerika Serikat di Asia Timur	25
2.2.1 East Asia Strategic Initiative	27
2.2.2 National Defense Program Outline	30
2.2.3 Mid-Term Defense Program	33
Bab III Modernisasi Militer China	42
3.1 Latar Belakang	42
3.1.1 Sejarah Pembentukan Tentara Pembebasan Rakyat	43
3.1.2 Periode Melawan Jepang dan KMT	47
3.1.3 Karakteristik Peran TPR dalam Politik China	50
3.2 Kemajuan Ekonomi China	52
3.3 Kebijakan Pertahanan China	56
3.4 Kapabilitas Militer China	58
3.5 Perkembangan Militer China	61
3.5.1 TPR – AD	63
3.5.2 TPR – AL	63
3.5.3 TPR – AU	65
3.5.4 Second Artillery Force	66
3.6 Militer China dibawah Hu Jintao	67
Bab IV Signifikansi Peningkatan Perkembangan Militer China Terhadap Strategi Amerika Serikat di Asia Timur	69
4.1 Strategi dan Doktrin Militer China	60
4.1.1 TPR Angkatan Udara	72

4.1.2 TPR Angkatan Laut	73
4.2 Dinamika Kerjasama Keamanan AS di Asia Timur	81
4.2.1 Pola Hubungan China - Amerika Serikat	81
4.2.2 Kecaman Terhadap Ekspansi Global Militer Amerika Serikat	84
4.2.3 Kerjasama Amerika Serikat dengan Negara-negara di Asia Timur Lainnya	85
4.3 Hambatan-hambatan RRC dalam upaya mengimbangi kekuatan strategi Amerika Serikat di Asia Timur	87
4.4 Upaya-upaya China dalam Mengimbangi Kekuatan Strategi Amerika Serikat di Asia Timur	88
4.5 Evaluasi Strategi Amerika-Serikat di Asia Timur	89
4.6 Prospek Strategi Amerika Serikat di Kawasan asia Timur	94
Bab V Kesimpulan	100
DAFTAR PUSTAKA	

Bab I

Pendahuluan

1.1 Latar belakang

Hubungan antara Amerika Serikat dengan Negara–negara di kawasan Asia timur menunjukkan hubungan interdependensi. Tiga setengah kekuatan di Asia Pasifik di pengaruhi oleh Amerika Serikat, Rusia, China (disebut *Major Power*) dan Jepang.¹ Untuk mempertahankan hegemoninya, Amerika Serikat sebagai salah satunya Negara adidaya di dunia, tidak segan–segan untuk menciptakan suatu kebijakan yang diarahkan keluar maupun ke dalam negerinya, yang tentu akan memerlukan suatu strategi, baik jangka pendek maupun jangka panjang dengan mempergunakan sarana dan prasarana, baik dalam bidang komunikasi, transportasi maupun teknologi persenjataan yang cukup potensial dan modern dalam melaksanakan strategi global Amerika Serikat demi mewujudkan ambisinya menjadi pemimpin dunia.

Pandangan Amerika Serikat terhadap Asia Timur sebagai suatu kawasan tidak dapat disangkal lagi telah menjadi arena penting aktivitas ekonomi dan diplomasi. Hal yang masih diperdebatkan adalah perkembangan karakter, geografi dan keterkaitan antara aktifitas ekonomi dan diplomasi dengan kerjasama politik yang melintasi wilayah geografi tersebut. Kawasan Asia Timur tidak terlepas dari peran Amerika Serikat, terutama pasca perang dingin tidak bisa disebut unipolarity, sebab masing – masing region (Eropa, Amerika Utara, dan Asia Pasifik / Asia Timur dan Tenggara) memiliki sebagai *leader* di kawasan tersebut.

Adapun alasan mengapa Negara-negara Asia Timur masih mengharapkan dan membutuhkan kehadiran militer Amerika Serikat di wilayahnya yaitu lingkup yang

¹ AN PAP Project, Charles E. Morrison, *Asia Pasific Security Outlook*, 2003, hal. 14.

sempit dari ekspor di Asia Timur, ketergantungan besar pangsa pasar Amerika Utara bagi Negara-negara di Asia Timur, infrastruktur yang lebih diakibatkan oleh kompleksnya konflik politik di Asia Timur dan masih adanya sengketa wilayah dan ideologi, ketergantungan pada impor bahan mentah termasuk energy dari Negara-negara Amerika Serikat dan Eropa. Dan kegagalan sistem pendidikan untuk penelitian orisinal bagi penyelesaian konflik di Asia Timur.

Garis besar dari strategi keamanan Amerika Serikat di kawasan Asia Timur tertuang dalam *East Asia Strategic Initiative (EASI)* yang disampaikan oleh Badan *International Security Affairs (ISA)*². Didalamnya menjelaskan berbagai hal menjadi kepentingan Amerika Serikat terhadap kawasan Asia Timur. Dalam EASI (1990-1993) dibawah pemerintahan Bush, menjelaskan hal-hal yang menjadi kepentingan Amerika Serikat dari berbagai bentuk serangan, mendukung kebijakan global *deterrence*, melindungi akses politik dan ekonomi Amerika Serikat di kawasan Asia Timur, mempertahankan *balance of power* untuk mencegah munculnya hegemoni di kawasan, mempercepat orientasi barat terhadap Negara-negara Asia, mengembangkan pertumbuhan demokrasi dan hak asasi manusia, mencegah proferasi nuklir.

Dalam EASI II³ (1993-1995) menjelaskan strategi keamanan Amerika Serikat yang terdiri atas enam prinsip dasar, yaitu : memastikan keterlibatan Amerika Serikat di Asia Pasifik, memperkuat kesepakatan dalam sistem keamanan bilateral, mempertahankan penggelaran pasukan militer Amerika Serikat, memberikan tanggung jawab pertahanan yang lebih besar kepada sekutu-sekutu Amerika Serikat, saling mendukung dalam kerjasama pertahanan.

EASI III⁴ (1995-1998) yang dikeluarkan bulan februari 1995, kebijakan strategis Clinton (Amerika Serikat) diarahkan pada : memperkuat hubungan bilateral Amerika Serikat dan mengejar kesempatan-kesempatan baru mulai dialog-dialog keamanan

² Americas Defence, Strategy, Forces, and Resources for A New Century, *A Report of The Project for the New American Century*, September 2000.

³ *Ibid.*

⁴ *Ibid.*

multilateral, mempertahankan penggelaran pasukan sekutunya, memastikan kebijakan keamanannya mendapat dukungan rakyat Amerika Serikat dan Kongres, pengembangan senjata pemusnah massal, berbagai tanggung jawab dalam rangka mempertahankan keamanan regional dan global.

Dalam *East Asian Strategy Report*⁵ (EASR) ke-4 tahun 1998, disebutkan bahwa strategi keamanan Amerika Serikat di Asia Pasifik merupakan refleksi dan dukungan terhadap strategi keamanan global Amerika Serikat. Dalam laporan empat bulanan Departemen Pertahanan Amerika Serikat tahun 1997, disebutkan bahwa Amerika Serikat menggunakan tiga konsep terpadu dalam kebijakan militernya, yaitu: Amerika Serikat akan terlibat secara global untuk membentuk (*shape*) lingkungan internasional yang aman dan damai; merespon berbagai krisis yang timbul; dan mempersiapkan diri dalam menghadapi berbagai kemungkinan.

Kawasan Asia Timur merupakan kawasan dimana sedang terjadi sebuah pergeseran kekuatan (*power shift*) yang menjadi ciri utama dari sebuah tata regional yang sedang berkembang dan ditandai oleh tiga kecenderungan besar, yaitu: Kebangkitan China, dominasi dan primacy (keutamaan) Amerika Serikat, serta revitalisasi peran Jepang. Selain itu, kawasan Asia Timur dewasa ini diwarnai dengan kontradiksi dan merupakan kawasan yang penuh ironi. Disatu sisi dapat dikatakan bahwa perkembangan strategis di kawasan Asia Timur selama 10 tahun terakhir cukup kondusif, stabil dan dinamis, sehingga Negara-negara di kawasan dapat lebih memusatkan perhatiannya kepada upaya pemulihan ekonomi mereka, tetapi disisi lain, sulit disangkal bahwa kawasan ini sebenarnya juga menyimpan potensi untuk terjadinya konflik, bahkan sikap permusuhan sisa-sisa politik perang dingin yang masih kental mewarnai hubungan internasional.

Dalam hal ini kepentingan Negara-negara besar semakin dipertaruhkan dari waktu ke waktu. Hal ini semakin terasa sejak terjadinya serangan teroris 11 September 2001

⁵ The Japan Institute of International Affairs (JIIA), *Politics of U.S. Policy toward China: Analysis of Domestic Factors*, September 2006

atas World Trade Center (WTC) dan Pentagon di Amerika Serikat, serta sejak dicanangkan “War of Terror” oleh AS. Secara umum perilaku Negara-negara besar di kawasan diwarnai persaingan, namun demikian keamanan nasional dan kedaulatan nasional mereka masih sensitif satu sama lain. Perubahan-perubahan di bidang politik, ekonomi, dan keamanan beberapa tahun belakangan ini telah menempatkan Asia Timur kembali dalam perhitungan-perhitungan strategis Negara-negara besar dunia.

Banyak pendapat yang menyatakan bahwa China sebagai kekuatan yang tumbuh secara damai (*peaceful rising*) secara perlahan bangkit menjadi salah satu kekuatan ekonomi terkemuka di dunia dan penetrasinya di kawasan Asia Timur sulit untuk dibendung, terlebih keanggotaannya dalam komunitas Asia Timur semakin diperkuat kehadirannya secara ekonomi di kawasan ini. Kebangkitan China merupakan fenomena yang paling penting sebagai proses kekuatan di Asia Timur.

David Shambaugh mengatakan bahwa struktur kekuatan dan parameter interaksi yang telah menjadi ciri hubungan internasional di kawasan Asia selama setengah abad lalu, sekarang ini sedang dipengaruhi secara fundamental, antara lain oleh meningkatnya kekuatan ekonomi, militer dan pengaruh politik China, serta posisi diplomatik dan keterlibatan Negara itu dalam institusi multilateral regional, sehingga karakteristik hubungan Negara-negara besar di Asia Timur dalam dekade mendatang akan diwarnai oleh respon terhadap kebangkitan China yang merupakan sebuah fenomena yang menggambarkan kebangkitan suatu kekuatan baru di Asia Timur yang oleh banyak pihak diperkirakan akan mampu menyaingi dominasi Amerika Serikat karena secara ekonomi, China telah menjadi sebuah “raksasa” yang impresif.⁶

Para pengambil keputusan Amerika Serikat bahkan sepakat bahwa dalam kurun waktu sekitar 30 tahun mendatang China akan menjadi sebuah kekuatan ekonomi terbesar setelah Amerika Serikat, melampaui Jepang dan Eropa di Asia Pasifik. Kemajuan ekonominya yang dinilai fantastis akan memberikan lebih pada wajah baru

⁶ David Shambaugh, “The Rise of China and Asia’s New Dynamics”, dalam David Shambaugh, ed, *Power Shift : China and Asia’s New Dynamis* Barkeley ; University of California Press, 2005, hal. 1.

Asia Timur dan memungkinkan China mengalokasikan sebagian kekayaannya untuk memodernisasi dan membangun kekuatan militer.

Pemerataan kekuatan militer yang terjadi tahun 1990-an di China tampaknya menjadikan China sebagai salah satu kekuatan besar di Asia, semakin mempercepat usahanya dalam memenuhi keinginan menjadi Negara adidaya dalam militer di Asia, namun dukungan Amerika Serikat dan Negara-negara barat begitu mewarnai dalam kekuatan militer Taiwan. Sehingga secara sekilas, kepentingan China begitu terasa dengan besarnya dorongan kepada tercapainya upaya peningkatan sistem pertahanan yang canggih, dimana tentunya akan banyak membawa dampak positif bagi China sebagai berupa tekanan psikologis terhadap Negara-negara barat dan Amerika Serikat.

Pada saat yang sama, semakin pentingnya China secara ekonomi dan militer, memberi ruang bagi China untuk memperkuat posisi diplomatik dan pengaruhnya di kawasan yang berpotensi melahirkan sebuah pergeseran kekuatan dengan segala implikasinya. Akibatnya, kawasan Asia Timur dihadapkan pada persoalan klasik dalam hubungan internasional, yaitu bagaimana merespon dan mengelola kelahiran kekuatan baru tersebut karena potensi konflik masih dimiliki oleh China dengan beberapa Negara seperti Jepang, Taiwan dan Korea Selatan yang tampaknya masih merupakan suatu ganjalan yang dapat mempengaruhi perkembangan hubungan-hubungan antara Negara di kawasan Asia.

Kecurigaan akan kemungkinan penggunaan kekuatan militer pada masa yang akan datang nampaknya dapat dipahami dengan kenaikan alokasi anggaran belanja militer China. Apalagi kenaikan anggaran ini dilakukan tidak lama setelah Cina menguji rudal jarak menengahnya yang berhasil menghancurkan satelit di orbitnya. Peningkatan anggaran belanja militer China tidak terlepas dari boomingnya ekonomi china secara keseluruhan. Saat ini China merupakan negara dengan cadangan devisa terbesar kedua di dunia setelah Jepang. Bahkan tidak mustahil beberapa tahun kedepan akan menyusul Jepang.

Selain peningkatan anggaran, upaya modernisasi kekuatan militer China juga terus diupayakan, termasuk diantaranya profesionalisme pasukan (personil), yaitu dengan jalan perampingan organisasi serta modernisasi peralatan militer. Cina yang tadinya berkiblat kepada peralatan bekas Uni Soviet, kini berupaya untuk mengadopsi standarisasi Barat. Berdasarkan Jane's information group, anggaran Cina meningkat tajam dibandingkan dengan Negara Asia Timur lainnya seperti Jepang, Taiwan, Korea Selatan.

Upaya kemandirian pemenuhan peralatan militer dilakukan dengan pemberdayaan dan pembinaan terpusat industry militer. Produk-produk inovatif lebih diutamakan dengan cara mengadaptasi perkembangan teknologi peralatan militer baik yang datang dari Timur maupun dari Barat. Upaya ini tidak begitu sulit bagi China dikarenakan mereka sudah mempunyai sumber daya manusia dengan tingkat pendidikan yang sangat memadai.

Peningkatan anggaran militer China dan kemampuan PLA, dalam konteks sistem internasional yang berlaku di kawasan adalah kekhawatiran China akan pergeseran kekuatan yang ada di Asia Timur. Tercatat beberapa aliansi dan kerjasama militer diantara Amerika Serikat, Jepang dan Australia menyebabkan China melakukan upaya modernisasi peralatan militernya. Pada tataran makrostrategi, upaya China untuk meningkatkan kekuatan militernya dalam kurun waktu sepuluh tahun kedepan dapat berimplikasi pada perimbangan strategis di kawasan. Tingkah laku China, sebagai sebuah Negara bangsa di Asia Timur, sangat ditentukan oleh faktor-faktor eksternal terutama sikap dan kebijakan AS dan para sekutu AS seperti Jepang, Korea Selatan dan Taiwan baik secara individu maupun gabungan. Dengan kata lain, secara hipotesis faktor China dalam hubungan segitiga Amerika Serikat-China-Sekutu Amerika Serikat akan menentukan lingkungan politik, keamanan, dan ekonomi kawasan Asia Timur.

Hal tersebut dapat dilihat dari ditandatanganinya Deklarasi Aliansi Keamanan untuk abad ke-21 antara Amerika Serikat dan Jepang dalam mewujudkan keberadaan strategi pertahanan perang bintang (star wars) yang digabungkan dengan rencana pembangunan sistem pertahanan rudal nasional (national missile defense system) di wilayah nasional

setiap Negara sekutu Amerika Serikat seperti Jepang, Inggris, Korea Selatan dan Australia yang sudah dimulai sejak awal tahun 2003. Kondisi tersebut ditentang China yang berpendapat aliansi tersebut seharusnya tidak ada seiring dengan berakhirnya era Perang Dingin.

Untuk meminimalisasikan dan menyeimbangkan keberadaan aliansi tersebut, China menjalankan strategi diplomatik menjalin hubungan militer lebih erat dengan Rusia dan mendukung penuh rezim keamanan multilateral di kawasan Asia Pasifik yakni ASEAN Regional Forum (ARF). Kemudian, dibidang ekonomi China juga secara maksimal menjalin kesepakatan perdagangan bilateral (Bilateral Free Trade Agreement) dengan beberapa Negara anggota ASEAN.

Kondisi ini telah memaksa China untuk mempercepat proses modernisasi sistem pertahanannya. Oleh karena itu, tidak mengherankan apabila yang sangat pertama kali dibidik China pada awal tahun 2007 kemaren adalah kemampuan menembak sasaran musuh di ruang angkasa. Hal ini disebabkan dalam kalkulasi militer baik strategi pertahanan perang bintang maupun sistem pertahanan rudal nasional Amerika Serikat dan sekutu-sekutunya hanya dapat dipatahkan secara dini di luar angkasa. Kemudian menjelang akhir tahun 2007 lalu, sebagai awal tahun dari *grand strategy* pertahanan China, diupayakan pengembangan angkatan bersenjata China yang unggul dalam kemampuan tempur berbasis teknologi informasi.

Upaya penguatan militer China diperkuat lagi dengan pidato presiden China Hu Jintao pada Kongress ke-17 Partai Komunis China (PKC) menyatakan bahwa China harus segera mengembangkan kemampuan militer yang berteknologi tinggi. Secara eksplisit, pemimpin PKC tersebut juga menginformasikan bahwa lima tahun ke depan, sasaran strategis pengembangan kekuatan militer China yakni membangun angkatan bersenjata yang terkomputerisasi, unggul dalam kemampuan tempur, berbasis teknologi informasi, serta didukung oleh prajurit bermutu tinggi dalam jumlah besar. Hu Jintao juga menyatakan bahwa Tentara Pembebasan Rakyat China (PLA) hanya berupaya mempercepat proses modernisasi militernya dan tidak akan pernah terlibat dalam perlombaan senjata maupun mengancam Negara manapun.

Hu Juntao menekankan, keberadaan angkatan bersenjata China adalah untuk bertahan dan hanya untuk menjaga kedaulatan, keamanan, dan integritas territorial Negara tersebut. Namun masyarakat internasional termasuk Negara-negara di kawasan Asia Timur tetap khawatir akan ambisi peningkatan kemampuan militer China. Hal itu disebabkan pergeseran kekuatan dalam era pasca Perang Dingin terjadi bersamaan dengan tampilnya China sebagai kekuatan politik dan militer khususnya di kawasan Asia Timur.

Berkembangnya hubungan China dibidang ekonomi dan militer dengan Jepang maupun dengan Amerika Serikat dan Eropa Barat dan kegelisahan China atas hubungan politiknya dengan Amerika Serikat yang tegang akibat penolakan Amerika Serikat untuk menghentikan penjualan senjata ke Taiwan merupakan sekelumit dinamika hubungan Amerika Serikat-China.

1.2 PERUMUSAN MASALAH

Sehubungan dengan latar belakang tersebut, yang menjadi pertanyaan penelitian adalah:

Bagaimana modernisasi militer China berpengaruh terhadap kebijakan Amerika Serikat di Asia Pasifik?

1.3 TUJUAN PENELITIAN

Memberikan gambaran dampak modernisasi militer China terhadap Politik Luar Negeri Amerika Serikat di Kawasan Asia Pasifik.

1.4 KERANGKA PEMIKIRAN

Berbagai perubahan yang terjadi dilingkup global telah menyebabkan peningkatan perhatian Negara-negara di Asia Timur pada isu keamanan. Implikasi dari perubahan global terhadap kawasan Asia Timur adalah munculnya suatu lingkungan keamanan

baru yang ditandai oleh ketidak-pastian akibat jatuhnya Uni Soviet dan maraknya ancaman baru yaitu terorisme.

Perubahan-perubahan yang terjadi dilingkungan global pasca perang dingin mempengaruhi pula persepsi dua aktor besar di kawasan yaitu China dan Amerika Serikat tentang situasi internasional dan sumber-sumber ancamannya. Situasi keamanan di Asia Timur menunjukkan tidak adanya ancaman langsung yang dapat menimbulkan instabilitas di kawasan tersebut. Ketegangan-ketegangan dalam hubungan bilateral tetap ada namun tidak sampai mengganggu perdamaian. Namun demikian situasi tersebut tidak menghapuskan kemungkinan terjadinya konflik regional dalam lingkup dan skala yang lebih kecil.

Pada tataran *level of analysis* mengenai teori dari “Ancaman China” merupakan hal yang fundamental dalam dinamika politik dan China sebagai kekuatan di masa mendatang menjadikan teori realis tepat untuk menganalisa tingkah laku China di kawasan. Kenneth Waltz memprediksi bahwa China akan menjelma sebagai kekuatan besar. China disinyalir akan membangun hegemoni di Asia Timur dan menjadi kompetitor utama AS di Kawasan.⁷

Sementara kebijakan Amerika Serikat adalah mengintegrasikan China kedalam ekonomi dan politik internasional. Namun demikian China sebagai kekuatan tetap ingin membentuk sistem internasional sesuai dengan keinginannya. Beberapa studi memperlihatkan bahwa China sebagai kekuatan status-quo, seperti yang dikemukakan oleh Ian Alstair Johnston. Disebutkan bahwa China dalam perilaku Internasional dan regional memastikan bahwa China bukan sebuah kekuatan yang *revisionist*.⁸ Namun demikian, pendapat lain mengatakan sebaliknya. Disebutkan bahwa China dimasukkan kedalam Great Power, dengan karakteristiknya sebagai *offensive realism* dan berperilaku sebagai revolusioner.

⁷ Kenneth Waltz, “Structural Realism after the Cold War”, *International Security*, Vol 125, No.1, 2000 hal 32.

⁸ Ian Alstair Johnston, “Is China a Status Quo Power?”, *International Security*, Vol 27, no.4, 2003, hal.5-56.

Pendekatan realist terhadap China

Interaksi dalam “*offense dan defense*” adalah sebuah topik yang banyak didiskusikan dalam analisis peperangan⁹ dimana pada tahun 90an, para pemikir neo-realis mulai terbelah pada dua divisi, yaitu offensive dan defensive realism yang secara fundamental berbeda mengenai kesimpulan dalam memandang setiap fenomena dalam hubungan internasional dimana kaum *defensive realism* memiliki pandangan bahwa sebuah negara yang tergolong great power lebih memilih untuk mempertahankan status quo daripada meningkatkan kapasitas powernya, dengan kata lain, *defensive realism* tidak berupaya meningkatkan kemampuan keamanan dengan melemahkan sistem keamanan negara lain.

Berbeda dengan *offensive realism* yang selalu mencari kesempatan untuk mendapatkan power dari negara-negara lain untuk mencapai tujuan hegemoni, sehingga bisa dibayangkan jika dua negara *offensive realism* berhadapan maka akan ada kecenderungan terjadinya konflik dalam menyikapi fenomena permasalahan yang ada, dimana kata damai hanya menjadi sebuah ilusi. Di sisi lain, negara defensive realism menganggap sebuah kerjasama sebagai sebuah solusi atau bahkan strategi dalam mengurangi resiko sistem internasional yang anarki dan akan memperkecil dampak *security dilemma*, sehingga dua negara defensive realism tidak akan tampil menjadi sebuah ancaman satu sama lain, meskipun kemungkinan konflik tetap ada namun hal itu dapat diselesaikan secara damai karena pada dasarnya defensive realism juga mempercayai bahwa dalam permasalahan, baik itu bersifat politik ataupun lainnya, jalur diskusi menjadi pilihan pertama meski adanya juga kemungkinan terjadinya konflik dan ada beberapa konflik yang tidak bisa mencapai kata damai.

⁹ George H. Quester, *Offense and Defense in the International System*, Transaction Publishers, New Jersey, 2003. hal.1

Offensive dan defensive realism berbeda dalam menjawab pertanyaan mengenai seberapa besar power yang diinginkan oleh negara. Mengacu pada *defensive realism*, Negara menginginkan terwujudnya *balance of power*, sedangkan *offensive realism* percaya bahwa tujuan utama dari negara adalah untuk menjadi aktor yang hegemon dalam sistem internasional¹⁰.

Teori realis menyatakan bahwa sistem internasional, kelangsungan hidup bernegara adalah tujuan akhir. Negara mempunyai sifat sensitive untuk memelihara keberadaan *balance of power* untuk menjaga stabilitas di dunia yang serba anarki. Hal tersebut dapat menuntun negara untuk mencari keseimbangan ancaman eksternal lewat aliansi dan memelihara distribusi kekuasaan.¹¹

Dibawah paradigma ini, Negara dalam membangun politik luar negeri pada karakter kecurigaan, tingkah laku internasionalnya mendasarkan diri pada karakter kecurigaan, pembangunan aliansi dan hubungan antar Negara berdasarkan kepentingan nasional. *Offensive realis*, berargumen bahwa Negara tidak puas terhadap *balance of power* sebab tidak ada ruang di sistem internasional untuk kekuatan status-quo. Negara mempunyai sifat intensif untuk meningkatkan powernya.

Perhatian Amerika Serikat terhadap Asia Timur dapat dilihat dari pernyataan Christopher Hill (wakil asisten Menlu urusan Asia Timur dan Pasifik) didepan Sub komite Asia Pasifik dari komite Hubungan Internasional, DPR Amerika Serikat bahwa tidak ada bagian dari dunia lainnya yang memiliki manfaat dan tantangan potensial

¹⁰ John Mearsheimer, *The Tragedy of Great Power Politics*, New York: W. W. Norton, 2001

¹¹ Kenneth Waltz, *Theory of International Politics*, New York, Mc Graw Hill, 1979, hal. 60.

untuk Amerika Serikat kecuali Asia Timur. Asia Timur penting untuk Amerika Serikat baik alasan-alasan ekonomi maupun alasan-alasan politik dan keamanan.¹²

Ketika kehadiran politiknya dinilai menurun akibat berakhirnya perang dingin, bidang ekonomi menjadi pilihan untuk mempertahankan pengaruh dan kehadirannya di kawasan. Dalam konteks ini, kerjasama ekonomi seperti APEC memberi ruang bagi Amerika Serikat dalam mempengaruhi perkembangan ekonomi, khususnya Asia Timur. Dalam buku putih tentang sejarah keamanan Amerika Serikat tahun 2006 menegaskan bahwa stabilitas dan kemakmuran kawasan sangat tergantung pada keterlibatan yang berkelanjutan dari Amerika Serikat, yaitu mempertahankan kemitraan dengan Negara-negara kawasan dengan dukungan pengeluaran pertahanan kedepan.

Untuk itu dengan pertimbangan geopolitik dan dalam upaya menanamkan pengaruhnya, maka Amerika Serikat memandang perlunya peningkatan kerjasama dengan aliansinya di Asia Tmur. Pengertian Aliansi disini adalah sebuah konfigurasi *Power* dimana Negara berusaha mempertahankan kelangsungan hidup serta menciptakan peluang untuk memajukan kepentingan nasionalnya dengan mentautkan *power* yang dimiliki terhadap satu atau lebih Negara lain yang memiliki kepentingan serupa. Pola aliansi merupakan keputusan untuk mengubah atau mempertahankan equilibrium lokal, regional, atau global. Tindakan demikian biasanya diikuti oleh pihak Negara lain yang tindakannya serupa. Dengan demikian pola aliansi mengungkapkan penampilan khas Negara blok versus Negara blok lainnya. Pola *power* seperti ini kerap dibentuk berdasarkan perjanjian persekutuan yang bersifat resmi, namun kesepakatan atau persekutuan yang bersifat kurang formil juga dapat berlangsung.¹³

¹² Christopher Hill, "Emergence of China in the Asia Pasific Economic and Security Consequence for the US" 7 Juni 2005. Diunduh dari <http://foreign.senate.gov/testimony/2005/Hilltestimony050607.Pdf> . pada tanggal 20 mei 2011.

¹³ Jack C Plano dan Roy Olton, "The International Relations Dictionary" terjemahan oleh Wawan Juanda, diterbitkan oleh Putra A Bardin, 1999, hal. 11 -13.

Aliansi adalah sebuah perjanjian untuk saling mendukung secara militer jika salah satu Negara penandatanganan perjanjian diserang oleh Negara lain: selain itu aliansi ditunjukkan untuk memajukan kepentingan bersama diantara Negara anggota. Aliansi dapat bersifat bilateral atau multilateral, rahasia atau terbuka, sederhana atau sangat terorganisir, dapat berjangka waktu lama atau pendek, serta dapat dikendalikan untuk mencegah atau memenangkan sebuah perang. Sistem *Balance of Power* cenderung mendorong terbentuknya pakta militer untuk mengimbangi perubahan dalam keseimbangan kekuatan. Piagam PBB mengakui hak untuk “membela diri secara kolektif” yang tercantum dalam pasal 51.

Pola aliansi saat ini merupakan teknik yang paling banyak dipergunakan oleh Negara di dunia yang dipacu untuk memperbesar kekuatan nasional serta menjamin kepentingan keamanan nasional. Berbagai kritik seperti diungkapkan oleh Woodrow Wilson menyatakan bahwa perimbangan kekuatan dengan memakai sarana aliansi militer merupakan ancaman terhadap perdamaian karena pada dasarnya pola *power* demikian mendorong terjadinya perang, dan akhirnya menjadi antitesis terhadap keamanan nasional serta internasional. Gejala seperti ini seringkali disebutkan dalam bentuk terminologi “*security-insecurity paradox*”: yaitu manakala sebuah Negara meningkatkan keamanannya melalui aliansi, maka keamanan pada pihak lainnya akan menjadi lemah, sehingga mendorong Negara tersebut untuk memperkuatnya. Dengan demikian timbul sebuah siklus yang memperkuat suhu ketegangan dan pada masa sekarang gejala seperti ini disebut *Balance of Terror* karena adanya persenjataan nuklir. Meskipun demikian pola aliansi tetap diminati dan diterapkan oleh banyak Negara karena (1) keterbatasan pola uniteralisme pada abad teknologi yang semakin maju, (2) runtuhnya sistem Negara untuk membentuk kondisi yang esensial bagi terselenggaranya pola keamanan kolektif secara universal atau membangun sistem kerjasama dalam sebuah pemerintahan dunia; dan (3) bahaya yang menyatu dalam wujud sebuah Negara yang berusaha untuk mendominasi dunia dengan kekerasan.

Kebanyakan aliansi kontemporer meluas kedalam organisasi regional yang bekerjasama untuk ikhwal ekonomi, sosial, pemerintahan, penyelesaian konflik secara

damai, serta masalah militer. Sistem aliansi yang berfungsi ganda meliputi *North Atlantic Treaty Organization* (NATO). Sistem aliansi lainnya seperti liga Arab, *Organization of African Unity* (OAU) melingkupi komitmen untuk memajukan kepentingan keamanan bersama yang bersifat politik daripada militer. Kendati aliansi dapat membantu terciptanya perasaan aman serta menangkal agresi, namun aliansi juga dapat menjadi sumber ketegangan internasional serta pembentukan aliansi tandingan. Persaingan aliansi cenderung mengakibatkan terjadinya pacu senjata, krisis, serta perang. Sistem aliansi yang berfungsi sebagai mekanisme *balance of power* nampaknya akan tetap berlanjut hingga terbentuknya sistem keamanan kolektif yang bersifat universal.

Aliansi juga dapat dalam bentuk bilateral *Security Pact* perjanjian dua Negara yang mengikrarkan dukungan militer jika mereka diserang oleh Negara ketiga. Pakta keamanan bilateral dapat memberikan bantuan yang segera dan tanpa batas jika terjadi serangan terhadap salah satu Negara tersebut, atau mereka dapat melakukan konsultasi sebelum melakukan tindakan balasan. Pakta ini juga ditujukan kepada setiap Negara yang menyerang salah satu diantara mereka, atau bersifat terbatas untuk melakukan tindakan terhadap serangan yang dilakukan oleh Negara tertentu yang terancam dengan pakta.

Dalam laporan pada tahun 2006, Departemen Pertahanan Amerika Serikat, pentagon, mengemukakan bahwa disebutkan adanya usaha-usaha China mempersenjatai diri dengan alat-alat militer yang canggih. Laporan yang disampaikan kepada kongres Amerika Serikat ini secara mendetail mencatat trend-trend kemampuan China untuk menghambat masuknya kekuatan pasukan lain ke seluruh wilayahnya melalui sebuah kombinasi pesawat penyerbu, kapal selam dalam rudal-rudal canggih. Dengan penambahan kekuatannya ini, China memiliki kemampuan untuk menangani berbagai konflik di wilayahnya dan melindungi sumber-sumber energinya. Menurut Pentagon, kecenderungan terbaru ini memungkinkan China memiliki kemampuan untuk melancarkan rangkaian opsi-opsi militer Asia jauh melewati Taiwan. Hal ini dapat menciptakan sebuah ancaman yang berarti terhadap kekuatan-

kekuatan militer modern yang ada di kawasan... “kekuatan militer modern” merujuk ke militer Jepang atau Angkatan Laut Amerika Serikat”¹⁴

Fenomena tersebut nampaknya telah membuat Amerika Serikat sebagai *super power* tunggal merasa sebagai Negara yang paling terganggu oleh persoalan klasik tersebut, sebab kepentingan strategi utama Amerika Serikat di Asia Timur, sekarang dan dimasa mendatang akan tetap focus pada pemeliharaan dominasi keutamaan Amerika Serikat di kawasan. Dalam kaitan ini, kebangkitan China merupakan suatu hal yang paling signifikan dan sekaligus tantangan strategis terbesar bagi masa depan Amerika Serikat di kawasan. Disatu sisi, Amerika Serikat harus mampu merespon dan mengakomodasikan kebangkitan China sehingga dapat menjadi aktor dan mitra kawan yang baik dalam menjamin stabilitas kawasan. Disisi lain, Amerika Serikat harus bisa memainkan peran agar China tidak menjadi tantangan bagi dominasinya di kawasan.

Ketidakpastian tersebut telah melahirkan strategi Amerika Serikat yang sering disebut sebagai strategi pemagaran (*Hedging Strategy*) dimana Amerika Serikat bermaksud membuka peluang bagi dirinya dalam mempertahankan hubungan ekonomi yang menguntungkan dengan China, sambil menangani ketidakpastian akan meningkatnya kerisauan dibidang keamanan yang ditimbulkan oleh kebangkitan China.¹⁵ Dalam hal ini Amerika Serikat menjalankan kebijakan yang kompetitif dan kooperatif sekaligus terhadap China, seraya mendorong China menjadi bagian institusi internasional. Strategi ini tercermin dalam perkembangan kebijakan Amerika Serikat terhadap Jepang dan India sebagai sekutunya. Terhadap Jepang, Amerika Serikat mendorongnya untuk memainkan peran keamanan yang lebih besar.

Sebagai keamanan tunggal terbesar sepertinya Amerika Serikat memang tidak bisa lepas dari keharusannya untuk selalu memonitor dan mengawasi kawasan Asia Timur yang merupakan kawasan yang sangat penting untuk menjalankan strateginya. Permasalahan Taiwan dengan China dalam sengketa Selat Taiwan menjadi sedemikian penting, mengingat perseteruan Taiwan Cina dapat memicu perang China-Amerika

¹⁴ Laporan Tahunan Pentagon, Mei 2006, diunduh pada <http://www.defencenling.mil/pubs> .

¹⁵ Evan S Medeiros, “*Strategic Hedging and the Future of Asia-Pasific Stability*” (The Washington Quarterly, Winter 2005-2006), hal.145.

Serikat. Terlebih setelah keduanya sama-sama berpegang kepada satu aturan main, dimana China mengesahkan UU non-damai yang dapat menyerang Taiwan, sementara Amerika Serikat berpegang pada *Taiwan Relations Act* untuk membantu Taiwan jika diserang. Disisi lain, Amerika Serikat menyetujui penjualan sembilan unit peluncur rudal anti rudal patriot (PAC 2 dan PAC 3) kepada Taiwan sebagai penangkal serangan rudal balistik China.

Dalam menerapkan strategi pemagarannya, Amerika Serikat memperkuat kerjasama aliansi pertahanannya dengan Jepang sebab keanggotaan Jepang dalam komunitas Asia Timur dapat dipandang merupakan salah satu kekuatan besar dari kepentingan jangka panjang Amerika Serikat dimana Amerika Serikat menjanjikan Jepang sebagai penghubung antara Amerika Serikat dan Asia. Dalam kapasitasnya tersebut, Jepang dapat menjamin peran dan hadirnya Amerika Serikat di Asia Timur dimasa mendatang.¹⁶

Dalam hal ini Jepang memegang peran kunci bukan hanya bagi stabilitas kebijakan dan strategi Amerika Serikat di kawasan Asia Timur, tetapi juga menentukan kecenderungan strategi kawasan, baik dalam bidang politik, ekonomi maupun keamanan. Keterkaitan antara stabilitas regional Asia Timur dan peran militer Jepang memang merupakan hal yang kompleks. Disamping itu, Jepang mendukung kerjasama multilateral ekonomi dengan Negara-negara Asia Tenggara karena dianggap dapat memajukan dan menjaga stabilitas perekonomian kawasan. Disisi lain, keterlibatan Jepang dalam kancas pergeseran kekuatan di Asia Timur juga mengisyaratkan adanya kepentingan Jepang untuk menjadi aktor besar di kawasan, bersaing dengan China dan Korea Selatan.

Perubahan kebijakan Jepang dan peran Jepang di kawasan Asia Timur tentunya tidak dapat dipisahkan dari hubungan bilateralnya dengan Amerika Serikat. Hal ini tercermin dari aliansi Jepang-Amerika Serikat beberapa tahun terakhir yang ditandai dengan peran aktif Jepang dalam kerangka Theatrical Missile Defence (TMD) dan Proliferation Security Initiative (PSI). Bagi Jepang, menguatnya aliansi ini, terutama

¹⁶ Yusuf Wanandi, "East Asia Community and the Role of Japan", *The Jakarta Post*, 2 Februari 2006.

dalam kerangka TMD, mengimbangi ancaman nuklir Korea Utara. Dalam hal ini dapatlah dikatakan bahwa TMD merupakan pengukuhan hegemoni Amerika Serikat dalam dinamika kawasan Asia Timur, ditambah dengan kebijakan penempatan pasukan Amerika Serikat di Jepang, yang merupakan perwujudan nyata kehadiran militer AS di kawasan.

Strategi Pertahanan China

Presepsi Amerika Serikat tentang adanya ancaman China dan kerjasama Pertahanan Amerika Serikat dengan Jepang dan Taiwan telah menjadikan poin penting China untuk membangun strategi pertahanan China di Asia Timur. Menurut Basil Liddell-Hart strategi adalah seni mendistribusikan dan penerapan policy dengan cara militer. Hedley Bull menyatakan bahwa strategi adalah eksploitasi kekuatan militer untuk pelaksanaan sebuah kebijakan. Sedangkan Collin Andrew menyatakan bahwa strategi adalah hubungan antara kekuatan militer dengan tujuan politik.¹⁷

Strategi pertahanan yang dilaksanakan suatu Negara sangat bervariasi hal ini banyak faktor yang mempengaruhi seperti geografi, potensi nasional, ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya dan sebagainya. Semua faktor tersebut, dapat disebut sebagai sarana untuk mencapai tujuan. Sebab sarana yang tersedia akan memperluas atau mempersempit ruang gerak dari kemungkinan cara yang dapat digunakan. Semakin banyak sarana yang tersedia akan semakin banyak cara yang mungkin dilakukan, tergantung dari kemampuan panglima untuk menatanya secara harmonis. Untuk menguraikan pengertian strategi sangat beragam tergantung dari sejarah suatu bangsa dalam pengalamannya melaksanakan perang, kemajuan ilmu pengetahuan serta pendekatan politik yang berlaku pada kurun waktu tertentu.

Strategi pertahanan secara umum dipahami sebagai suatu seni (art) untuk mencapai tujuan pertahanan yaitu perlindungan kedaulatan, integritas wilayah, dan keselamatan bangsa dengan keterbatasan sumber-sumber yang tersedia. Karena itu strategi hanya bisa dirumuskan jika perumusan tentang tujuan pertahanan dan identifikasi ancaman /

¹⁷ Craigh A Synder (ed)., “*Contemporary Security and Strategy*,(UK Macmillan, 1999), hal.4.

tantangan atau skenario perkembangan yang dihadapi dilakukan secara jelas. Strategi mensyaratkan kejelasan tentang apa yang hendak dicapai. Secara normatif pada tingkat paling atas ini disebut sebagai tujuan nasional yang akan dicapai melalui pilar ekonomi, pilar pertahanan dan militer, dan pilar politik. Strategi pertahanan hanyalah salah satu dari upaya untuk mencapai tujuan nasional. Tanpa tujuan nasional, strategi pertahanan tidak mempunyai arah.

Dalam buku putih Pertahanan Nasional China disebutkan bahwa tujuan keamanan nasional, Nasional China adalah melindungi kedaulatan, melakukan modernisasi dan menciptakan stabilitas nasional. China mengambil kebijakan pertahanan yang *defensive* yang mencakup beberapa aspek antara lain mengkonsolidasi pertahanan nasional, melawan agresi, meredam gerakan subversi bersenjata, mempertahankan keamanan dan integrasi wilayah, persatuan dan kedaulatan Negara. Kebijakan China modernisasi pertahanannya hanyalah untuk mempertahankan diri. Pembangunan kekuatan China bukan merupakan ancaman bagi siapapun, maupun menjadi ancaman kekuatan hegemoni, namun lebih ditujukan pada usaha untuk menciptakan perdamaian. Namun seandainya hegemoni dan politik kekuasaan masih ada dan terus berkembang khususnya, usaha untuk melakukan reunifikasi secara damai terhalangi, China akan meningkatkan kemampuannya untuk mempertahankan kedaulatan dan keamanan dengan kekuatan militer.

China menekankan kemandirian sebagai landasan untuk menjaga keamanan Negara dan tetap menyusun kebijakan pertahanan nasional dan strategi pembangunan secara mandiri. China tidak berkeinginan untuk membentuk aliansi dengan Negara lain ataupun bergabung dengan suatu blok militer. China berprinsip mengutamakan operasi-operasi *defensive*, mempertahankan diri dan hanya memberikan serangan balasan jika diserang terlebih dahulu. Pertahanan seperti ini berarti menggabungkan usaha untuk penangkalan perang dengan persiapan-persiapan untuk memenangkan perang, mempertahankan diri pada masa damai dan melakukan kebijakan pertahanan strategis dengan operasi ofensif taktis pada masa perang. Untuk mencapai tujuan tersebut, disamping mengandalkan diri pada persenjataan yang ada, angkatan bersenjata *China People's Liberation Army (PLA)* atau Tentara Pembebasan Rakyat (TPR) melakukan

adaptasi dengan perubahan-perubahan yang mendalam dilingkungan militer internasional dan siap melakukan operasi-operasi pertahanan menggunakan persenjataan berteknologi tinggi.

Strategi pertahanan dibentuk oleh beberapa factor. **Pertama**, faktor ideologis-normatif. Faktor **kedua** adalah tujuan nasional dalam kurun waktu tertentu yang merupakan penjabaran dari faktor pertama yang berisi prioritas-prioritas program yang akan dilakukan oleh pemerintah. Faktor **ketiga** adalah faktor geografis yang membentuk konsepsi tentang geopolitik dan geostrategik. Faktor geografis mempunyai 3 nilai strategis bagi kepentingan keberlangsungan hidup: *pertama* bahwa geografi adalah area bermain bagi mereka yang merancang dan melakukan suatu strategi; *kedua*, bahwa geografi adalah parameter fisik yang secara unik membentuk pilihan-pilihan teknologi, taktik, sistem logistik, institusi dan budaya militer suatu masyarakat; dan *ketiga*, bahwa geografi merupakan suatu inspirasi yang membentuk pemahaman bersama tentang perpolitikan dalam batas-batas fisik geografis tersebut. Geografis membentuk karakteristik strategis dan karakteristik militer dari suatu masyarakat atau Negara apakah akan lebih bersifat kontinental, perairan atau suatu kondisi-kondisi tertentu. Selain itu, kekuatan militer diorganisir berdasarkan lingkungan/mata operasi mereka yang terdiri dari darat, air, udara dan ruang angkasa dengan menggunakan instrument khusus atau taktik khusus yang secara geografis unik untuk suatu wilayah tertentu untuk tujuan efisiensi dan efektifitas.

Dilihat dari sudut geografis, ancaman terhadap kedaulatan China dewasa ini berasal dari darat maupun laut. Dari laut difokuskan adalah konflik Laut China Timur dengan kemungkinan AS terlibat didalamnya. Potensi konflik yang dapat terjadi di Laut China Timur melibatkan China, Jepang dan Taiwan. Begitu juga dengan ancaman di garis perbatasan, permasalahan nuklir di Korut, aktifitas teroris di Xinjiang, pengamanan jalur energy laut terutama di Selat Malaka. Masalah keamanan ini menghasilkan penyesuaian strategi pertahanannya dan menghasilkan apa yang di namakan

“*beishounangong*” (berupa proyeksi postur pertahanan yang defensive di Utara, Barat Laut dan Barat Daya serta pertahanan Ofensif di sepanjang Selat Taiwan).¹⁸

Untuk memahami strategi pertahanan China, dari konteks sejarah pembentukan militer china dan hubungannya dengan Partai Komunis China. Hal tersebut dikarenakan peran yang sama dalam pembentukan negaran komunis China, serta perjuangannya dalam melawan kaum Nasionalis (Koumintang), pengalaman perang melawan Jepang di Manchuria serta keterlibatan dalam perang Korea telah menjadikan TPR sebagai tentara yang profesional. Perkembangan selanjutnya hubungan sipil militer China-Partai Komunis China (PKC) serta adopsi soviet model dalam regulasi dan standarisasi TPR mewarnai perkembangan militer China. Adopsi tersebut salah satunya disebabkan adanya embargo militer dari Negara barat.¹⁹

Pembentukan Strategi pertahanan China juga dilihat dari karakteristik hubungan sipil-militer antara PKC dengan TPR dapat dilihat dalam beberapa komponen antara lain: Kesamaan ideology dan *revolutionary*, adanya status politik yang seimbang serta kesamaan dalam kepentingan yang sama.²⁰ Puncak dari kerjasama sipil-militer China ini dapat dilihat ketika peristiwa Tianamen dimana dukungan TPR terhadap PKC dalam menghadapi demonstrasi rakyat. Hubungan sipil-militer direfleksikan dalam komando tertinggi dari TPR. Pemimpin Partai secara otomatis menjadi komando tertinggi dari CCP Central Military Commision (CMC) dengan dibantu oleh perwira lainnya seperti General Staff Departement, General Political Affairs Department, General Logistical Department dan General Armament Department dan empat angkatan lain seperti AD, AL, AU dan kekuatan Strategi rudal.

Dalam bidang perumusan kebijakan pertahanan ditentukan oleh kelompok pemimpin di jajaran elit pimpinan Partai Komunis China. Perumusan kebijakan pertahanan China selalu melibatkan partai dan militer. Hal ini disebabkan oleh perkembangan komunisme

¹⁸ You Ji, “*In Search of A Capable Fighting Force: Chinese Military Modernization and Transformation*”, Seminar Dephan RI.

¹⁹ *Ibid.*

²⁰ Li, Nan, *Chinese Civil-Military Relations*, London: Routledge, 2006. hal 20

China yang tidak terpisahkan dengan kekuatan militer selama revolusi kelompok komunis melawan kelompok nasionalis. Oleh karena itu, strategi kebijakan militer juga tergantung oleh ketua PKC yang sedang memimpin.

1.5 Hipotesa

Dalam modernisasi militer China membuat Amerika Serikat mengambil kebijakan Engagement and Enlargement di Asia Pasifik.

1.6 Model Analisa

<u>Variabel Dependen</u>	<u>Variabel Independen</u>
<ul style="list-style-type: none"> • Kebijakan Amerika Serikat di Asia Pasifik 	<ul style="list-style-type: none"> • Modernisasi Militer China

1.7 Metodologi Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah deskriptif analistis. Deskriptif karena menggambarkan kondisi-kondisi yang menjadi variabel independen dan variabel dependen yang merupakan dasar dari permasalahan yang dibahas. Penulisan ini bersifat analistis karena menjelaskan keterkaitan antara variabel independen dan variabel dependen.

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan mengadakan penelitian kepustakaan yaitu dengan mencari, mengumpulkan dan mempelajari serta meneliti data-data yang terkumpul melalui buku-buku, majalah, atau jurnal, serta literature yang relevan dengan pembahasan.

BAB II

KEBIJAKAN AMERIKA SERIKAT TERHADAP CHINA

2.1 Strategi Global Amerika Serikat.

Strategi umum Amerika Serikat pasca perang dingin sangat berkaitan dengan pemerintahan Presiden Clinton mulai berkuasa selama dua periode ketika perang dingin usai. Runtuhnya emporium dan kekuatan Uni Soviet merupakan hasil dari “*containment strategy*”²¹ yang merupakan strategi jangka panjang di masa perang dingin. Inti dari strategi Amerika Serikat tersebut adalah : menahan ekspansi komunisme dan Uni Soviet dengan kekuatan nuklir dan konvensional, member bantuan ekonomi dan militer kepada Negara-negara sekutu Amerika Serikat yang turut membantu ekspansi Uni Soviet tersebut, serta mendorong meluasnya system pemerintah yang demokratis.

2.1.1 Dilema Keamanan (*Security Dilemma*)

Pecahnya suatu perang dapat diakibatkan oleh adanya perlombaan senjata yang secara strategis tidak stabil dan secara politis tidak terkendali. Disini Negara-negara yang bermusuhan terkunci dalam sebuah siklus ketakutan bersama. Dalam proses ini semua pihak sama-sama merasa terancam, kesaingan defensive salah satu pihak dianggap motif ofensif oleh pihak lain, yang selanjutnya mempersenjatai diri sebagai tanggapannya. Hal inilah yang disebut dilemma keamanan (*security dilemma*), yang akhirnya pihak yang satu dan atau pihak lainnya akan terus mengawais pihak lain dan menambah persenjataan untuk kepentingan keamanan sendiri.

Negara pertama kemudian akan merasa terancam dan terpaksa mengambil tindakan lanjut yang dapat memprovokasi tindakan balasan Negara lain. Ini

²¹ *Containment* (pembendungan) strategi pada dasarnya adalah strategi yang dijalankan oleh Amerika Serikat dalam membendung ideology komunis.

sumber munculnya pertimbangan strategi “*First-Strike-Attack*” dan “*Second-Strike Attack*” (*Retalitation Capability*), “*Deterence*” (upaya penggetar), pencegahan (*intercept*) dan hal lain semacam itu.

Amerika Serikat memprediksi bahwa keamanan nasional Amerika Serikat terancam pada tahun-tahun mendatang sehubungan dengan bermunculannya Negara-negara yang dapat memproduksi rudal balistik yang berskala menengah maupun tinggi. Negara-negara yang nakal (*rouge states*) menurut kepentingan politik Amerika Serikat, yaitu²²: Korea Utara, Iran, Irak, dan yang lainnya. Dalam jangka panjang, bagaimanapun juga penyebaran system pertahanan ini dapat mengancam keamanan Amerika sendiri dengan merusaknya hubungan dengan China dan khususnya dengan Rusia. Dengan menempatkan ketegangan-ketegangan baru pada hubungan tersebut dengan kunci Negara-negara Eropa. Dengan digelarnya perisai rudal nasional ini, maka Amerika Serikat akan lebih aman terhadap ancaman yang telah diprediksinya, sehingga nantinya kekuatan persenjataan militer Amerika Serikat baik senjata strategis maupun konvensional akan bertambah kuat dan semakin disegani oleh Negara-negara lain.

2.1.2 Persepsi ancaman

Dari ketakutan dan kekhawatiran Amerika Serikat terhadap Negara-negara yang memiliki dan mampu memproduksi senjata nuklir, dapat dikatakan bahwa Amerika Serikat sudah melihat ancaman-ancaman yang jelas mengenai aksi penyerangan terhadapnya dimasa datang.

Perkembangan rudal balistik adalah merupakan sesuatu persoalan, karena menyangkut satelit-satelit roket dan waktu penyerangan yang sangat singkat, yang membuat rudal-rudal ini atraktif untuk pengiriman senjata NBC (Nuclear Biological or Chemical).

Disamping lima kekuatan nuklir yang dideklarasikan, ada sekitar 25 negara yang sudah memiliki atau sedang berusaha untuk memperoleh rudal balistik.

²² Roger Cliff and Jeremy Shapiro. “The Shift to Asia: Implications for U.S Land Power”, dalam Lynn E. Davis and Jeremy Shapiro (ed) *The U.S Army and The New National Security Strategy*, (Rand Aroyyo Center, 2003), hal 86.

Korea Utara, Iran dan Siria diantaranya merupakan ancaman yang serius dengan kemampuan rudal balistiknya selain cina yang mungkin akan menyerang AS dan sekutunya.

2.1.3 Strategi Engagement dan Enlargement

Dimasa pasca perang dingin, pemerintahan Bill Clinton beranggapan bahwa dalam keadaan global yang semakin terpadu dan semakin mandiri Amerika Serikat tidak akan berhasil dalam meningkatkan berbagai kepentingan di bidang politik, militer maupun ekonomi tanpa keterlibatan secara aktif Amerika Serikat dalam dunia internasional. Pemerintahan Clinton berpendapat bahwa kebijakan *isolationism* bukan merupakan alternative mengingat tujuan pembaharuan dalam negeri Amerika Serikat akan ditentukan oleh keberhasilan Amerika Serikat dalam membuka psar luar negeri, menyebarkan demokrasi di berbagai Negara penting dan mengekang berbagai ancaman yang muncul.

Berkaitan dengan hal tersebut para pejabat gedung putih telah merumuskan suatu doktrin kebijakan luar negeri Amerika Serikat untuk era pasca perang dingin dalam bentuk strategi keamanan nasional yang dikenal dengan sebagai kebijakan *engagement* dan *enlargement*²³ istilah *engagement* adalah sinonim untuk menyebutkan kiprah Amerika Serikat didunia internasional secara aktif, sementara *enlargement* mengacu pada pentingnya tujuan dari perluasan dan penyebaran, demokrasi, hak asasi manusia (HAM), dan pasar terbuka. Kebijakan tersebut di canangkan pada bulan februari 1996 dan mencakup 3(tiga) tujuan utama yakni :

1. Meningkatkan keamanan AS dengan mempertahankan kekuatan militer yang kuat dan menerapkan diplomasi yang tepat guna untuk meningkatkan kerjasama keamanan dengan Negara lain.
2. Mengupayakan peningkatan kemakmuran domestic melalui pembukan pasar asing dan perkembangan ekonomi global

²³ David J Myers, *Regional Hegemons, Threat Perception and Strategic Response*, dalam David J Myers, *Threat Perception and Strategic Response of The Regional Hegemons: A Conceptual Overview*. West View Press. 1991.

3. Meningkatkan demokrasi diluar negeri.

Dengan tiga tujuan utama tersebut sebenarnya Amerika Serikat ingin melindungi kepentingan vital secara global. Secara umum kepentingan vital Amerika Serikat adalah melindungi dan mempertahankan kehidupan dan kebebasan warga Amerika. Kepentingan Amerika Serikat yang lain adalah mempromosikan pertumbuhan ekonomi, kehidupan dalam negeri yang lebih baik dan kemakmuran warga Amerika.

2.2 Strategi Amerika Serikat di Asia Timur

Amerika Serikat memiliki kepentingan yang cukup besar dikawasan Asia Pasifik, karena itu pemerintah Amerika Serikat memiliki berbagai kekhawatiran terhadap stabilitas kawasan sehubungan dengan berbagai krisis keamanan yang terjadi dalam kurun waktu 1993-1998. Berbagai peristiwa tersebut antara lain adalah ketegangan antara RRC-Taiwan, program nuklir Korea Utara dan uji coba peluncuran rudal Taepo Dong 1 Korea Utara yang melintasi wilayah udara Jepang.

Dalam rangka mempertahankan ketertiban keamanan kawasan, pada awal 1995²⁴, yang merinci strategi keamanan Bill Clinton berdasarkan kebijakan *Engagement and Enlargement*. Kebijakan tersebut terdiri atas tiga bagian kebijakan utama, yakni²⁵:

1. Memperkuat persatuan kawasan (aliansi dengan Jepang) dalam rangka mengidentifikasi berbagai basis baru dalam era pasca perang dingin.
Agar upaya untuk mengetahui perkembangan yang terjadi baik di dalam kawasan maupun di luar kawasan Asia Pasifik dan didukung oleh komitmen amerika Serikat
2. Mempertahankan kehadiran kekuatan militer Amerika Serikat.
Kemampuan militer yang dimiliki Amerika Serikat merupakan militer terbesar di dunia, membuat pangkalan militer dikawasan agar dapat memantau

²⁴ Departemen Pertahan AS telah menerbitkan United States Strategy for the East Asia Pacific Region, 1995.

²⁵ Cato Habdbook for Congress, *East Asian Defense Commitments*,2002. hal 551.

perkembangan Negara-negara lain pada era pasca perang dingin agar tidak munculnya hegemoni pada satu Negara.

3. Membangun institusi regional.

Upaya melakukan hubungan kerjasama baik bilateral maupun multilateral dengan Negara-negara di kawasan Asia Pasifik.

Disamping itu pemerintahan Clinton juga berusaha membangun berbagai dialog keamanan bilateral dengan berbagai Negara kawasan termasuk RRC, Rusia dan berbagai Negara di Asia Tenggara. Amerika Serikat menerapkan strategi *Engagement* dan *Enlargement* sebagai strategi global, sedangkan strategi keamanan Amerika Serikat di Asia Timur cenderung menggunakan keamanan berupa *engagement strategy* secara kooperatif dengan sekutunya, yaitu strategi militer Amerika Serikat yang memberdayakan kekuatan, asset, dana, dan program dalam bentuk utama²⁶ : mempertahankan kehadiran pasukan Amerika Serikat di Asia Timur, memperkuat aliansi dengan sekutunya, dan merespon berbagai krisis yang timbul.

Sebagai salah satu bentuk konkrit strategi Amerika Serikat di Asia Timur adalah penempatan pasukannya di Negara-negara sekutunya seperti Jepang maupun di Korea Selatan, tabel dibawah ini akan memperlihatkan keseriusan Amerika Serikat dalam mengimplementasikan kebijakannya.

KEKUATAN MILITER AS YANG DITEMPATKAN DI JEPANG DAN KOREA SELATAN

	JEPANG	KOREA SELATAN
PERSONEL	14.700	40.300
PSC	9	-
AC	1	-
LCC	1	-
HQ	2	2

²⁶ *Ibid.* hal 553

HQ AB	1	1
AIR FORCE	84	84
TANK	-	116
AIFV	-	130
APC	SOME	SOME
HELICOPTER	SOME	SOME
AIR DEFENSE	-	156

Sumber : data merupakan hasil oalahan dari The Military Balance 2006, routledge IISS 2006

2.2.1 East Asia Strategic Initiative (EASI)

Garis besar dari strategi keamanan Amerika Serikat di Asia Timur tertuang dalam *East Asia Strategic Initiative* (EASI) yang disampaikan oleh Badan Internasional Security Affair (ISA), didalamnya menjelaskan berbagai hal yang menjadi kepentingan Amerika Serikat terhadap kawasan Asia Timur, antara lain: melindungi Amerika Serikat dari berbagai bentuk serangan, mendukung kebijakan *global deterrence*, melindungi akses politik dan ekonomi Amerika Serikat di kawasan, mempertahankan *balance of power* untuk mencegah munculnya hegemoni di kawasan, memperkuat orientasi barat terhadap Negara-negara Asia, mengembangkan pertumbuhan ekonomi dan Hak Asasi Manusia, mencegah Proliferasi Nuklir.

Dalam EASI II (1993-1995) menjelaskan strategi keamanan Amerika Serikat yang terdiri atas enam prinsip dasar, yaitu : memastikan keterlibatan Amerika Serikat di Asia dan pasifik, memperkuat kesepakatan dalam system keamanan bilateral, mempertahankan penggelaran pasukan militer Amerika Serikat, memberikan tanggung jawab pertahanan yang lebih besar kepada sekutu-sekutu Amerika Serikat, saling mendukung kerja sama pertahanan.

Dalam EASI III (1995-1998) yang dikeluarkan bulan Februari 1995, kebijakan Clinton (AS) diarahkan pada : memperkuat hubungan bilateral Amerika Serikat dan mengejar kesempatan – kesempatan baru melalui dialog-dialog keamanan multilateral, mempertahankan penggelaran pasukan Amerika Serikat bersama pasukan sekutunya, memastikan kebijakan keamanannya mendapat dukungan kongres dan rakyat Amerika Serikat, memperluas hubungan militer-militer dan bantuan keamanan, mencegah pengembangan senjata pemusnah massal, berbagi tanggung jawab dalam rangka mempertahankan keamanan regional dan global.

Dalam East Asian Strategy Report (EASR) ke 4 tahun 1998, disebutkan bahwa strategi keamanan Amerika Serikat di Asia Pasifik merupakan refleksi dan dukungan terhadap strategi keamanan global Amerika Serikat. Dalam laporan bulanan Dephan Amerika Serikat tahun 1997, disebutkan bahwa Amerika Serikat menggunakan 3 konsep terpadu dalam kebijakan militernya, yaitu: Amerika Serikat akan terlibat secara global untuk membentuk (*shape*) lingkungan internasional yang aman dan damai, merespon (*respond*) berbagai krisis yang timbul dan mempersiapkan diri (*prepare*) dalam menghadapi berbagai kemungkinan.

Dalam laporan tersebut juga menjelaskan langkah-langkah strategis yang telah dilakukan Amerika Serikat dalam kurun waktu 1995-1998 guna mengurangi ketegangan di kawasan Asia Timur dan untuk memperkuat pertumbuhan kawasan menuju kemakmuran ekonomi dan kerjasama politik, langkah-langkah tersebut antara lain: mempertahankan sekitar 100.000 personel militer Amerika Serikat di wilayah Asia Pasifik, memperkuat aliansi dengan Jepang melalui ”*Joint Security Declaration*” pada bulan april 1996, serta merevisi garis pedoman kerjasama pertahanan bilateral Amerika Serikat-Jepang atau “*US-Japan Defence Cooperation*” pada bulan September 1997, bekerjasama dengan Korea Selatan dan China dalam mensikapi ancaman militer Korea Utara melalui “*Four Party Talks*” dalam rangka solusi untuk meredakan ketegangan dan menciptakan perdamaian di semenanjung korea, memfokuskan perhatiannya terhadap ancaman senjata penghancur misal (WMD), nuklir dan peluru kendali Agreed Framework dan pembicaraan bilateral dengan Korea Utara, serta meningkatkan kemampuan

counterproliferation melalui berbagai system pertahanan Rudal Mandala atau *Theater Missile Defence* (TMD).

Dalam politik luar negeri Amerika Serikat, pertumbuhan ekonomi dan politik China sangat penting, Amerika Serikat melihat dalam beberapa alasan kepentingan nasional China. Dan China sebagai negara yang penting bagi Amerika Serikat membuat China harus dilibatkan dalam menyelesaikan tujuan kepentingan nasional Amerika Serikat.

Kesulitan yang dimiliki dari pendekatan 'panda hugger' dan 'dragon slayer' memiliki bentuk kombinasi kedua pendekatan kebijakan tersebut dapat menjadi suatu yang akan mempertahankan dari harapan yaitu kebijakan 'panda hedgers' dimana sambil membatasi perlawanan terhadap ketidakmampuan menghalangi China dari kepentingan dan tujuan-tujuan Amerika Serikat. Pendekatan 'Panda Hedgers' berhasil dari membawa China kedalam sistem internasional sembari menyiapkan kemungkinan dan tantangan China dalam kebijakan dan mencari cara untuk meyakinkan kepemimpinan China yang sangat beresiko. Pendekatan dalam kebijakan ini perlu meminimalisasi efek negatif tindakan China sebagai langkah awal untuk membatasi kemungkinan perselisihan. Tujuan dari 'panda hedgers' sebagai pendekatan untuk melanjutkan integrasi Asia, dimana pada saat yang sama kebijakan Amerika Serikat akan mempersiapkan kemungkinan konflik hegemoni dan struktur sistem internasional dan dilain pihak kepemimpinan China untuk integrasi dan sebuah kerjasama.

Adanya elemen – elemen dalam kebijakan tersebut untuk melanjutkan kerjasama politik, ekonomi dan bidang yang lain namun juga untuk mengancam China ke dalam isu-isu sensitif seperti hak asasi manusia dan untuk menghukum perusahaan – perusahaan China yang mengeksport teknologi nuklir ke negara yang bermasalah. juga untuk memperkuat hubungan keamanan dengan kekuatan kawasan, dan jika perlu untuk mempersiapkan rencana keamanan multilateral serta untuk menyusun kapabilitas militer Amerika Serikat untuk skenario yang merasakan China sebagai musuh. Condoleeza rice dan Collin powell, yang mendikte pembatasan melawan kemungkinan akan agresi China, perkembangan

penjualan senjata ke Taiwan, pertahanan proyektil Amerika Serikat yang menyeluruh, dan memperkuat aliansi dengan Korea Selatan dan Jepang. China mengasumsikan bahwa ini merupakan pilihan kebijakan Bush, dan melihat tidak adanya perbedaan antara "panda hedger" dan perlindungan yang sopan.

Amerika Serikat sekarang ini melihat kebijakan tersebut sekarang sebuah jalan untuk menghindari keretakan potensial dan konfrontasi militer dengan China. Karena Amerika menghormati beberapa hal yang dikemukakan China, yang pertama tidak ada usaha perlindungan terhadap Taiwan, kedua melanjutkan dukungan terhadap kebijakan satu China 'One China Policy', ketiga bahwa Amerika Serikat harus menerima sebagai pemberian bahwa kepemimpinan China memahami penting hubungan Amerika Serikat – China bagi pembangunan China.

2.2.2 National Defense Program Outline (NDPO)

Pada tahun 1976, melalui "*National Defense Program Outline*" (NDPO), konsep pertahanan nasional dari sisi kepentingan Jepang mengalami kemajuan, karena sudah diarahkan untuk melindungi Jepang dari sasaran agresi bersenjata, selain tetap menyimpulkan bahwa *Mutual Security Treaty* (MST) masih cukup mampu melindungi wilayah Jepang menghadapi kemungkinan konflik di Asia Timur. Ketentuan pokok yang masih tetap diberlakukan adalah larangan untuk memiliki, memproduksi dan menggunakan wilayah Jepang sebagai transit senjata nuklir.

Peranan *Sel Defence Forces* (SDF) dalam keamanan nasional Jepang sampai tahun 1970-an sangat tergantung pada AS. Pada tahun 1976, *Japan Defence Agency* (JDA) mengeluarkan Garis Besar Program Pertahanan Nasional atau NDPO, sebagai keinginan Jepang untuk meningkatkan kekuatan dan kemampuan militer Jepang sejalan dengan kemajuan ekonomi yang dicapai. Dalam NDPO terdapat beberapa prinsip pada kebijakan pertahanan Jepang. Prinsip tersebut antara lain, kebijakan yang berorientasi pertahanan, tidak menjadi kekuatan

militer, menerapkan *Three Non-Nuclear Principles*, mempertahankan control sipil atas militer, menerapkan *Three Principles on Army Export*, dan menetapkan batas maksimum anggaran pertahanan sebesar 1% dari GNP (*Gross National Product*).

Melalui NDPO 1976, untuk pertama kalinya dilakukan konfirmasi ke public mengenai struktur kekuatan tingkat kemampuan pertahanan yang dimiliki Jepang pada masa damai. Namun perubahan sistem internasional dan meningkatnya potensi ancaman dikawasan menyebabkan Jepang merasa perlu mengantisipasinya dengan mengubah kebijakan pertahanan.

Menghadapi ancaman nuklir Korea Utara dan penculikan warga Jepang oleh agen Korea Utara, serta masih pekanya hubungan Jepang-RRC, meningkatkan sikap nasionalisme di masyarakat dan menguatnya keinginan untuk merevisi konstitusi 1947, agar Jepang segera menjadi negara normal. Terdapat dua alasan bagi Jepang untuk menjadi negara yang normal: pertama, berkaitan dengan perubahan struktur internasional pasca Perang Dingin, dan kedua adalah motivasi akibat masalah-masalah domestik di Jepang. Perubahan kebijakan pertahanan Jepang terdapat dalam NDPO yang dikeluarkan pada November 1995 sebagai dasar kebijakan pertahanan Jepang pasca Perang Dingin.

Pada NDPO 1995 yang diterapkan pada 1996, memasukan peran keamanan Jepang di kawasan pasca Perang Dingin, yang mengedepankan untuk menghadapi ancaman seperti situasi darurat di wilayah sekitar Jepang. Situasi darurat yang dimaksud adalah bila terjadi agresi militer, baik terhadap Jepang ataupun wilayah lain di luar Jepang yang dapat mengganggu stabilitas kawasan. NDPO 1976 hanya terfokus pada kerjasama keamanan Jepang dan AS dalam menghadapi serangan terhadap Jepang semata. Sementara NDPO 1996, menegaskan bahwa jika terjadi situasi darurat seperti konflik militer di kawasan Asia Timur walau tidak menimpa Jepang secara langsung, maka Jepang dengan bantuan AS akan turut berupaya menghadapi situasi darurat tersebut.

Situasi keamanan di Asia Timur setelah penyusunan NDPO 1996 ternyata semakin mengalami perkembangan. Potensi ancaman berupa proliferasi nuklir, senjata pemusnah massal dan perkembangan militer di kawasan semakin meningkat. Salah satunya adalah RRC, negara yang berada satu kawasan dengan Jepang yang melakukan peningkatan kemampuan militernya²⁷.

Adanya keinginan Jepang untuk mengamandemen Konstitusi 1947 khususnya pasal 9 tak lepas dari adanya persepsi ancaman yang dirasakan Jepang dalam dinamika hubungan internasionalnya. Persepsi itu muncul dari penilaian Jepang terhadap lingkungan eksternal yang berpotensi Sebagai ancaman bagi keamanan dan perdamaian Jepang. Amandemen pasal 9 merupakan suatu cara bagi Jepang untuk menyeimbangkan potensi ancaman yang muncul dari luar.

Pada tahun 1997, Jepang kembali mengeluarkan revisi NDPO yang pada intinya berisikan mengenai keperluan Jepang untuk mempertahankan dirinya terhadap kemungkinan ancaman keamanan di kawasan di bawah pengaturan Jepang-Amerika Serikat²⁸. Salah satu tindakan kongkrit Jepang adalah mengirim pasukan perdamaian dalam jumlah yang teratas ke Afghanistan. Pada tahun tersebut, dicapai kesepakatan yang disebut “*US-Japan Defence Guideline*” yang menetapkan “*comprehensive planning mechanism*” yang lebih menekankan kerja sama bilateral yang bukan hanya terfokus pada pertahanan wilayah Jepang saja, tetapi juga untuk mengantisipasi gangguan keamanan regional. Postur keamanan yang dikembangkan adalah kemampuan menghadapi agresi langsung maupun tidak langsung atau situasi yang mirip hal tersebut, kemampuan menanggulangi bencana besar yang terjadi di dalam wilayah Jepang, ikut berpartisipasi dalam kerja sama internasional, kemampuan intelejen serta komando dan komunikasi yang terkoordinasi dengan baik, kemampuan meningkatkan kualitas personil dengan melaksanakan pendidikan dan pelatihan. Sementara itu, prinsip dasar

²⁷ Michael D. Swaine and Alastair Iain Johnston, China and Arms Control Institution, dalam Elizabeth Economy and Michel Oksenberg (ed.), *China Joins the World : Progress and Prospects*, (New York : Council on Foreign Relations Press, 1999), hal 93-94.

²⁸ *Ibid.* hal 93-94

yang mempengaruhi orientasi kebijakan pertahanan dan pengembangan kekuatan militer Jepang, bertitik tolak dari penafsiran pasal 9 Konstitusi 1947 Jepang, yang membatasi wewenang SDF yang hanya memiliki kekuatan minimum untuk keperluan mempertahankan diri saja, yang akibatnya menjadikan keamanan dan survival Jepang sangatlah tergantung dari jaminan keamanan AS, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam *US-Japan Mutual Security Treaty* (MST). Kebijakan ini untuk selanjutnya merupakan identitas politik Jepang menghadapi perkembangan regional maupun global.

Pada 10 Desember 2004 kabinet Jepang mengeluarkan *National Defense Program Guide* (NDPG), sebagai kebijakan baru pertahanan Jepang yang mulai diterapkan pada tahun 2005. Perhatian mengenai peningkatan potensi ancaman di kawasan tercantum dalam NDPG 2005. NDPG 2005 secara resmi meletakkan teori ancaman militer RRC ke dalam kebijakan keamanan pemerintah Jepang yang belum pernah ada sebelumnya di NDPO Jepang. Rencana pertahanan Jepang 2005-2009 untuk pertama kalinya menyebut RRC sebagai masalah keamanan bagi Jepang.²⁹

Konsep doktrin dan strategi SDF adalah penangkalan dan mobilisasi, artinya Jepang harus cukup kuat untuk menangkal serangan-serangan terbatas sebelum bantuan militer AS datang. Dalam NDPO menyebutkan masa ancaman datang yang mungkin dihadapi Jepang adalah pertama, agresi tidak langsung kedua, serangan dadakan, serta agresi terbatas dan agresi skala rendah³⁰.

Dasar-dasar kebijakan keamanan Jepang adalah³¹

1. Kebijakan pertahanan yang bersifat eksklusif, yaitu Jepang tidak akan menggunakan kekuatannya kecuali terdapat ancaman nyata

²⁹ Richard P. Cronin et.al., *Japan-U.S. Relations : Issues for Congress*, diakses dari <http://fpc.state.gov/documents/organization/46431.pdf>, pada tanggal 26 Maret 2011.

³⁰ Kuang Shang, *The Expansion of Japan's Armed Forces and Japanese Relations, Politics of Economic Cooperation in the Asia-Pacific Region*, ed. Kung Shang Liao (Hong Kong : The Chinese University of Hong Kong, 1993), hal 82.

³¹ *Ibid.* hal 83

terhadap keamanan dalam negeri Jepang dan menggunakan kekuatan militernya dijaga pada tingkat yang minimum bagi pertahanan diri. Hal ini sesuai dengan strategi pertahanan pasif yang terdapat dalam konstitusinya. Oleh karena itu, Jepang tidak diperbolehkan mempunyai kekuatan militer yang mampu menyerang negara lain, sehingga sebagai contoh bahwa *Self Defense Forces* tidak diperbolehkan mempunyai *inter-Continental Ballistic Missile (ICBM)*, *long range strategic bomber*.

2. Jepang tidak akan menjadi negara militer kuat, dalam arti bahwa kekuatan militer Jepang tidak akan mengancam negara lain.
3. Jepang akan mematuhi tiga prinsip non-nuklir, yaitu: tidak mempunyai senjata nuklir, tidak mempengaruhi persenjataan nuklir, tidak memproduksi persenjataan nuklir dan tidak memperbolehkan persenjataan nuklir di Jepang.
4. kekuatan militer Jepang tetap berada dibawah kekuasaan sipil sebagai ciri dari Negara demokrasi. Operasi pertahanan SDF tetap memerlukan persetujuan dari legislative.

Pembuatan kerangkadasar dari kebijakan pertahanan dilihat dari berbagai aspek. Jepang selalu melihat dari 3 faktor penting yaitu konstitusi Jepang, perjanjian keamanan dengan AS, serta piagam PBB. Ketiga faktor ini menjadi acuan penting dalam kebijakan pertahanan Jepang. Nantinya ketiga faktor ini menjadi dasar kebijakan pertahanan Jepang.

Kebijakan pertahanan Jepang sangat dipengaruhi oleh kerjasama pertahanan yang dilakukan dengan AS. Keadaan Jepang yang sangat rentan terhadap berbagai bentuk ancaman, dimana mereka tidak mempunyai sistem pertahanan yang kuat. Oleh karena itu, Perdana Menteri Juchiro Koizumi menginginkan adanya perubahan terhadap orientasi pertahanan Jepang yang selama ini hanya bersifat defensif. Dalam pidato kenegaraan pada bulan April 2001, Koizumi menyatakan bahwa revisi orientasi pertahanan Jepang tidak akan mengubah

konstitusi pasal 9 yang selama ini sudah berjalan dengan baik³². Pada tahun 2001, Jepang membentuk Defence Posture Review Board di dalam JDA yang melakukan rangkaian diskusi untuk mengubah kapabilitas pertahanan Jepang. Pada Defense White Paper Jepang pada tahun 2001 dilaporkan bahwa adanya peningkatan pesat dari kesiapan militer RRC dalam kualitas dan kuantitas kekuatan angkatan darat, laut dan udara. Itulah yang menjadi titik dimana Jepang menyatakan secara resmi perhatian terhadap peningkatan kemampuan militer RRC.

Pada akhir tahun 2005, pemerintah Jepang merinci penggunaan anggaran pertahanan militernya untuk Angkatan Udara Jepang yang akan dipakai untuk membeli sejumlah peralatan militer.

Pada tanggal 9 Januari 2007 terjadi perubahan pada Badan Pertahanan Jepang (*Japan Defense Agency-JDA*) menjadi Departemen Pertahanan Jepang (*Departemen of Defense-DoD*) melalui keputusan kabinet PM Shinzo Abe. Lebih dari satu dasawarsa lalu Jepang telah melakukan perubahan Penting dalam strategi raya, kebijakan pertahanan serta doktrin militer dan kapabilitas militernya.³³

Pada tahun yang sama, bertepatan dengan perayaan 60 tahun konstitusi Jepang, Perdana Menteri Shinzo Abe berkeinginan untuk mengamandemen konstitusi. Amandemen tersebut terkait dengan pasal 9 dari konstitusi Jepang yang melarang Jepang untuk memiliki kekuatan militer dan mengharuskan Jepang untuk menjalankan kebijakan Pasifisme. Perkembangan berikutnya, pada masa PM Yasuo Fukuda masalah amandemen pasal 9 menjadi isu penting bagi Jepang untuk menunjukkan komitmennya terhadap penciptaan kondisi damai dan aman tidak hanya bagi Jepang tetapi juga internasional.

³² East Asian Strategic Review 2002

³³ Christopher W. Hughes, *Japanese Military Modernization: In Search of a Normal Security Role*, dalam *Re-Orientasi Visi Pertahanan Jepang dan Pengaruh Bagi Stabilitas Keamanan di Kawasan Asia Timur*. (Kelompok Ahli Badan Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan Departemen Luar Negeri, Bandung, 2007), hal 44.

Anggaran pertahanan militer Jepang digunakan militer Jepang untuk mendapatkan rudal patriot tipe PAC-3 dan rudal pencegat SM-3 dari AS. Rudal-rudal tersebut akan digunakan oleh militer Jepang dalam menghadapi kemungkinan serangan rudal dari luar, khususnya RRC. Disamping membeli rudal, anggaran pertahanan militer Jepang juga digunakan untuk membeli helikopter, *mine-sweeper* dan kapal selam dengan total harga 182 juta yen. Jepang juga membeli 6 pesawat jet tempur tipe F-2 sebesar 76 juta yen, 11 tank dan 20 helikopter seharga 8,9 juta yen.³⁴

2.2.3 Mid-Term Defence Programme (MTDP)

Pada tanggal 10 Desember 2004, Jepang meluncurkan sebuah Program Rencana Pertahanan baru yang merupakan sebuah loncatan dari sistem pertahanan yang sekedar membela diri hingga siap membela diri dengan rudal. Pada dasarnya perubahan kebijakan pertahanan Jepang tersebut bukanlah berita yang mengejutkan karena sejak Desember tahun 2000 Jepang telah mengadopsi MTDP (the Mid-Term Defense Programme) untuk tahun fiskal 2001-2005 yang secara substansial telah merubah secara titik balik pertahanan dan keamanan Jepang.

MTDP merupakan bentuk kesepakatan Jepang-AS untuk menentukan besarnya anggaran militer Jepang untuk tahun 2001-2005. Beberapa poin penting yang dapat dicatat sebagai bentuk perubahan kebijakan pasifis menjadi lebih bersifat ofensif adalah adanya ketentuan bahwa kekuatan SDF (the Self-defense Force) Jepang dikurangi hingga sebanyak 166.000 personil. Padahal realisasi kekuatan SDF pada tahun 2000 baru sebesar 286.000 personil militer. Direncanakan sampai tahun 2000 semestinya sebesar 350.000 personil.

Perubahan kekuatan militer Jepang itu baru terjadi untuk pertama kalinya semenjak *The Treaty Of Mutual Cooperation an Security between Japan and The United States of America* pada tahun 1951. Sejak perjanjian tersebut sampai

³⁴ *Ibid.* hal 45

Nixon-Tanaka Communique pada tahun 1973 kekuatan militer Jepang selalu mengalami inklinasi dari 75.000 pada tahun 1951, meningkat 117.177 pada tahun 1953, meningkat lagi menjadi 156.000 pada tahun 1955, 206.001 tahun 1960, dan menjadi 286.000 pada tahun 2000.

Fakta yang menarik adalah, di balik deklinasi kekuatan personil militer tersebut berdasarkan MTDP 2001-2005 itu, Jepang memusatkan peningkatan kapabilitas militernya pada, pertama pengembangan kemampuan untuk counter cyber-attack dan mengamankan information technology serta jaringan komunikasi internasional. Kedua, mengembangkan *counter attack by irregular forces, possibly armed with nuclear, biological or chemical devices*. Dana yang diterima kabinet Jepang untuk pelaksanaan MTDP sejak 5 desember 2000 sampai 2005 adalah 25 triliun Yen (kira-kira US\$203 milyar). Jadi secara personil militer terjadi penurunan atau deklinasi pada posture kekuatan pertahanan Jepang, namun dari segi persenjataan dan peralatan pertahanan dan keamanan Jepang mengalami modernisasi yang sangat signifikan.

Modernisasi tersebut mencakup lima area *Ground, Maritime, Air Defense, IT network, Research and Development*. Di dalam program tersebut disebutkan tentang kerjasama *research and development* dengan AS dalam hal pengembangan *theater missile defense, Fixed wing maritime patrol/ ASW P-3C* dan *C-1 transport replacements*; pembangunan *defense information infrasructure (triservice computer integration program, dan Common operating environment*. Modernisasi ini akan menyebabkan Jepang memiliki kekuatan misil yang canggih serta akan sangat unggul dalam peningkatan kinerja persenjataan dan peralatan militer.

Modernisasi kekuatan pertahanan dan keamanan tersebut akan memberikan dua keuntungan bagi Jepang yaitu pertama, keuntungan jangka pendek yaitu terjadinya peningkatan efektifitas militer. Dalam jangka waktu lima tahun senjata-senjata dan peralatan militer tercanggih sudah dapat dimiliki Jepang. Hal itu tentu lebih efektif jika dibandingkan dengan kekuatan yang akan dimilikinya dengan merekrut puluhan atau ratusan ribu personil tentara, mengingat saat ini

kekuatan militer lebih berorientasi pada kecanggihan persenjataan dan peralatan. Efektifitas itu juga terkait dengan sikap penolakan masyarakat Jepang terhadap keberadaan SDF. Bahkan sampai saat ini anggota SDF dianggap sebagai orang buangan “outcasts of society”. Maka jika Jepang terus memperbesar jumlah personil militernya akan terjadi pergolakan politik di dalam negeri yaitu penentangan dari para pendukung partai kiri seperti JCP (*Japan Communist Party*) dan JSP (*Japan Socialist Party*).

Selain itu, jika dikalkulasi berdasarkan perimbangan kekuatan personil militer dengan negara-negara di kawasan Asia Timur, personil militer Jepang sangat kecil, namun Jepang tetap *secure enough*, sebab terdapat pasukan AS yang memiliki pangkalan militer di wilayah-wilayah Jepang ditambah dengan pasukan AS di Korea Selatan dan di Pasifik Barat (*Seventh Fleet*), yang selalu siap melindungi keamanan nasional Jepang. Keuntungan kedua yaitu keuntungan jangka panjang di mana modernisasi itu merupakan sebuah langkah besar Jepang untuk mencapai suatu independensi keamanan regionalnya. Seperti diketahui bahwa selama ini keamanan regional Jepang masih sangat tergantung kepada AS, selain karena alasan terikat pada aliansi keamanan, juga karena alasan persenjataan dan peralatan militer yang tidak mencukupi untuk melakukan pengawasan atau patroli jarak jauh.

Dengan modernisasi tersebut maka Jepang akan mampu mengamankan kawasannya sejauh mungkin tanpa tergantung lagi pada AS. Misalnya dengan New mid-refuelling tankers jarak jangkauan fighter aircraft Jepang akan bertambah hingga mencapai seluruh Asia Timur. Kemampuan untuk counter cyber attack dengan pengembangan defense information infrastructure akan memberikan kemampuan bagi Jepang untuk mengacaukan sistem komunikasi lawan.

Aliansi keamanan antara Jepang dengan Amerika Serikat pada awalnya dibentuk untuk menghadapi ancaman Uni Soviet pada masa Perang Dingin. Disamping itu, aliansi keamanan ini juga dibentuk untuk membatasi kekuatan militer Jepang hingga Jepang tidak bertindak sendiri untuk melindungi kepentingannya di kawasan tersebut.

Setelah perang dingin berakhir, kehadiran pasukan Amerika Serikat di Jepang ini perlu ditinjau kembali. Di dalam negeri Jepang sendiri mulai timbul suara menentang kehadiran militer Amerika Serikat di Okinawa tersebut disebabkan oleh adanya insiden pemerkosaan terhadap seorang siswi SD Jepang oleh 3 tentara Amerika Serikat di Okinawa. Rakyat Okinawa menolak penempatan sebagian besar pangkalan militer Amerika Serikat di kepulauan mereka, akan tetapi mereka tidak menolak kehadiran pasukan Amerika Serikat di Jepang. Tujuan protes rakyat Okinawa adalah memindahkan pangkalan militer tersebut dari wilayah mereka, bukan menghapuskan sama sekali payung pelindung dari Amerika Serikat. Namun demikian, berdasarkan hasil survey Asahi Shibun bersama Okinawa Times pada bulan Oktober 1995, 64% rakyat Jepang tetap ingin mempertahankan perjanjian kerjasama keamanan dengan Amerika Serikat ini. Bahkan pada pertengahan April 1996 presiden Clinton dan perdana Menteri Hashimoto sepakat menandatangani deklarasi aliansi keamanan untuk menghadapi abad ke 21 yang merupakan perjanjian untuk semakin memantapkan kehadiran Amerika Serikat di kawasan Asia dan Pasifik. Deklarasi tersebut antara lain menyebutkan bahwa kawasan Asia dan Pasifik selalu menghadapi kemungkinan timbulnya konflik regional dan hubungan bilateral Jepang_amerika Serikat yang didasarkan pada perjanjian kerjasama dan keamanan dasar untuk mempertahankan stabilitas dan keamanan di kawasan tersebut.

Deklarasi yang sebetulnya merupakan pembaharuan aliansi keamanan yang telah terjalin sebelumnya dengan Amerika Serikat ini justru memberikan pekerjaan rumah yang tidak mudah diselesaikan bagi Jepang. Pertama, karena dalam deklarasi tersebut, wilayah yang disebutkan adalah Asia dan Pasifik dengan demikian kawasan ini lebih luas dari pada wilayah yang disebut dalam aliansi sebelumnya yaitu Asia Timur. Kedua, deklarasi tersebut menuntut dukungan yang lebih aktif dari Jepang kepada Pasukan Amerika Serikat pada saat timbul keadaan darurat di kawasan Asia dan Pasifik yang mengindikasikan adanya peningkatan kekuatan militer Jepang di kawasan tersebut. Peningkatan kekuatan militer Jepang dianggap oleh China sebagai ancaman keamanan nasionalnya karena latar belakang militer Jepang yang sangat kuat. Tetapi demikian, Jepang tetap

mempertahankan prinsipnya bahwa kekuatan militer Jepang hanya bersifat defensive walaupun peranannya ditambah.

Faktor perubahan yang mendorong Amerika Serikat dan Jepang untuk meningkatkan peranan aliansi militer mereka adalah karena sejak berakhirnya perang dingin, situasi dikawasan Asia dan Pasifik menjadi tidak menentu, teluk Taiwan sempat panas, belum lama ini hubungan China-Filipina menjadi tegang akibat saling klain di kepulauan Spratly. Hampir semua Negara di kawasan Asia Timur terlibat konflik wilayah.

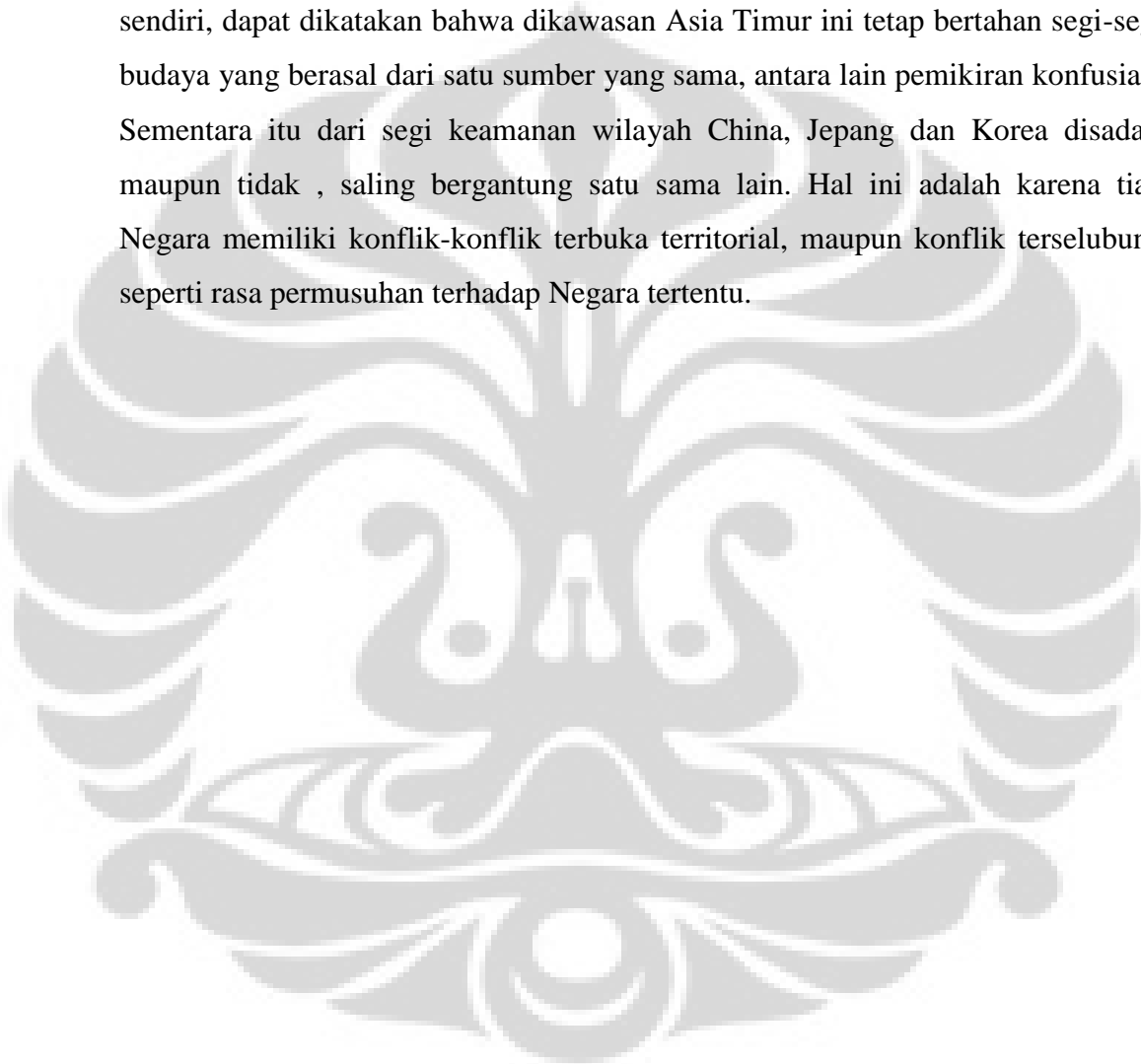
Lebih dari itu, pangkajian aliansi militer Jepang-Amerika Serikat ini juga bertujuan untuk menangkal “ancaman China” yang membangun arsenal militernya secara besar-besarnya beberapa tahun terakhir ini sehingga menimbulkan kekhawatiran di kawasan Asia dan Pasifik³⁵.

Setelah melihat konflik-konflik yang ada di kawasan Asia Timur, pola-pola hubungan antarnegara dan peranan Amerika Serikat di kawasan tersebut, maka tampak bahwa situasi keamanan di Asia Timur sangat kompleks. Situasi ini adalah situasi yang disebut sebagai kompleks keamanan (*security complex*)³⁶ Negara-negara yang berada dalam suatu kompleks keamanan ini saling tergantung oleh karena faktor sejarah dan geopolitik. Artinya, diantara Negara-negara dengan latar belakang sejarah yang berhubungan, letaknya saling berdekatan secara geografis, serta memiliki kepentingan politik satu sama lain, akan terbentuk kompleks keamanan. Terbentuknya kompleks keamanan ini tidak perlu harus dikehendaki atau didasari oleh Negara-negara yang bersangkutan. Dengan demikian, meskipun diantara Negara-negara Asia timur pola hubungan berdimensi permusuhan lebih dominan, tidak berarti Negara-negara ini sama sekali tidak memiliki kepentingan keamanan dikawasan ini. Negara-negara dikawasan Asia timur secara disadari maupun tidak dibentuk satu kompleks keamanan.

³⁵ Kompas, 6 Januari 2007, www.kompas.com, diunduh pada tanggal 30 Juni 2011.

³⁶ Barry Buzan, *People State and Fear 2nd Ed: an Agenda for International Security Studies in The Post Cold War Era*, (New York: Harvester Wheatsheaf, 1991) hal 190.

Berbeda dengan kawasan eropa yang memiliki kerja sama keamanan terstruktur, kawasan Asia Timur merupakan satu kompleks keamanan tanpa kerja sama keamanan yang terstruktur. Dilihat dari latar belakang sejarah, Negara-negara yang menjadi aktor penting di kawasan ini, yaitu China, Jepang dan Korea telah saling menjalani hubungan jauh sebelum memasuki Abad ke 20. Meskipun kini masing-masing Negara memiliki dan mengembangkan budaya khasnya sendiri, dapat dikatakan bahwa dikawasan Asia Timur ini tetap bertahan segi-segi budaya yang berasal dari satu sumber yang sama, antara lain pemikiran konfusian. Sementara itu dari segi keamanan wilayah China, Jepang dan Korea disadari maupun tidak , saling bergantung satu sama lain. Hal ini adalah karena tiap Negara memiliki konflik-konflik terbuka territorial, maupun konflik terselubung seperti rasa permusuhan terhadap Negara tertentu.



BAB III

MODERNISASI MILITER CHINA

3.1 Latar Belakang Sejarah China

China pada masa lalu merupakan salah satu negeri yang mempunyai sejarah peradaban dan budaya paling maju dan tua di dunia. Hingga saat ini telah menapak perjalanan sejarah yang panjang dengan rentang waktu mencapai hampir 4.000 tahun³⁷. Dalam perjalanan masa yang panjang itu, negara tersebut mengalami berbagai peristiwa dan sejarah penting, di antaranya pernah mengalami masa kekuasaan kerajaan-kerajaan yang dipenuhi sejarah peperangan, kemudian berhasil dipersatukan tetapi kemudian terpecah kembali. China yang terpecah-pecah kemudian berhasil dipersatukan kembali.

China modern (setelah berbentuk republik) juga pernah mengalami sejarah penjajahan bangsa asing, sehingga China dipenuhi pergulatan internal. Baru pada penghujung abad ke-20 China mulai memperlihatkan masa yang penuh harapan, dengan kemajuan ekonomi yang menjanjikan.

Dalam bidang militer, negara ini pun mengalami sejarah yang panjang. Di bawah pimpinan Partai Komunis, China berhasil memenangkan beberapa peperangan penting, di antaranya:

- 1) *Northern Expeditionary War* yang berlangsung dari 1924 hingga 1927;
- 2) ‘Perang Revolusi Agraria’ yang dikenal juga dengan ‘Perang Sipil Sepuluh Tahun’ yang berlangsung dari 1927 hingga 1937;
- 3) Perang melawan penjajah Jepang pada 1937 hingga 1945;

³⁷ History of the People’s Republic of China, [“http://en.wikipedia.org/wiki/History_of_the_people's_Republic_of_China](http://en.wikipedia.org/wiki/History_of_the_people's_Republic_of_China)

- 4) Perang Pembebasan pada 1945 sampai 1949, terjadi tidak lama setelah perang melawan Jepang. Partai Komunis China yang semula berkerja sama dengan Partai Nasional atau Kuomintang terlibat dalam perang sipil ini. Perang ini dimenangkan oleh Partai Komunis China di bawah pimpinan Mao Zedong, sehingga Partai Nasional atau Kuomintang pimpinan Chiang Kai Shek menyingkir ke Taiwan.
- 5) Puncaknya, pada 1 Oktober 1949 dalam suatu upacara besar di lapangan Tiananmen, Mao Zedong sebagai pemimpin Pemerintahan Rakyat Pusat memproklamasikan berdirinya Republik Rakyat China³⁸.

3.1.1 Sejarah Pembentukan Tentara Pembebasan Rakyat

Sejarah kemiliteran China sama tuanya dengan sejarah negeri China sendiri dan oleh karenanya pikiran-pikiran tradisional banyak mempengaruhi sikap dan pikiran-pikiran dasar kemiliteran sampai kini. Dalam masyarakat tradisional China, tentara selalu dipandang sebagai kelas yang terendah dalam jenjang tangga kedudukan social, tentara diperlukan untuk menghadapi bahaya, akan tetapi segera harus dikembalikan pada kedudukannya yang rendah begitu bahaya berlalu.

Dalam sejarah China yang penuh dengan pertentangan dan perjuangan untuk merebut kekuasaan, kaisar atau suatu dinasti jatuh dan diganti dengan orang kuat lainnya berkat dukungan tentara. Namun begitu seseorang berhasil menduduki kekuasaan para panglima yang setia selalu segera disingkirkan, khawatir kalau-kalau salah seorang panglima akan menjadi terlalu populer dan mendongkelnya dari tahta itu. Maka tradisi China menempatkan tentara di bawah pimpinan politik, sebagaimana dictum Mao Tse Tung yang terkenal, bahwa “kekuasaan politik tumbuh dari laras bedil tetapi bedil itu sendiri harus sepenuhnya terkendali oleh Partai”. Pendapat demikian tidaklah berbeda bahkan paralel dengan pendapat

³⁸ Timothy Cheek, *Mao Zedong and China's Revolutinons*, (New York: Bedford/St. Martin's, 2002), hal. 6-8. Lihat juga Diana Lary, *China's Republic*, New York; Cambridge University Press, 2007, hal. 151-177.

politik umumnya di dunia, namun bagi RRC dictum itu merupakan persoalan besar di dalam kehidupan politik di RRC. Manifestasi dari persoalan itu nampak dalam krisis-krisis kepemimpinan nasional dan partai, dimana pihak-pihak yang beraspirasi untuk menjadi ketua partai saling berebut pengaruh di Tentara Pembebasan Rakyat (TPR). Di lain pihak keadaan demikian memungkinkan tokoh-tokoh pimpinan dalam TPR untuk ikut memainkan peranan politik yang banyak kali menentukan, berhubung TPR cenderung untuk terlibat di dalam masalah-masalah politik, apalagi karena sebagian besar pimpinan TPR berasal dari pejuang-pejuang bermotif politik.

Mao selalu berusaha memelihara sifat kerakyatan TPR. Profesionalisme dikalangan TPR ditentang karena dipandang sebagai suatu yang akhirnya akan menjauhkan TPR dari rakyat. Maka di dalam TPR pun Mao berusaha memelihara berlakunya prinsip-prinsip kesamarataan (egalitarian principles), mencegah timbulnya elite baru di dalam masyarakat komunis yang ia cita-citakan. Bagi Mao Tse Tung yang berhasil memenangkan revolusi komunis dengan memanfaatkan kekuatan pokok juga dalam pertahanan. Maka sebagaimana nanti dapat terbaca dalam uraian selanjutnya pertahanan RRC disusun “in depth” (mementingkan ke dalam di dalam pertahanan). Dilema politik diatas ia coba selesaikan dengan anjuran agar setiap orang supaya tidak saja menjadi “ahli” (expert) dalam bidang pekerjaan masing-masing, akan tetapi juga harus menghayati ideology komunis (red). Maka “red and expert” merupakan slogan yang penting di jaman Mao.

Selain dilema diatas, RRC juga menghadapi dilemma teknis kemiliteran. Luas wilayah RRC dan jumlah rakyatnya yang begitu besar, memungkinkan Mao dan kawan-kawan seperjuangannya untuk mengetrapkan salah satu prinsip strategis yaitu “mengorbankan ruang untuk memperoleh waktu” (trading space for time) dalam perang gerilya yang sangat mobil. Dengan perkembangan teknologi persenjataan seperti dewasa ini, modernisasi TPR menghadapi kenyataan bahwa belum tentu prinsip strategi diatas dapat dilakukan lagi. Pembangunan TPR menghadapi dilemma didasarkan atas prinsip kualitas atautkah atas prinsip kuantitas. Meskipun Mao lebih cenderung pada prinsip kuantitas, mengingat

keyakinannya akan kekuatan masa rakyat, tidak kurang gigihnya Mao mengembangkan juga kemampuan nuclear TPR, pertama-tama sebagai sebagai kekuatan “deterrent” disamping nilainya sebagai kebanggaan nasional dan “status symbol” bagi RRC. Modernisasi sekarang sedang dijalankan rupanya akan lebih mementingkan prinsip kuantitas, terbukti dari usaha RRC untuk membeli perlengkapan yang up-to-date bagi angkatan bersenjatanya.

Sejarah kemiliteran China menunjukkan pada suatu sikap mental yang perlu diperhatikan yaitu filsafat perang yang kurang mementingkan perebutan wilayah tetapi yang lebih mengutamakan perebutan mental (mind) lawannya. Dua kali China pernah terjajah, Mongol dan Manchu tetapi setiap kali justru penjajah yang akhirnya menjadi China dalam jiwa dan kebudayaannya. Bagi China perang dan damai adalah dua senjata yang saling mendukung (tercapainya tujuan-tujuan nasional) dan karena orang punya dua tangan kedua senjata dapat dipakai bersama-sama, untuk memperoleh effect psikologis yang dikehendaki. Maka tidak mengherankan bahwa bangsa-bangsa yang mengambil alih kebudayaan China melakukan bersamaan perang dan berunding seperti Vietnam dalam menghadapi Amerika sewaktu perang Vietnam yang lalu.

Kebudayaan China menghasilkan juga ahli-ahli pemikir kemiliteran bahkan Sun Tzu (400 SM) oleh dunia diakui sebagai guru utama dalam strategi. Tulisan-tulisan Sun Tzu ini menganggap peperangan sebagai hal yang tidak menguntungkan, merusak dan jahat. namun para filosof ini mengakui kenyataan bahwa peperangan/perjuangan merupakan bagian yang integrasi di dalam kehidupan manusia. Maka setiap orang dianjurkan agar dalam perjuangan hidupnya pandai menyesuaikan dirinya, sebagaimana “air mengalir sesuai dengan keadaan tanah”.

Akal menempati tempat diatas kekuatan Sun Tzu menyatakan bahwa strategi yang benar adalah menghindari pertempuran. Jaya dalam seratus pertempuran bukanlah ukuran keterampilan tetapi memang tanpa pertempuran adalah keterampilan yang harus dipuji (the acme of skill). Maka sangatlah bijaksana bila

musuh dapat ditundukkan tanpa banyak menimbulkan kerusakan pada negerinya. Lakukan subversi, rongrongan, hancurkan semangatnya, rusak ekonominya, pecah belah rakyatnya maka tentara musuh akan menyerah padamu, kata Sun Tzu. Semua peperangan berdasarkan tipu muslihat, maka tujuan sebenarnya dari peperangan harus disembunyikan. Kalau kuat, berlagalah seperti lemah, kalau dekat dengan kedudukan musuh usahakanlah agar musuh mengira pasukan masih jauh dan serang musuh sewaktu musuh tidak bersiap-siap. Ajaran-ajaran seperti ini menggambarkan konsep strategi dan taktis bangsa China yang sangat mempengaruhi Mao Tse Tung dalam mengembangkan perang gerilya terhadap Jepang dan Kuo Min Tang. Besar wilayah dan jumlah rakyat China memungkinkan pelaksanaan konsep-konsep strategis dan taktiks diatas, suatu menifestasi dari inti ajaran Taoisme bahwa “yang lembut dan kenyal akhirnya mengalahkan yang keras dan kaku”.

Sikap dasar bangsa China sepanjang sejarahnya adalah defensif, terpengaruh oleh pengalaman bangsa itu selama ribuan tahun bahwa ancaman terhadap kesejahteraan bangsanya datang dari Utara. Sikap itu tampak dari Tembok Besar diperbatasan untuk mencegah serbuan bangsa-bangsa yang “biadab” dari sebelah Utara. Namun Tembok Besar tidak mampu mencegah penyerbuan dan penjajahan bangsa Mongol dan Manchu selama ratusan tahun. Bangsa China menamakan negerinya sebagai “Kerajaan Tengah” (Tiongkok) timbul dari keyakinannya bahwa kebudayaannya dan peradabannya adalah yang tertinggi di dunia dan menganggap dirinya sendiri berada di tengah-tengah dunia yang “biadab” atau “kurang beradab”.

Berdasarkan atas pandangan tersebut, dunia dalam pandangan klasiknya dibagi dalam empat lingkaran konsentris :

- Lingkaran dalam adalah wilayah China termasuk Tibet dan Mongolia.
- Lingkaran kedua terdiri dari Negara-negara sekitarnya dipinggiran lingkaran dalam yang dianggap sebagai daerah “tributaries” mereka termasuk Korea dan Vietnam .
- Lingkaran ketiga adalah Jepang.
- Lingkaran keempat adalah sisa dunia.

Pandangan klasik ini sampai kini masih mempengaruhi persepsi RRC mengenai keamanan nasionalnya, terbukti dari sikap RRC terhadap masalah-masalah perbatasan, masalah Mongolia dan Manchuria, masalah Korea dan Vietnam. Jepang sebagai lingkaran ketiga dipandang sebagai factor yang dapat mengancam kelestarian bangsa China.

3.1.2 Periode Melawan Jepang dan KMT

Sebagaimana diketahui penumbangan Dinasti Manchu oleh revolusi China di bawah Dr. Sun Yat-sen berhasil membebaskan diri dari penjajahan Manchu tetapi tidak berhasil melepaskan diri dari pengaruh kaum kolonialis Barat dan Jepang. Bahkan Jepang masih bercokol di Korea, Manchuria dan Shanghai. Revolusi yang tidak didukung sepenuhnya oleh rakyat China ternyata justru menimbulkan perpecahan diantara kekuatan-kekuatan social. Keadaan tersebut dimanfaatkan oleh kaum komunis dunia untuk mendirikan Partai Komunis China pada tahun 1921 yang tadinya mengikuti model Rusia didasarkan atas kekuatan buruh tetapi setelah Mo Tze-tung pegang pimpinan lalu didasarkan atas kekuatan massa petani.

Baru pada 1 Agustus 1927 berhasil mendirikan Tentara Merah sebagai manifestasi dari pendirian Mao bahwa “kekuatan politik tumbuh dari laras bedil”. Kelahiran itu terjadi di Kota Nanchang di bawah pimpinan Chu The. Pada mulanya TPR terdiri dari tentara 11 (Yen Ting) dan tentara ke-20 (Ho Lung) dengan sisa-sisa tentara Chu The.

Sungguhpun dari semula PKC dengan TPR-nya berdasarkan petunjuk Moskow harus bekerjasama dengan KMT, PKC selalu berusaha untuk merongrong dan memanfaatkan KMT untuk kepentingan politik sendiri. Dalam hal ini nampak bahwa usaha mereka adalah untuk merebut rakyat ke pihaknya, maka TPR selalu diusahakan agar berintegrasi dengan rakyat (manunggal ikan

dalam air). Usaha merebut hati rakyat itu antara lain terwujud dalam instruksi kepada semua prajurit mereka untuk :

- Selalu taat dan mengerjakan semua perintah.
- Tidak mengambil apapun dari rakyat jelata.
- Agar semua barang rampasan/hasil perang dikumpulkan untuk dipakai bagi semua pasukan.

Disamping itu TPR juga aktif dalam program politik partai, antara lain dalam :

- Membagi-bagi tanah yang diambil dari tuan-tuan tanah.
- Pendidikan kaum petani.
- Pembentukan pemerintah local (bayangan)
- Pendidikan kader-kader komunis.

Setelah Chiang Kai-shek menggantikan kedudukan Dr. Sun Yat-sen, sikap antikomunismenya makin menonjol. Meskipun menghadapi musuh bersama (Jepang), Chiang Kai-shek menilai kaum komunis sebagai “kanker” yang dapat mematikan bangsa China sedangkan Jepang disamakan dengan “penyakit kulit” dan begitu kanker di tubuh bangsa China dapat dihapuskan, penyakit kulit itu mudah dibasmi. Namun secara resmi kerjasama dengan komunis tetap dipelihara walaupun kedua belah pihak dalam setiap kesempatan berusaha menghancurkan yang lain. Dalam periode itu tumbuh strategis dan taktik perang gerilya yang dikembangkan oleh Mao dan TPR dari filsafat dan teori perang Sun Tze.

Kemanunggalan dengan rakyat tetap menjadi pedoman pokok meskipun TPR pada tahun 1937 resmi diakui sebagai tentara nasional dan dikenal sebagai “8 th Route Army”, yang terdiri dari Divisi 115 (Lin Piao), Divisi 120 (Ho Lung) dan Divisi 129 (Lin Pocheng). Mao mengeluarkan 8 perintah pokok kepada TPR :

- Berlaku sopan santun terhadap rakyat.
- Jujur dalam melakukan pembelian-pembelian.
- Kembali semua barang pinjaman.
- Bayar semua barang yang dirusakkan.
- Jangan menakuti rakyat.

- Jangan merusak tanaman rakyat.
- Jangan main-main dengan wanita.
- Perlakukan tawanan secara wajar.

Perintah ini juga merupakan pelaksanaan teori perang para filosof China kuno, dalam rangka merebut hati (*mind*) rakyat yang akhirnya menjadi sebab utama keruntuhan Chiang Kai-shek.

Pengalaman perang gerilya ini memberikan cap khusus pada TPR dan revolusi komunis China yang dimenangkannya dengan mendasarkan diri pada kekuatan kaum petani. Namun Perang Korea membuka mata TPR bahwa kekuatan massa saja di medan yang sempit dan bergunung tidak selalu memberikan keunggulan terhadap daya tembak dan daya gerak suatu tentara modern. Pengalaman itu membuat RRC merubah cara berpikir pimpinannya terutama Chu The untuk memodernisir TPR. Tetapi usaha pertama modernisasi TPR dihentikan oleh Mao karena dikhawatirkan akan menumbuhkan semangat profesionalisme dan akhirnya akan timbul elit baru yang akan menjauhkan TPR dari rakyat China.

3.1.3 Karakteristik Peran TPR Dalam Politik RRC

Setelah berdirinya RRC, TPR memainkan peran penting dalam masalah domestic yaitu dengan memberikan dukungan penuh kepada PKC untuk mempersatukan dan memerintahkan negara yang baru berdiri tersebut. Hubungan partai-militer berkembang semakin erat sehingga sampai saat ini militer China masih menjadi kekuatan utama dalam politik di China.

Keeratan hubungan partai-militer membuat militer menjadi grup yang dominan dalam masyarakat dan institusi-institusi militer telah memainkan perang yang dominan dalam pembangunan politik China³⁹. Kepemimpinan partai, telah

³⁹James C.F, Wang, *Contemporary Chinese Politics : An Introduction*, (New Jersey : Prentice Hall Inc, 1992), hal 10.

banyak bergantung pada anggota partai dalam militer untuk melaksanakan tugas politik dan mengembalikan keteraturan. Partai juga telah menggunakan militer sebagai alat intimidasi dalam persaingan memperebutkan kekuasaan politik dan suksesi.

Analisa mengenai hubungan partai-militer di China pada dasarnya menggunakan 3 (tiga) pendekatan yaitu control partai, simbiosis dan profesionalisme⁴⁰. Ketiga pendekatan ini ini tidak berdiri sendiri melainkan saling melengkapi karena masingmasing menyoroti elemen hubungan partai-militer China.

Menurut Ellis Joffe, hubungan partai-militer di China ditandai oleh karakteristik yang berlawanan. Meskipun dikontrol oleh partai, militer memiliki ciri-ciri dasar profesionalisme sehingga selalu ada konflik yang permanen dan fluktuatif antara partai-militer, Pada puncak kekuasaan, terjadi hubungan simbiosis antara para pemimpin partai dan militer. Namun demikian, modernisasi angkatan bersenjata dan profesionalisme militer menimbulkan terjadinya pemisahan fungsional di tingkat yang paling rendah. Meskipun terpengaruh oleh faksionalisme dalam partai, komando dan sistem control militer tetap utuh dan persatuannya secara keseluruhan tidak terpecah.⁴¹

Dengan karakter seperti itu dapat dikatakan bahwa Militer China merupakan tentara partai yang memiliki ciri profesionalisme. TPR memang tidak bisa menjadi tentara profesional dalam pengertian Barat, yang memisahkan militer dari politik, karena kondisi perkembangannya yang berbeda dengan militer di Barat disamping adanya sifat-sifat dari rezim pemerintahan China. Disisi lain, militer China tidak tunduk begitu saja pada partai karena profesionalime para

⁴⁰David Shambaug, "China's Military in Transition : Politics, Professionalism, Procurement and Power Projection", dalam *The China Quarterly* No 146, (Juni 1996), hal. 268

⁴¹Ellis Joffe, "Party-Army Relations in China : Retrospect and Prospect", dalam *The China Quarterly* No.146, Juni 1996, hal 300.

perwiranya mendorong mereka untuk mempertanyakan kebijakan partai jika kebijakan tersebut dianggap tidak sejalan dengan pendapat mereka.

Menurut Ellis Joffe, hubungan partai-militer di China ditandai oleh 6 (enam) pola utama yaitu :

Integrasi di tingkat puncak kepemimpinan

Dekatnya integrasi para pemimpin partai-militer di tingkat teratas perumusan kebijakan merupakan faktor utama yang menyebabkan militer memiliki peran politik dan militer. Hal ini terus berlanjut meskipun struktur hirarki kekuasaan telah terbentuk setelah rezim komunis berdiri tahun 1949, sehingga perbedaan peran para pucuk pimpinan tetap tidak jelas. Dengan demikian, meskipun terdapat perbedaan fungsi, para pucuk pimpinan partai beranggapan bahwa melintasi batasan antara kedua lembaga merupakan hal yang sah dan wajar. Mereka menganggap hal tersebut bukan sebagai suatu intervensi satu lembaga atas lembaga lainnya.

Hal yang paling signifikan dari integrasi ini adalah bahwa pemimpin Negara seperti Mao Zedong dan Deng Xiaoping juga merupakan komandan tertinggi dan aktif dalam militer China. Kedudukan mereka yang khusus tersebut membuat mereka mampu menggunakan militer sebagai dasar kekuasaan mereka dalam elit politik. Baik Mao maupun Deng sama-sama menyadari bahwa mereka bias mengandalkan dukungan dari militer China pada saat kepemimpinan partai mendapat tantangan.

Integrasi di tingkat puncak kekuasaan juga memungkinkan para pemimpin militer untuk berpartisipasi dalam politik sebagai figure nasional, bukan sebagai wakil militer. Kritik Peng Dehuai terhadap kebijakan Lompatan Jauh ke depan pada tahun 1959 merupakan contoh partisipasi militer dalam politik. Selama bertahun-tahun para pemimpin militer yang menjadi anggota politburo turut berpartisipasi dalam perumusan kebijakan mengenai masalah-masalah nasional.

Pada saat yang sama, para pemimpin militer ini juga memiliki kedudukan tinggi dalam militer dan merupakan “suara” bagi kelompok militer dalam dewan

partai. Ketidakpuasan militer terhadap alokasi anggaran sejak awal reformasi sampai akhir tahun 1980-an terus disuarakan oleh pemimpin-pemimpin senior militer. Meskipun demikian, mereka tidak pernah menggunakan tentara untuk kepentingan mereka. Intervensi TPR dalam Revolusi Kebudayaan maupun dalam peristiwa Tiannamen dilakukan tanpa persetujuan pemimpin-pemimpin militer.

3.2 Kemajuan Ekonomi China

Ekonomi China dalam periode 2002-2007 menunjukkan pertumbuhan yang tinggi. Sejumlah indikatornya pernah diungkapkan Perdana Menteri (PM) China, Wen Jiabao, saat berpidato pada sesi pertama Kongres Rakyat Nasional (NPC) ke-11 di Gedung Balai Agung Rakyat, Beijing, yang meliputi:⁴²

- 1) Produk Domestik Bruto (PDB) China pada 2007 mencapai 24,66 triliun yuan atau naik 65,5 persen dibanding 2002.
- 2) Rata-rata pertumbuhan ekonomi tiap tahun mencapai 10,6 persen selama periode itu (2002-2007).
- 3) Total pendapatan pemerintah selama periode 2002-2007 mencapai 5,13 triliun yuan, naik 171 persen dibanding 2002.
- 4) Cadangan mata uang asing sebesar 1,52 triliun dollar Amerika Serikat.
- 5) Produksi biji-bijian naik dalam empat tahun berturut-turut hingga mencapai 500 miliar Kilogram selama 2007.
- 6) Volume ekspor dan impor China mencapai 2,17 triliun dolar Amerika Serikat pada 2007, dan menjadikan posisi China sebagai negara yang melakukan perdagangan terbesar di dunia dari urutan enam menjadi ke urutan tiga.
- 7) Pendapatan per-kapita masyarakat perkotaan setiap tahun naik dari 7.703 yuan pada 2002 menjadi 13.786 yuan pada 2007.
- 8) Sementara di desa, pendapatan per-kapitanya naik dari 2.476 yuan menjadi 4.140 yuan dalam periode yang sama.

⁴² Pidato PM China, Wen Jiabao pada 6 Maret 2008 itu juga dihadiri Presiden Hu Jintao dan Ketua Kongres Rakyat Nasional (NPC), Wu Banguo. Dikutip dari pemberitaan AFP berjudul 'Rata-Rata Pertumbuhan Ekonomi China Capai 10,6 %', dan diakses di alamat situs <http://economy.okezone.com/index.php/ReadStory/2008/03/06/213/89403/rata-rata-pertumbuhan-ekonomi-china-capai-10-6>.

- 9) Dalam hal administrasi dan kerjasama ekonomi luar negeri juga, China mencapai kemajuan yang cukup pesat.
- 10) China sukses untuk urusan domestiknya, seperti pembentukan BUMN, sistem finansial, sistem fiskal dan pajak.
- 11) Inovasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang berdampak pada dunia internasional.

Dari tahun ke tahun, China tetap menunjukkan kemajuan ekonomi negaranya. Produk domestik bruto (PDB) China meningkat menjadi 39,5 triliun yuan atau setara dengan 5,98 triliun dollar Amerika Serikat di tahun 2010, atau 10,1 persen lebih tinggi dibanding tahun sebelumnya⁴³. Beijing juga telah menetapkan target pertumbuhan kredit bagi perbankan nasional untuk 2011 antara 7,2 triliun yuan sampai 7,5 triliun yuan. Target tersebut setara dengan 1,09 triliun dollar AS sampai 1,14 triliun dollar Amerika Serikat⁴⁴.

Target pertumbuhan kredit 2011 ternyata lebih kecil dari 7,95 triliun yuan yang disalurkan oleh lembaga keuangan China pada tahun 2010, dan juga jauh di bawah rekor penyaluran kredit yang mencapai 9,6 triliun yuan yang dikucurkan pada 2009 silam. Laporan ini juga menambahkan bahwa pemerintah telah menetapkan batas kredit bulan ini sebesar 12 persen dari target setahun penuh. Perbankan China cenderung menyalurkan kredit yang melampaui target yang ditetapkan oleh pemerintah. Umumnya, mayoritas kredit yang mereka salurkan pada awal tahun memaksa pihak berwenang untuk membatasi pertumbuhan kredit mereka pada pertengahan dan akhir tahun.

Laporan-laporan di atas menunjukkan kemajuan pesat perekonomian China. Sebuah laporan bahkan menyebutkan, perekonomian China kini menduduki peringkat ke-2 terbesar di Dunia, di bawah Amerika Serikat. Dibandingkan dengan kekuatan ekonomi

⁴³ Dow Jones Newswires melaporkannya setelah mengutip isi pemberitaan dari 'China Securities Journal', dan dipublikasikan dalam berita berjudul Pertumbuhan Ekonomi China Dilaporkan 10,1%, pada 18 Januari 2011, diakses di alamat situs <http://www.pacific2000.co.id/research/berita-hong-kong/report-pertumbuhan-ekonomi-china-dilaporkan-101.php>.

⁴⁴ *Ibid.*

lainnya di Asia (bahkan dunia), China berhasil menggeser Jepang yang sudah 40 tahun menduduki posisi *runner up*⁴⁵.

Perekonomian Jepang di 2010 mencatat angka pertumbuhan 3,9 persen, jauh di bawah pertumbuhan ekonomi China yang di 2010 lalu mencatat angka 10,3 persen. Secara nominal, Jepang mencatat angka PDB sebesar 5,474 triliun dollar Amerika Serikat di 2010. Angka itu tentu saja jauh dari PDB China yang di 2010 mencapai 5,879 triliun dollar Amerika Serikat. Sementara Amerika Serikat masih di peringkat pertama dengan PDB sebesar 13,249 triliun dollar Amerika Serikat⁴⁶.

Data dari Pemerintah Jepang yang dikutip *AFP* menunjukkan, pada kuartal IV-2010 perekonomian negeri matahari terbit itu tumbuh 1,1 persen (secara tahunan) akibat selesainya subsidi otomotif yang menggerus penjualan, kenaikan cukai rokok yang mengurangi permintaan dan penguatan yen yang menghambat ekspor. Berdasarkan data, pertumbuhan ekonomi Jepang pada 2010 hanya sebesar 3,9 persen yang disebabkan oleh belanja konsumen dan permintaan yang melemah⁴⁷.

Saat ini China memposisikan diri sebagai Negara sedang berkembang yang terus berupaya mencapai kemajuan di segala bidang dan percaya bahwa kalau momentum ini dapat dipertahankan, pada 2050, China akan dapat mencapai posisi sebagai Negara adidaya kelas menengah. Bahkan sejumlah pakar berpandangan bahwa China berpeluang menjadi kekuatan terbesar di dunia di masa yang akan datang bahkan tidak

⁴⁵ Perbandingan kemajuan ekonomi China dengan Jepang dipublikasikan dalam berita berjudul *Kalahkan Jepang, Ekonomi China Kini Terbesar Kedua di Dunia*, pada 14 Februari 2011, diakses dari alamat situs <http://www.detikfinance.com/read/2011/02/14/103031/1570639/4/kalahkan-jepang-ekonomi-china-kini-terbesar-kedua-di-dunia?992204topnews>.

⁴⁶ *Ibid.*

⁴⁷ Pada Januari 2011, salah satu lembaga internasional yang membuat peringkat negara-negara berdasarkan kemajuan ekonominya bernama Standard & Poor's, telah memangkas peringkat Jepang dari kategori 'AA' menjadi 'AA-', yang berarti negara dengan kemajuan ekonomi tanpa pengecualian, menjadi negara dengan kemajuan ekonomi dengan catatan. Standard & Poor's mengkhawatirkan tingkat utang Jepang yang mencapai 200 % dari PDB, dan merupakan tertinggi dibandingkan negara maju lainnya. Dalam *ibid.*,

menutup kemungkinan dapat melampaui Amerika Serikat.⁴⁸ China yang kuat dan kaya adalah impian para elit sejak lebih dari satu abad lalu. Ini masih menjadi sasaran dan tema utam dalam kepemimpinan modern sejak Mao Zedong maupun Deng Xiaoping sebagai pemimpin reformasi China hingga kepemimpinan berikutnya, Jiang Zemin dan Hu Jintao, meskipun mereka memilih cara berbeda dalam strategi pembanguana dan modernisasi. Berdasarkan pemahaman sejarah ini kiranya dapat juga dipahami mengapa China perlu melakukan pengembangan atau modernisasi kekuatan militer.

3.3 Kebijakan Pertahanan China

Pengembangan kekuatan militer yang dilakukan oleh China sesungguhnya adalah dalam kerangka mendukung kebijakan pertahanan nasional. Kebijakan pertahanan nasional China sendiri, sebagaimana dinyatakan dalam buku Putih Pertahanan China (*China's National Defence*) 2008⁴⁹, adalah defensif aktif atau dalam terminologi China disebut *jiji Fangyu*, yaitu sikap mempertahankan diri dan hanya akan menyerang kalau diserang lebih dahulu. Dalam kerangka pertahanan nasional ini, China menempatkan kedaulatan Negara, keamanan, integritas wilayah, kepentingan pembangunan nasional dan kepentingan rakyat China di atas segalanya. Oleh karena itu, China sangat berkepentingan dan berupaya keras membangun system pertahanan nasional dan kekuatan militer yang kuat yang sesuai dengan kebutahan keamanan dan pembangunan nasional.

Dalam kerangka pertahanan nasional, China menjamin bahwa modernisasi militer yang dilakukannya adalah hanya untuk memenuhi kebutuhab mempertahankan diri. Sejalan dengan sikap itu, China secara teguh berpegang kepada kebijakan bukan pihak pertama menggunakan senjata nuklir, dan bersikap menahan diri terhadap

⁴⁸ Jose Miguel Alonso Trabanco, "The Great Dragon awakens: China Challenges American Hegemony", *Centre for Research on Globalization*, 2 Februari 2009, <http://www.globalresearch.ca/index.php?context=va&aid=11638> diunduh pada tanggal 21 mei 2011.

⁴⁹ "China's National Defense in 2008", *The State Council Information Office*, 20 Januari 2009, http://www.china.org.cn/government/central_government/200901/20/content_1755577.htm, diunduh pada tanggal 29 Mei 2011

perkembangan senjata nuklir. China pun tidak akan melibatkan diri dalam perlombaan senjata nuklir dan tidak akan pernah menempatkan senjata nuklir di luar wilayah China.

Kemampuan serang balas senjata nuklir China dibatasi hanya untuk mendukung strategi penangkalan menghadapi serangan nuklir Negara lain. Hal ini pernah ditegaskan oleh Presiden China, Hu Jintao, pada kongres Partai Komunis China ke-17 yang berlangsung di Beijing pada Oktober 2007 yang menyatakan bahwa meskipun China melakukan pembangunan dan modernisasi militer, tetepi peranan Tentara Pembebasan Rakyat (People's Liberation Army) masih terbatas pada kapabilitas pertahanan untul menjaga kedaulatan Negara, keamanan dan integritas teritorial.⁵⁰ Meskipun demikian, ada juga pihak-pihak yang meragukan pernyataan pemimpin China tersebut, seperti yang dikemukakan oleh Mark Valencia dari East West Center di Honolulu yang mengatakan, “akankah China berlaku kooperatif dan bersikap ramah kepada tetangga-tetangganya seperti yang dikatakannya, atau sebaliknya China akan mendominasinya”.⁵¹

China yang sedang tumbuh pesat membutuhkan lingkungan strategis baik di dalam negeri maupun lingkungan internasional yang damai dan iklim yang kondusif terutama di wilayah peripheri. China mengartikan wilayah peripheri adalah lingkungan luar yang terdekat. Perubahan yang terjadi di wilayah peripheri dan hubungan Negara tersebut dengan Negara-negara tetangga akan mempunyai pengaruh langsung terhadap lingkungan pembangunan. China meyakini ada peluang strategis di wilayah peripheri, dan oleh sebab it kebijakan China terhadap Negara-negara tetangga yang merupakan peripheri in adalah menciptakan “*good neighborly and stable relation with and enriching the surrounding contries and not bullying or weakening the neighbors.*”⁵²

⁵⁰ “HU Jintao’s Speech to the 17th Party Congress
<http://english.cri.cn/4026/2007/10/16/191/@284354.htm>

⁵¹ Daniel Burstein dan Arne de Keijzer, *Big Dragon – China’s Future: What It Means For Business, The Economy, and The Global Order*, New York: Simon & Schuster, 2008, hal. 123.

⁵² Robert S. Ross, “Balance of power politics and the rise of China: accommodation and balancing in East Asia,” *Security Studies* (15), 2006, hal. 355-395

Berdasarkan pemaparan dan pembahasan kebijakan pertahanan nasional China di atas, terlihat bahwa pengembangan militer bagi China merupakan suatu keharusan dalam rangka menjaga dan mempertahankan kedaulatan Negara, integritas wilayah dan keamanan nasional, menjamin berlanjutnya pembangunan ekonomi, serta meningkatkan kekuatan nasional secara sistematis dan berlanjut. Pengembangan militer China juga dimaksudkan untuk mengamankan dan mendukung tujuan dan tugas pokok pertahanan nasional china, seperti untuk mencegah setiap pelanggaran wilayah territorial, baik darat, laut dan udara dan melawan tindakan agresi.

Dalam jangka panjang, kekuatan militer china ini juga diarahkan untuk mampu menjamin Negara ini menjadi bagian integral dari pengaturan keamanan dikawasan, khususnya Asia Timur. Kekuatan militer juga dapat dipandang sebagai penjamin untuk menopang pengaruh politik luar negeri China di dunia internasional. Terlihat disini bahwa hard power (kekuatan militer), sebagai ciri utama realism, menjadi salah satu instrument penting dan digunakan China sebagai upaya untuk meningkatkan pengaruh dalam politik hubungan antarbangsam terutama di Asia Timur. pengaruh politik luar negeri China di dunia internasional. Terlihat disini bahwa hard power (kekuatan militer), sebagai ciri utama realism, menjadi salah satu instrument penting dan digunakan China sebagai upaya untuk meningkatkan pengaruh dalam politik hubungan antarbangsam terutama di Asia Timur.

3.4 Kapabilitas Militer China

Setelah mengalami kemajuan pesat dalam bidang ekonomi, China kemudian menggunakannya untuk menopang peningkatan kapabilitas militer mereka. Seluruh matra TPR (Angkatan Laut, Angkatan Udara dan Angkatan Darat) dibangun dengan anggaran yang terus bertambah dari tahun ke tahun⁵³. Misi China meningkatkan kapabilitas militernya juga terkait letak geografis mereka yang berada di sepanjang

⁵³ Salah satu catatan menyebutkan, anggaran militer China pada 2007 mencapai 44,94 juta dollar AS, atau bertambah 17,8% dibandingkan tahun sebelumnya, dalam ibid. hal 6.

Laut Kuning, Laut China Timur, dan Laut China Selatan, sehingga menjadi wajar demi mempertahankan kedaulatan wilayah. Peningkatan kapabilitas TPR Angkatan Laut berjalan relatif lambat, tetapi secara bertahap menunjukkan hasil yang cukup memuaskan. TPR AL China memahami bahwa untuk mencapai kemampuan bertahan yang sangat baik, maka mereka harus mampu memantau (menjaga) pergerakan kapal perang musuh yang jauh dari perairan China sekalipun. Pada saat yang sama, untuk menaggulangi konflik perbatasan dan perairan yang melibatkan China dan negara-negara di sekitarnya, TPR AL harus mampu memproyeksikan kekuatannya hingga jauh dari wilayah mereka. Samudera luas. Secara berangsur, doktrin TPR AL berkembang menjadi sebuah teori AL, termasuk taktik pertempuran, program persenjataan militer laut lepas (*bluewater*), dan seluruh ajaran kekuatan mentalitas AL (*haiyang yishi*). Wakil Kepala Staf AL TPR, Laksamana Madya Cheng Mingshang, merupakan konseptor yang memperkenalkan doktrin tersebut pada 1991.

Pada matra angkatan laut, China menaruh perhatian khusus karena kapal perang Amerika Serikat kerap berpatroli di wilayah perairan Asia. China telah memesan kapal yang dilengkapi dua unit rudal penghancur kelas Sovremenny (Proyek-956), selain itu kapal ini dilengkapi dengan senjata rudal SS-N-22. Kedua, pembuatan dan upgrading (peningkatan kemampuan) delapan buah kapal selam yang dilengkapi dengan rudal jelajah anti-kapal dan torpedo VA-111 Shkval. Kapal-kapal selam China pun kini telah dilengkapi dengan teknologi propulsi air-independent yang menjadikannya mampu diam dan menunggu di bawah permukaan air dalam waktu lama untuk mengejutkan pihak lawan.

Selain angkatan laut, China juga didukung oleh kekuatan angkatan udara yang cukup kuat, di antaranya sekitar 800 unit pesawat tempur termasuk di dalamnya pesawat pembom, pesawat serang darat, pesawat patroli maritim, dan helikopter. Angkatan Udara China memiliki kekuatan sekitar 250.000 personil yang mengoperasikan sekitar 3.000 pesawat tempur dan juga mempunyai 600 sampai 800 sistem rudal. TPR

Angkatan Udara China ini tercatat sebagai yang terbesar di Asia dan ketiga terbesar di dunia.

Secara personil, China memiliki pasukan Korps Marinir yang kekuatan utamanya terdiri dari dua brigade bersenjata gabungan dengan 6.000 personil, yang ditempatkan pada Armada Laut Selatan, termasuk infantri, artileri, kavaleri, zeni, komlek, anti-tank, dan personil kawal. Korps Marinir memiliki dua rantai komando paralel, yakni operasional di bawah komandan Armada Laut Selatan dan administrasi latihan, peralatan, perencanaan, personil dan kebijakan, di bawah komando Markas Besar Angkatan Laut di Beijing.

Program senjata nuklir China merupakan salah satu yang tersukses di antara negara-negara pengembang nuklir. Kekuatan nuklirnya sangat efektif. China juga berhasil mengembangkan infrastruktur dan fasilitas rancang bangun, pembuatan, pengujian dan pabrikasi sistem rudal nuklir taktis. Secara umum, China memiliki sekitar 400 warheads rudal balistik, yang di antaranya dirancang taktis seperti bom yang dijatuhkan dari pesawat udara dan ranjau darat nuklir.

China merupakan salah satu aktor yang menguasai teknologi angkasa luar selain Amerika Serikat, Rusia dan beberapa negara Eropa Barat. Beberapa contoh prestasi China antara lain telah berhasil meluncurkan satelit-satelit telekomunikasi dan melaksanakan misi penerbangan manusia ke luar angkasa (dua kali pada 2005). China pun melakukan investasi besar dalam pengembangan dan pengerahan sistem berbasis angkasa luar, yakni dengan menempatkan satelit telekomunikasi militer di ruang angkasa, dan dua buah satelit telekomunikasi ganda (untuk keperluan sipil dan militer).

Peningkatan kapabilitas militer China juga terlihat dari kepemilikan mereka dalam bidang teknologi kapal selam, inovasi pesawat tempur multi fungsi, dan kekuatan

pasukan darat dengan peningkatan kemampuan serta perangkat sistem persenjataan yang semakin maju. China bahkan tidak asing lagi dalam mengadopsi targeting system untuk senjata dengan tingkat akurasi tinggi. Gambarannya, kapabilitas rudal darat-darat China terus meningkat, serta improvisasi pertahanan udara dengan basis darat maupun laut.

Kapabilitas militer China juga semakin mengeksploitasi kemampuan inovasi dengan penggunaan bahan-bahan dan teknologi canggih. Belum lagi program pengembangan senjata nuklir, yang memperoleh perhatian cukup besar. Setiap tahun, China mengalokasikan sekitar lima persen dari dana anggaran pertahanan untuk program pengembangan persenjataan strategis.

China bahkan menjadikan Amerika Serikat sebagai target serangan rudal nuklir, apabila Negara adikuasa tersebut mengintervensi konflik di Selat Taiwan. China kini tengah memperluas kekuatan rudal nuklir dan memungkinkan kekuatan ini menjangkau banyak kawasan dunia di luar Pasifik. Rudal yang kapasitasnya dapat menjangkau target di India dan Rusia, sebenarnya juga bisa menjangkau seluruh Amerika Serikat hingga ke selatan Asia-Pasifik, seperti Australia dan Selandia Baru.

3.5 Perkembangan Militer China

Kemajuan China dalam bidang ekonomi berdampak kepada kekuatan militernya, yang dari tahun ke tahun terus meningkat. Hal tersebut sesuai dengan Pasal 29 Undang-Undang Dasar mereka yang menyebutkan bahwa,

Ayat (1): “Kekuatan bersenjata (militer) China adalah milik rakyat. Mereka bertugas untuk memperkuat pertahanan nasional, menahan serangan musuh, mempertahankan tanah air, tenaga pelindung perdamaian penduduk, berpartisipasi dalam pembangunan nasional, dan bekerja keras untuk melayani rakyat.

Ayat (2): Modernisasi, pembaharuan, dan pengaturan kekuatan bersenjata (militer) bertujuan untuk meningkatkan kapabilitas pertahanan nasional”.

Dikaitkan dengan kondisi sekarang, modernisasi alat utama sistem persenjataan (alutsista), bertujuan melindungi momentum kemajuan ekonomi, terutama dengan cara menciptakan stabilitas dalam negeri serta melindungi aset-aset ekonomi⁵⁴. Sedangkan terkait dengan ancaman separatisme, peningkatan kapabilitas militer China bertujuan untuk menangkal berbagai gerakan, terutama yang selama ini dianggap mampu ‘menggoncang’ stabilitas dalam negeri China, yakni gejolak yang timbul dari Taiwan dan Tibet. Dua wilayah itu, pada derajat yang berbeda, menantang legitimasi otoritas pemerintah pusat China atas mereka. Landasan dari alasan ini adalah nasionalisme dan integritas teritorial.

Sejak 1990, China beberapa kali meningkatkan anggarannya dalam jumlah cukup besar. Pada 2004, China meningkatkan anggarannya hingga 18 persen, tahun 1995 sebesar 21 persen, tahun 2005 sebesar 12,6 persen, dan tahun 2006 sebesar 14,7 persen⁵⁵. Pada Maret 2010, anggaran pertahanan China dilaporkan meningkat sebesar 7,5 persen menjadi 532,1 miliar yuan atau 77,9 miliar dollar Amerika Serikat⁵⁶. Secara keseluruhan, pengeluaran militer China berjumlah lebih dari 150 miliar dollar Amerika Serikat pada 2009.

Secara umum, peningkatan kapabilitas militer China bisa dibagi menjadi dua tahap besar, yakni:⁵⁷

- 1) Masa Pemerintahan Presiden Deng Xiaoping sampai dengan 2010 bisa disebut sebagai ‘era mengejar’ persiapan menuju kemungkinan perluasan pengaruh militer, seperti di Selat Taiwan dan Selat Korea, sekaligus menjajaki kemungkinan memperkuat pengaruh/kontrol di Laut China Selatan.

⁵⁴ Baca M. Haripin, Modernisasi Militer China, dipublikasikan pada 13 September 2009, dapat diakses di alamat situs <http://hankamindonesia.wordpress.com/2009/03/19/modernisasi-militer-china/>

⁵⁵ Baca artikel berjudul China Terus Tingkatkan Anggaran Petahanannya, diberitakan Harian Umum *KOMPAS*, edisi Senin, 5 Maret 2007.

⁵⁶ Baca sebuah berita berjudul China Perkuat Kekuatan Militer, edisi 18 Agustus 2010, yang diakses dari alamat situs <http://international.okezone.com/read/2010/08/18/18/363978/china-perkuat-kekuatan-militer>

⁵⁷ Baca Richard D. Fisher Jr., op cit., hal 67.

- 2) Tahap menyelesaikan tujuan-tujuan pada tahap sebelumnya, namun lebih khusus memenuhi berbagai tuntutan untuk menjadi kekuatan militer global.

Pada awal Rencana Lima Tahun (Peningkatan Kapabilitas Militer) periode 2006-2010, menandai langkah besar China. TPR saat itu memang belum secara tegas dan nyata berperang melawan Taiwan, namun China dianggap sudah berhasil memberikan pengaruh di kawasan Selat Taiwan, dan berhasil mengembangkan kapabilitas militer yang ‘luar biasa’⁵⁸. Faktanya, Taiwan terus mencurigai China, dan berusaha merespon dengan cara mencoba meningkatkan kapabilitas mereka, khususnya dalam persenjataan seperti nuklir, rudal jarak jauh, kapal selam, dan pesawat tempur.

China sangat berkepentingan untuk memiliki Angkatan Bersenjata yang modern dan kuat sebagai kekuatan pengungkit dalam ranah strategi dan politik baik untuk kepentingan dalam negara maupun internasional. Dalam hubungan ini Tentara Pembebasan rakyat (People’s Liberation Army) menempati posisi yang sangat strategis dan merupakan unsure utama dalam system pertahanan nasional dan merupakan kekuatan terdepan untuk melindungi kepentingan nasional China. Tentara Pembebasan Rakyat (TPR) terbagi atas tiga elemen yaitu TPR-Angkatan Darat, TPR-Angkatan Laut, dan TPR-Angkatan Udara. China juga membentuk Second Artillery force, sebuah satuan yang menangi peluru kendali strategis.

3.5.1 TPR-AD (Angkatan Darat)

Tugas pokok TPR-AD lebih diposisikan untuk tujuan defensif, yaitu menjaga dan mengamankan wilayah perbatasan, melindungi kedaulatan Negara dari musuh-musuh dalam negeri, mendukung pembangunan ekonomi nasional, dan membantu terpeliharanya stabilitas dalam negeri⁵⁹. TPR-AD memiliki sekitar

⁵⁸ *Ibid.*

⁵⁹ Dennis J. Blasko, "The Chinese Army Today: Tradition dan Transformation for the 21th Century, Routhledge, 2005, hal 66.

1,6 juta personil dan dibagi ke dalam 18 grup yang masing-masing berkekuatan sekitar 30.000 hingga 65.000 personil⁶⁰. Susunan kekuatan setiap grup disusun berbeda-beda dan memiliki perkuatan pasukan yang berbeda-beda pula.

Dipacu dan belajar dari keberhasilan pasukan Amerika Serikat dalam perang di Afghanistan dan Irak, yang mencapai kemenangan karena keunggulan dalam perang informasi, operasi gabungan persenjataan dan kesenjataan dengan menggunakan teknologi tinggi, maupun keunggulan dalam C4ISR (Command, Control, Communication, Computer, Intelligence, Surveillance and Reconnaissance), TPR-AD sekarang melakukan perubahan yang cukup penting. Sesuai dengan Doktrin Perang Rakyat fase kelima, yaitu perang terbatas atau perang local dalam kondisi teknologu informasi, TPR-AD melihat bahwa perang elektronika (electronic warfare) merupakan kebutuhan kritis dalam rangka modernisasi TPR-AD. Preang elektronika dapat melakukan peran ganda baik sebagai kekuatan ofensif maupun untuk kepentingan defensif.

3.5.2 TPR-AL (Angkatan Laut)

Tugas pokok TPR-AL mengalami perubahan dari waktu ke waktu disesuaikan dengan perkembangan lingkuang dan tuntutan strategis serta tantangan yang dihadapi. Saat ini sifat tugas pokok TPR-AL telah mengalami perubahan yang signifikan, dari peran statis yaitu pertahanan pantai dan laut dekat ke peran pertahanan laut aktif.⁶¹ Dalam kapasitas ini maka TPR-AL menjadi sangat penting dalam mendukung system pertahanan nasional strategis. TPR-AL memikul tanggung jawab dan tugas yang makin penting dalam menjaga keamanan wilayah laut dan ditempatkan di garis depan dalam pelibatan militer. TPR-AL mengembangkan diri menjadi kekuatan maritime yang modern dengan

⁶⁰ "People's Liberation Army Ground force," http://en.wikipedia.org/wiki/People's_Liberation_Army_Ground_Force diunduh pada tanggal 20 Juni 2011

⁶¹ "Chinese Naval Forces," <http://www.sinodefence.com/navy/default.asp>, diunduh pada tanggal 20 Juni 2011.

kemampuan persenjataan konvensional dan nuklir. Prioritas ditekankan pada pengembangan system informasi maritim dan pengembangan generasi baru persenjataan dan peralatan tempur lain. Hal ini disebabkan oleh beberapa alasan, yaitu tuntutan dan kebutuhan militer dalam mengantisipasi Taiwan, keinginan membangun *blue-water presence* di seluruh kawasan Pasifik Barat dan Samudera Hindia⁶² dan juga sebagai bagian dari pengembangan industry kapal China.

Program modernisasi TPR-AL menyangkut tiga aspek yang berbeda, yaitu⁶³: *pertama*, menetapkan prioritas kepada penghapusan sejumlah besar kapal perang kombatan yang sudah tua; *kedua*, secara agresif memanfaatkan teknologi barat untuk meningkatkan kemampuan tempur TPR-AL dan merevitalisasi alat utama system senjata TPR-AL; *ketiga*, meningkatkan program pelatihan personil TPR-AL mulai tamtama hingga perwira selaras dengan program TPR untuk meningkatkan kemampuan personil. Peran TPR-AL saat ini adalah sebagai kekuatan maritime strategis kawasan yang berperan untuk melindungi kepentingan ekonomi china terutama di wilayah pesisir, kepentingan China dalam bidang maritime serta mengoptimalkan operasi pertahanan laut dalam kerangka pertahanan nasional.

3.5.3 TPR-AU (Angkatan Udara)

TPR-AU China merupakan angkatan udara terbesar di dunia dilihat dari sisi kuantitas perangkat keras yang dimilikinya, namun TPR-AU belum memiliki kemampuan kelas dunia terutama dalam proyeksi kekuatan militer lewat udara, karena TPR-AU masih tertinggal dalam teknologi dibandingkan dengan angkatan udara dari Negara-negara maju di dunia, bahkan dengan negara-negara

⁶² Alexander Nemets dan Thomas Torda, "PLA Navy: From 'Green Water' to 'Blue Water'," *Newsmax.com*. 26 Juli 2002, <http://archive.newsmax.com/archive/articles/2002/7/25/16133.shtml>, diunduh pada tanggal 30 Juni 2011.

⁶³ Andrew S. Erikson, "PLA Navy Modernization: Preparing for 'informatized' War at Sea," *China Brief*, Vol 8, 29 Februari 2008, http://www.jamestown.org/programs/chinabrief/single/tx_news. diunduh pada tanggal 30 Juni 2011.

tetangganya seperti Jepang, Korea selatan, bahkan dari Taiwan. TPR-AU mengoperasikan Armada Udara yang sebagian besar masih menggunakan teknologi 1950-an dan 1960-an,⁶⁴ dengan kekuatan melebihi 6000 pesawat militer dan 300.000 personel aktif. China menyadari ketertinggalan ini, dan oleh sebab itu sejak 1990-an TPR_AU menyiapkan diri untuk menghadapi berbagai kemungkinan yang terjadi dengan Negara-negara tetangganya atau Negara lain. TPR-AU mulai melakukan pembenahan armada tempur yang didominasi oleh pesawat-pesawat tua, dengan meningkatkan efektifitas dan pemekaran kekuatan tempur serta melakukan investasi dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi dan luar angkasa

Sasaran pembangunan TPR-AU saat ini adalah membentuk Angkatan Udara dengan kekuatan pesawat-pesawat tempur generasi keempat yang dilengkapi keempat yang dilengkapi kemampuan system C4ISR (*Command, Control, Communications, Computers, Intelligence, Surveillance, dan Reconnaissance*) untuk meningkatkan kemampuan dan efektifitas tempurnya. Untuk membangun keunggulan di udara dan angkasa luar terutama di wilayah Asia Timur, TPR-AU sedang memusatkan upayanya untuk membangun system kesenjataan udara handal, yang dapat memberikan pukulan maksimal. Untuk memperoleh system kesenjataan udara dan menguasai teknologi udara dan angkasa luar dalam upaya membangun kekuatan udara yang handal, China tidak hanya mengandalkan kepada Rusia, tetapi juga Negara-negara lain seperti Israel, Pakistan dan Iran.⁶⁵

3.5.4 Second Artillery Force

TPR-China memutuskan untuk membentuk satuan Peluru Kendali Strategis pada 1957 dengan membentuk battalion yang pertama, yaitu Batalion peluru kendali permukaan ke permukaan. Kemudian pada 1960 beberapa daerah militer membentuk battalion-batalion yang serupa dan pada 1964 ditingkatkan sampai

⁶⁴ Walter J. Boyne (ed.), *Air Warfare: An International Encyclopedia*, ABC_CLIO, 2002, hal. 563

⁶⁵ Avey Goldstein, *Rising to the Challenge: China's Grand Strategy and International Security*, Stanford University Press, 2005, hal. 59

tingkat Resimen. Baru pada Juni 1966 *Second Artillery* secara resmi dibentuk dibawah kendali langsung Komite Pusat Partai Komunis China dan Komite Militer Pusat melalui Departemen Staf Umum TPR. Nama *Second Artillery* diberikan oleh Perdana Menteri Zhou Enlai untuk membedakan dengan Korps Artileri yang sudah ada. China menyatakan bahwa kelahiran kecabangan baru ini merupakan hasil kerja keras para perwira dan seluruh anggota TPR dari beberapa generasi, dan merupakan kartu baru, yang bukan saja merupakan symbol kekuatan militer tetapi juga merupakan pilar penting bagi status China sebagai *big power*.

Pada awalnya, *second artillery* menangani senjata artileri konvensional maupun nuklir, namun pada 1968 dibagi menjadi empat bagian: artileri Jarak Pendek, menengah dan jauh serta Antar benua. Secara internal organisasi *Second Artillery* terbagi ke dalam 4 departemen lapis pertama dan 10 departemen pada lapis kedua, dan setiap departemen terbagi ke dalam bagian-bagian. Saat ini China sedang giat-giatnya melakukan program modernisasi peluru kendali balistik dalam upaya meningkatkan baik kualitas maupun kuantitas semua kelas peluru kendali. Program modernisasi ini akan meningkatkan daya tangkal nuklir China (*nuclear deterrence*) dengan meningkatnya jumlah hulu ledak nuklir.

Dalam rangka modernisasi kekuatan strategisnya, China telah mengganti beberapa jenis peluru kendali generasi lama dengan yang lebih baru. Saat ini dilaporkan juga China sedang mengembangkan peluru kendali jelajah yang diluncurkan dari udar maupun dari pangkalan didarat yang memiliki kemampuan nuklir.

3.6 Militer China Dibawah Hu JinTao

Hu Jintao, diangkat menjadi Presiden China menggantikan Jiang Zemin pada September 2004, dan menggantikan posisi ketua di CMC, Posisi ini sangat strategis yang memungkinkan Hu Jintao berkuasa atas TPR. Sebelumnya menjabat ketua CMC, jabatan Hu adalah wakil CMC. Didalam CMC, Hu dibantu oleh dua vice chairman

yaitu Guo Boxiong dan Xu Caihou. Dalam masa kepemimpinannya Hu dibantu oleh general staff Chen Bingde, Li Jinai dan Liao Xilong. Dalam kepemimpinan Hu mengangkat komandan AL TPR Wu Shengli dan Komandan AU TPR Xu Qiliang. Selanjutnya karakteristik militer China di bawah Hu Jintao adalah memasukan jenderal baru sebagai pimpinan di CMC, Mempromosikan teknologi profesional dan memberikan point penting gerakan separatisme seperti Xinjiang, Tibet dan Taiwan.

Dalam pidato dalam kongres PKC ke-17 Hu Jintao memerintahkan dalam upaya Modernisasi militer China ditegaskan kembali dalam pidato kongres PKC ke-17, Hu Jintao memerintahkan Pembangunan militer berdasarkan Science dan Tehnologi dengan berbasis pada IT Warfare. Selanjutnya anggaran militer selalu naik pertahun. Anggaran militer China pada 2008 adalah US Dollar 60 milyar.

Terdapat 8 agenda modernisasi militer China yaitu nuklir deterrence, information supremacy, mid and long range precision strike capability, three dimensional maritime operation, air supremacy, ground force mobility, long range power projection, dan efficient command and control. Selanjutnya dalam memasuki era transformasi, mengambil kesempatan dari pembangunan ekonomi dan perkembangan teknologi. Transformasi dipandu oleh strategi pertahanan baru dengan persiapan terhadap perang dan mentalitas yang kokoh.

Sejalan dengan pengembangan modernisasi militer China (Ramification Military Affair) maka militer China mulai mengurangi jumlah personilnya dari 2.300.000 personil menjadi sekitar 1,6 juta personil pada tahun 2008 ini. Doktrin tempur berubah dari pertempuran darat yang menggunakan kuantitas manusia ke modernisasi dan penggunaan Tehnologi militer yang canggih. Militer China (PLA) kini terdiri dari AD, AL, AU dan Angkatan Roket Strategis (Angkatan Artileri Kedua) yang merupakan kekuatan nuklir China. Angkatan khusus nuklir ini mengoperasikan rudal ICBM DF-5/Dong Feng (Angin Timur) yang mampu mencapai sasaran 13.000 km dari 20 silo/tempat peluncuran tetap yang disebarakan di berbagai tempat. Kekuatan Angkatan Udara (PLAAF) terdiri dari 7 regional Commands (yang memiliki jet tempur, bombers, transwar dan brigade pertahanan rudal udara) Angkatan Udara memiliki

400.000 personil. Kekuatan Angkatan Laut : Memiliki kekuatan 3 Fleets, 9 nuklir submarine Unit, Naval Aviation, 13 Naval Supporting bases, 6 Major Surface Warship, 3 Submarine, 2 Brigade Marinir, Cost Defense Troops dan 300.000 personil.



Bab IV

Signifikansi peningkatan pembangunan militer China terhadap strategi Amerika Serikat Di Asia Timur

4.1 Strategi dan Doktrin Militer China

Keamanan masih menjadi unsur kajian penting dalam hubungan internasional. Dengan nuansa yang lebih saintifik, Kenneth Waltz berpendapat bahwa ternyata, dalam kondisi yang anarki, kerjasama internasional tetap terjadi. Namun, kerjasama ini berdiri di atas permasalahan system internasional yang sangat prinsipil yakni ‘who gains more, who gains less?’ dan ‘who gains, who losses?’.

Kalah menang ini ditentukan oleh power yang esensinya terletak pada militer. Fungsi militer ini sekarang berkembang tidak hanya sekedar untuk mempertahankan kedaulatan, peperangan tapi juga meluas pada masalah pengamanan asset, terutama asset ekonomi. Inilah alasannya, mengapa pada saat damai sekalipun, Negara-negara tetap berupaya untuk memperbesar kekuatan militernya.

Dalam masalah memperbesar power, muncullah konsep security dilemma. Ketika suatu Negara berupaya untuk memperbesar kekuatannya, upaya tersebut bisa membuat resah Negara-negara lain. Maksud negara tersebut mungkin untuk pengamanan internal, seperti menjaga ketertiban dan keamanan di wilayah perbatasan atau penjagaan dari tindakan criminal. Tapi benarkah Negara tersebut hanya bermaksud meningkatkan power internalnya? Siapa yang bisa menjamin dia tidak akan mempergunakan power-nya untuk menyerang Negara lain? Arms races contoh nyata respon Negara atas security dilemma.

China mendefinisikan Grand Strategy-nya sebagai “strategi bangsa secara keseluruhan, atau persekutuan bangsa-bangsa yang menggunakan keseluruhan kekuatan nasional”. Untuk mencapai tujuan politik yang terkait dengan keamanan nasional dan

pembangunan China. Konsep yang dapat digunakan untuk memahami strategi militer Cina adalah “comprehensive national power” (CNP) atau “strategic configuration of power”/SHI.

CNP merupakan konsep yang telah dievaluasi oleh para ahli strategis China yang mengukur posisi China dalam relasinya dengan negara lain diantaranya adalah pendekatan pada aspek perbatasan, sumber daya alam, kekuatan ekonomi, pengaruh diplomatik, pemerintahan domestik, kapabilitas militer, dan pengaruh budaya. Militer China merupakan bagian yang sangat penting dari strategi nasional. China mengembangkan potensinya militernya yang sangat difokuskan kepada AL dan AU.

Seluruh short-ranged ballistic missile (SRBMs) yang diarahkan ke Taiwan, dapat digerakan ke segala arah dan tersebar di segala penjuru negara untuk mengambil posisi tembak keseluruhan kawasan, dalam menghadapi serangan tak terduga. China juga mengembangkan system jangkauan menengah baru yang dapat memajukan kapabilitas targeting regionalnya.

Airbone early warning serta kontrol dan program aerial fueling untuk AU-PLA melebarkan jangkauan operasionalnya untuk pesawat penyerangannya dan menghasilkan operasi tambahan hingga ke Laut China Selatan. Pencapaian di AL-PLA, seperti kapal selam dan kapal penghancur, merefleksikan keinginan China akan “*Active Offshore Defense*”, untuk melindungi dan mempercanggih kepentingan maritimnya, termasuk klaim territorial, kepentingan ekonomi, dan *Sea Lanes of Communication* (SEALOCs) yang kritis.

Dalam jangka panjang, kemajuan dalam komando, control, komunikasi, computer, intelijen, surveillance, peninjauan, landasan luar angkasa dan cakrawala. Membuat China mampu mengidentifikasi, menargetkan, dan menjejaki aktivitas militer asing hingga kearah Barat Daya Pasifik dan menyediakan analisis tentang isi bumi.

China menggunakan istilah pertahanan aktif atau “*active defense*” untuk menjelaskan strategi militernya. Pertahanan aktif berarti strategi militer yang defensif dan

menyatakan bahwa China tidak akan mulai suatu perang agresi, tetapi terlibat di perang untuk mempertahankan kedaulatan nasional dan integrasi teritorialnya, China hanya akan menyerang apabila diserang. Pertahanan aktif membutuhkan angkatan bersenjata yang diposturkan untuk dapat membela negara terhadap apa yang dianggap sebagai ancaman, dan mencegah musuh untuk bereaksi yang dapat mengganggu kepentingan nasional China.

China mengobservasi secara mendalam operasi militer dan gerakan modernisasi pertahanan negara asing, Amerika Serikat menjadi model faktor utama China dalam bagaimana seharusnya militer dimodernisasi dan dikondisikan untuk peperangan modern. China mengadopsi dan mengidentifikasi kelemahan musuh berteknologi tinggi yang dapat dieksploitasi. Transformasi pertahanan Amerika Serikat disorot China sebagai gap teknologi yang semakin besar antara militer modern dan militer negara berkembang. Buku Putih Pertahanan China mengidentifikasi “gap teknologi mendorong hasil dari revolusi militer” yang mempengaruhi keamanan China. Ini kemudian mendorong para pemimpin China menuntut PLA untuk mencapai teknologi terdepan dan informationalized capability untuk menaikan mobilitas, daya tembak serta kepemilikan alat dan senjata yang tepat.

TPR juga mengaplikasikan banyak hal dari Operation ALLIED Force (1999, NATO’s air operation, Serbia), dalam pelatihan ketahanan udara yang telah diperbaiki yaitu “*Three Attacks, Three Defense*” (menyerang pesawat udara tersembunyi, misil dan helicopter, serta mempertahankan diri dari serangan persisi, perang elektronika dan pengintaian musuh).

Para ahli TPR juga menyimpulkan bahwa kekuatan udara dan serangan jarak jauh mengurangi peran kekuatan darat. Observasi ini membawa TPR pada arah pembangunan yang lebih cepat dengan penempatan balistik dan misil yang lebih mampu dan menempatkan pesawat udara penyerang multi-peran untuk mendukung doktrin yang berubah – operasi udara strategis yang independent.

China selalu berusaha memajukan kekuatan misil strategisnya baik secara kualitatif dan kuantitatif, yang dapat berkembang menjadi kapabilitas untuk menyerang baik dan penangkalan (deterrence). Misil-misil China mampu mencapai India, Rusia, Amerika Serikat dan kawasan Asia Pasifik sejauh Australia dan New Zealand.

Kekuatan strategis China terdiri dari penambahan silo-based CSS-4 ICBMs (telah disebar), solid-fueled, road mobile DF-31 (kapabilitas inisial operasional 2005-2006), dan sea-based JL-2 SLBMs (IOC 2008-2010). China juga tetap akan menggunakan CSS-5 MRBMs yang bersenjata nuklir untuk gangguan tiba-tiba di tingkat regional.

Di tahun 2005, China telah menempatkan kurang lebih 20 silo-based, liquid propellant CSS-4 ICBMs, yang mendasari kekuatan penangkalan dasarnya. Second Artillery juga tetap menggunakan kurang lebih 20 liquid-fueled, CSS-3 ICBMs dengan jarak yang lebih terbatas di tingkat regional. Second Artillery akan tetap menggunakan misil ini hingga diganti dengan road-mobile DF-31 yang lebih lama. CSS-2s akan diganti dengan CSS-5 MRBMs.

4.1.1 TPR - Angkatan Udara

Precision Strike, TPR menggunakan serangan utama untuk mencegah serangan yang berasal dari pangkalan udara, pelabuhan, surface combatants, land-based C4ISR, system pertahanan udara terpadu dan fasilitas komando Pasific Barat Daya. Kebanyakan unit TPR adalah unit reaksi cepat dan mereka yang memiliki kemungkinan untuk melakukan operasi tak terduga di perbatasan tanah airnya. Serangan utama mencakupi Short-ranged Ballistic Missiles (SRBMs), Land Attack Cruise Missiles (LACMs), Air to Surface Missiles (ASMs), Anti-Ship Cruises Missiles (ASCMs), Anti-Radiation Weapons (ARMs). Pertahanan Udara, PLA telah mengganti inti pertahanan militer kunci, industri dan target politik menjadi Operasi militer gabungan Anti-Air Raid yang didasarkan pada system pertahanan udara yang terintegrasi yang mampu untuk melakukan offensive counter-air (OCA) dan penangkalan serangan udara yang defensif.

Dibawah doktrin ini, TPR akan menggunakan pesawat udara, misil permukaan ke permukaan, artillery daya jangkauan jauh, angkatan bersenjata untuk kekuatan operasi khusus, kekuatan AL, dan unit gerilya untuk menghancurkan musuh yang ingin menyerang lewat udara, serta menyediakan pertahanan pangkalan udara yang komprehensif.

4.1.2 TPR - AL

Melindungi jalur SLOCS, keberadaan China di dunia internasional merefleksikan kepentingan yang semakin membesar pula akan sumber daya kunci, terutama energi. Dengan semakin besarnya ekonomi China, tentu China akan menjaga jalur-jalur strategis untuk distribusi persediaan energinya. 80% pasukan energi China melewati Selat Malaka. Armada Angkatan Laut Selatan PLA yang bertanggung jawab untuk keamanan Laut China Selatan telah dibekali dengan pesawat combatant dan kapal selam, termasuk dua kapal penghancur (satu LUDA IV class dan satu LUHAI class). China juga memiliki kapabilitas pertahanan udara jarak pendek yang utama dengan HHQ-7C, dengan system udara surface-to-air.

Dalam buku putih kebijakan pertahanan (defense white papers) China disebutkan bahwa pemerintah China secara jelas menjalankan kebijakan pertahanan nasional yang bersifat defensive. Konstitusi RRC secara jelas menyebutkan tugas angkatan bersenjata (militer) China adalah mengkonsolidasikan pertahanan nasional, membendung agresi, mempertahankan tanah air, berpartisipasi dalam konstruksi nasional dan berjuang untuk melayani masyarakat. Karena pada saat ini China sedang dihadapkan pada tugas berat untuk membangun perekonomian dalam negeri, maka tugas pertahanan harus mendukung dan melayani pembangunan ekonomi nasional secara keseluruhan. Pembangunan China saat ini membutuhkan lingkungan internasional yang damai untuk jangka panjang, terutama lingkungan peripheri yang konstruktif.

Dalam buku putih tersebut juga disebutkan bahwa China akan selalu menjalankan kebijakan luar negeri yang damai dan independent, mendukung

penanganan masalah internasional sejalan dengan kepentingan-kepentingan mendasar dari masyarakat China dan dunia, menahan diri untuk tidak membentuk aliansi dengan negara-negara besar atau kelompok-kelompok manapun. China berkeyakinan bahwa konflik dan pertikaian diantara negara-negara harus diselesaikan secara damai melalui konsultasi dan menentang ancaman atau penggunaan kekuatan, hegemoni dan politik internasional baru yang rasional dan adil serta membangun hubungan persahabatan dan kerjasama dengan seluruh negara di dunia berdasarkan “Lima Prinsip Hidup Berdampingan secara Damai”. China akan selalu menjadi kekuatan yang melindungi perdamaian dunia dan stabilitas kawasan sehingga apabila di masa datang China tumbuh menjadi kekuatan baru, China akan selalu menjadi kekuatan yang melindungi perdamaian dunia dan stabilitas kawasan sehingga apabila di masa datang China tumbuh menjadi kekuatan baru, China tentu tidak akan menggunakan langkah-langkah agresi dan ekspansi terhadap negara lain. Sesuai dengan konstitusi dan Hukum Pertahanan Nasional, China telah membangun dan meningkatkan sistem pertahanan nasionalnya, Saat ini, China melaksanakan strategi pertahanan dua tingkat⁶⁶. Dalam jangka pendek sampai menengah, strategi ini mencerminkan keinginan China untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi kekuatan militer sebagai suatu instrumen kebijakan luar negeri dan pertahanan lebih kuat dan fleksibel. Strategi tersebut juga mencerminkan aspirasi jangka panjang untuk mencapai proyeksi kekuatan dan perluasan kemampuan pertahanan teritorial yang berkaitan erat dengan pencapaian status adidaya.

Strategi tingkat pertama terfokus pada modernisasi kemampuan nuklir TPR dengan membangun suatu kekuatan misil taktis dan strategis yang kecil namun akurat dan fleksibel. Program modernisasi nuklir ini dimaksudkan untuk mendukung dua tujuan yaitu (1) mempertahankan kemampuan antisipasi terhadap ancaman nuklir dan senjata konvensional dari negara-negara besar, (2) membangun kemampuan senjata-senjata nuklir taktis untuk digunakan dalam situasi konflik yang terbatas. Namun demikian, strategi pertahanan nuklir China

⁶⁶ Michael D Swaine, *The Role of the Chinese Military in National Security Policymaking*, (Santa Monica : RAND, 1996) , hal.37

secara resmi masih tetap menekankan pada doktrin *no first use* dan melarang penggunaan senjata nuklir terhadap negara-negara non nuklir.

Strategi tingkat kedua menekankan perbaikan kemampuan spesifik militer konvensional untuk menghadapi berbagai kemungkinan ancaman darat dan udara terutama yang berasal dari kawasan Asia Pasifik. Ancaman-ancaman tersebut menjadi dasar bagi doktrin pertahanan konvensional China pasca Perang Dingin yang menjadi kunci atas konsep seperti perang lokal (lokal war) dan pertahanan peripheri aktif (*active peripheral defense*). Konsep ini pertama kali diutarakan oleh para pemimpin China pada awal dan pertengahan 1980-an. Konsep perang lokal dan pertahanan peripheri aktif ini mengasumsikan bahwa konflik-konflik konvensional di kawasan dengan insentitas rendah dan dalam waktu yang singkat mungkin saja terjadi disekitar perbatasan wilayah China sehingga memerlukan aplikasi kekuatan yang cepat dan menentukan.

Dalam kegiatan yang berhubungan dengan pertahanan, China melaksanakan kepemimpinan terpadu⁶⁷. Dalam sistem pertahanan nasional, Kongres Rakyat Nasional (KRN), badan tertinggi kekuasaan negara, merupakan badan yang memutuskan masalah perang dan damai. Komite tetap KRN, badan permanent dalam KRN, merupakan badan yang memutuskan mengenai pernyataan keadaan perang, mobilisasi secara umum dan sebagian. Sejalan dengan keputusan KRN dan komite Tetap-nya, Presiden bertugas mengumumkan keadaan perang serta mengeluarkan perintah mobilisasi. Ketiga organ negara tersebut memiliki kewenangan untuk melaksanakan fungsi-fungsi dan kekuasaan yang berhubungan dengan pertahanan seperti yang telah ditetapkan dalm konstitusi. Dewan Negara memimpin dan mengatur kerja pertahanan nasional sedangkan Komite Militer Pusat memimpin dan menjalankan komando atas angkatan bersenjata nasional. Tentara Pembebasan Rakyat (TPR) diorganisir sesuai dengan sistem dimana Departemen Staff Umum, Departemen Politik Umum, Departemen Logistik Umum dan Departemen Persenjataan Umum berada dibawah kepemimpinan Komite Militer . Departemen Staff Umum mengorganisir dan memimpin

⁶⁷ *Op.Cit.*

pembangunan angkatan bersenjata nasional serta mengorganisir dan mengatur operasi militer mereka. Departemen Politik Umum menjalankan tugas partai dan militer dan mengorganisir serta melaksanakan tugas politik-nya. Departemen Logistik Umum megorganisir dan mengurus tugas politik militer sedangkan Departemen Persenjataan Umum megorganisir dan mengurus tugas militer dalam perlengkapan militer. Angkatan Bersenjata China terdiri dari TPR, baik komponen aktif maupun cadangan, Angkatan Kepolisian dan Milisi. TPR sendiri terdiri dari Angkatan Darat, Angkatan Laut, Angkatan Udara dan Pasukan Artileri ke-2.

Perumusan dan pelaksanaan seluruh strategi dan kebijakan dalam kebijakan pertahanan nasional merupakan tanggungjawab TPR dengan mendapat pengawasan dari elit partai senior yang bertanggungjawab untuk merumuskan tujuan strategis nasional. Meskipun kebijakan pertahanan menjadi wilayah eksklusif TPR dan merupakan inti keterlibatannya dalam keseluruhan keamanan nasional, pengambilan keputusan menyangkut kebijakan pertahanan tidak lepas dari tarik menarik antara kepentingan sipil dan militer.

Kepemimpinan, struktur dan proses kebijakan pertahanan China, seperti yang telah disebutkan diatas, sangat tertur dan birokratis. Namun demikian, pengaruh secara informal dari para pemimpin organ-organ penting tetaplah sangat menentukan. Para pelaku utama penentu kebijakan pertahanan pada tingkat atas terdiri dari pemimpin partai tingkat tinggi dari kalangan sipil dan perwira militer senior yang memiliki kedudukan tinggi dalam partai. Sedangkan pada tingkat kedua terdiri dari para kepala departemen dan organisasi militer utama yang bertanggungjawab terhadap aspek-aspek penting dari kebijakan pertahanan. Selain itu setelah Kongres Partai ke-14 terdapat pula mekanisme koordinasi tunggal yang penting yaitu Komite Militer Pusat dan Biro Umumnya. Tingkat paling atas dalam kebijakan pertahanan meliputi anggota paling senior dalam Komite Militer Pusat. Setelah Kongres Partai ke-17 bulan Oktober 2004, kelompok ini terdiri dari tiga tokoh yaitu Hu Jintao sebagai Ketua Komite Militer Pusat dan Jenderal Guo Boxiong dan Jenderal Xu Caihou sebagai Wakil Ketua Komite Militer Pusat. Ketiga pemimpin tersebut merupakan komite eksekutif informal yang memiliki

wewenang eksklusif untuk mengambil keputusan mengenai isu-isu kebijakan militer, termasuk pertahanan, yang sangat penting. Ketiga pemimpin Komite Militer Pusat tersebut dibantu oleh Jenderal Li Jinai dan Liao Xilong. Sementara komandan AL dibawah oleh Wu Shengli Xu Qiliang dan komandan artileri kedua Jing Zhiyuan.

Dalam 2004, China lebih aktif dalam peran internasionalnya. Memanfaatkan pertumbuhan ekonomi dan kestabilan politik untuk membangun pengaruhnya secara global. Hal tersebut dapat dilihat dari keaktifannya mengirim TPR nya sebagai *peace keeping force*” di Haiti. Mengembangkan pengaruhnya ke negara Amerika Latin dan pencegahan pengakuan internasional Taiwan sebagai bagian dari komunitas internasional resmi., seperti keanggotaan Taiwan di WHO.

Dalam mencapai tujuan kebijakan pertahanan, sering terdapat pertentangan dan perbedaan visi antara sipil dan militer. Para ahli strategi kebijakan luar negeri di kementerian Luar Negeri (Kemlu). Perbedaan perspektif dalam memandang tujuan keamanan tersebut disebabkan adanya pengalaman dan pelatihan yang berbeda dalam mengatasi kekuatan-kekuatan eksternal⁶⁸. Militer umumnya sangat memperhatikan kekuatan militer sedangkan para ahli strategi kebijakan luar negeri lebih memusatkan perhatian pada komponen-komponen politis dari tujuan keamanan. Para ahli strategi kebijakan luar negeri berpikir dan membuat suatu rencana dalam konteks yang berhubungan dengan mempengaruhi sikap dan memanipulasi kecenderungan-kecenderungan global. Bagi militer, perhatian terhadap aspek militer dari tujuantujuan keamanan menyebabkan mereka lebih sensitif terhadap komponen-komponen terpisah dari “keseimbangan” militer dan terhadap perhitungan akan kemampuan musuh dalam scenario yang lebih spesifik. Oleh karenanya, militer tidak selalu sensitif terhadap konteks yang relative abstrak yang menjadi dasar untuk memformulasikan dan mendefinisikan kebijakan luar

⁶⁸ Paul H.B Godwin, ”Soldiers and Statesmen : Chinese Defense and Foreign Policies in the 1990”, dalam Samuel S Kim (ed) *China and The World : New Directions in Chinese Foreign Relations*, San Fransisco:Westview Press,1989, hal. 182.

negeri serta tujuannya. Hal inilah yang menyebabkan militer dan ahli strategi memiliki perbedaan pandangan mengenai pentingnya kekuatan militer dan strategi politis dalam mempengaruhi musuh yang actual dan potensial.

Pada tahun 1992, Komite Militer Pusat mengeluarkan strategi besar yang baru mengenai pertahanan China. Strategi tersebut dirumuskan sebagai “berperang melawan pertempuran modern dalam kondisi teknologi tinggi” (fighting modern warfare under high-tech conditions) dan merupakan revisi secara komprehensif terhadap doktrin Mao Zedong mengenai “perang rakyat” (people’s war) dan doktrin Deng Xiaoping mengenai “perang rakyat dalam kondisi modern” (people’s war under modern conditions). Keluarnya strategi baru tersebut merupakan upaya keras dari Laksamana Liu Huaqing dan Jenderal Zhang Zhen. Strategi baru tersebut mencerminkan pemikiran baru TPR di era pasca Perang Dingin dan era informasi teknologi tinggi serta mengubah secara mendasar struktur kekuatan TPR, program riset dan pengembangan dan posisi pengaturannya⁶⁹. Dengan konsensus strategi yang baru ini, TPR tampak lebih bersatu daripada sebelumnya. Pada 2002, CMC telah merubah “perang local dibawah kondisi High-tech” menjadi perang local dibawah informatisasi modern dengan melihat evolusi perang dimasa sekarang dan yang akan datang. Langkah seperti itu juga melambangkan bahwa strategi militer sekarang adalah sebetulnya strategi fleksibel, dengan menambahkan elemen dan roman baru program modernisasi secara terus-menerus.

China melanjutkan strategi yang memfokuskan pada pembangunan “*comprehensive national power*” dengan penekanan pada pembangunan ekonomi. (2006-2010). Tarik menarik antara militer dan sipil dalam kebijakan pertahanan antara lain tampak dalam perubahan strategi nasional dan militer China setelah kemenangan AS melawan sekutunya dalam Perang Teluk. Kemenangan kekuatan koalisi dalam perang tersebut menyadarkan pemimpin China akan pentingnya

⁶⁹ You Ji, “Missile Diplomacy and PRC Domestic Politics”, dalam Greg Austin (ed), *Missile Diplomacy and Taiwan’s Future : Innovations in Politics and Military Power*, Canberra : Strategy and Defence Studies Centre Research School of Pacific and Asia Studies Australian National University, 1997, hal 45.

persenjataan berteknologi tinggi dalam peperangan modern. Dalam sidang Komite Militer Pusat untuk melakukan penilaian ulang atas strategi pertahanan China tahun 1991, beberapa pemimpin militer berpendapat bahwa persenjataan China tertinggal hampir dua dekade dibandingkan dengan persenjataan canggih yang digunakan dalam Perang Teluk. Oleh karena itu, China harus mulai membangun sistem persenjataan yang lebih modern. Namun demikian banyak pihak, termasuk Jiang Zemin, tetap berpendapat bahwa meskipun modernisasi persenjataan merupakan hal yang sangat penting, faktor manusia tetap lebih menentukan daripada mesin. Sebagian pemimpin bahkan berpendapat bahwa Komite Militer Pusat seharusnya tidak perlu cepat menuruti desakan untuk secepatnya melakukan perbaikan sistem persenjataan. Dalam pertemuan KRN akhirnya disetujui peningkatan anggaran pertahanan dengan bagian terbesar dialokasikan untuk riset dan pembangunan militer⁷⁰. Meskipun harus mengurangi jumlah anggaran nasional untuk sector lain, pemimpin China berpendapat bahwa peningkatan biaya pertahanan diperlukan untuk membangun persenjataan canggih. Dalam Kongres PKC ke-14 tahun 1992 dan KRN ke-8 bulan Maret 1993, militer mendapatkan kenaikan anggaran sebesar 13.5 % untuk modernisasi angkatan bersenjata⁷¹. Hal ini menunjukkan bahwa tuntutan militer untuk mendapatkan anggaran yang lebih besar bagi pelaksanaan program modernisasi angkatan bersenjata mendapat perhatian yang besar dari kalangan sipil.

Kenaikan anggaran ini dipandang perlu oleh militer karena mereka berpendapat bahwa militer yang kuat dengan persenjataan yang canggih sangat diperlukan untuk mempertahankan dan mengamankan wilayah China serta untuk mendorong China untuk memperoleh status sebagai kekuatan besar. Militer berpandangan bahwa memelihara lingkungan internasional yang aman merupakan suatu hal yang sulit.

⁷⁰ William R Heaton, Jr, "The People's Republic of China", dalam Douglas J Muray dan Paul R Viotti, *The Defence Policies of Nations: A Comparative Study 3rd edition*, London : John Hopkins University Press, 1994, hal 385.

⁷¹ *Ibid.* hal 386

Meskipun tidak ada ancaman militer secara langsung yang perlu dikhawatirkan, militer melihat lingkungan internasional yang penuh ancaman dan ketidakpastian. Oleh karena itu, militer mulai menekankan perlunya konsep “pertahanan nasional” dalam lingkungan internasional di masa datang tanpa ancaman langsung terhadap China⁷². Dalam situasi dunia internasional yang relatif lebih aman, potensi terjadinya konflik-konflik regional akan tetap menjadi ancaman bagi perdamaian dunia, juga bagi China. Dengan demikian, kekuatan militer menjadi bagian yang penting dalam menetapkan status China secara global. Kekuatan militer juga merupakan hal yang penting dalam menjaga sumber daya alam China yang terdapat di sekitar perbatasannya maupun di perairan teritorialnya. Tanpa “pertahanan nasional” yang kuat, China tidak akan mampu untuk mempertahankan posisinya dalam persaingan di dunia internasional. Dari pandangan militer mengenai “pertahanan nasional” tersebut, dapat dilihat bahwa status China di dunia internasional mulai menempati fungsi yang sejajar dengan kemampuan militer China dalam penilaian militer mengenai peran angkatan bersenjata dalam kebijakan luar negeri China. Militer berpendapat bahwa pertahanan nasional tidak lagi dianggap penting. Pada tahun 1950-an dan 1960-an, ancaman datang dari Amerika Serikat dan Uni Soviet. Selain itu terjadi perang perbatasan dengan India, pertempuran melawan Chiang Kai-Shek dan aksi-aksi militer lainnya semuanya memerlukan perhatian sungguh-sungguh terhadap pertahanan nasional yang kemudian memberikan posisi yang tinggi bagi angkatan bersenjata dan pertahanan nasional di mata masyarakat. Sebaliknya, lingkungan keamanan saat ini dianggap sebagai tidak memiliki potensi ancaman sehingga masalah-masalah pertahanan nasional tidak mendapat perhatian yang dibutuhkan. Meningkatnya ambisi dan hegemon-hegemon regional dan pertikaian teritori sepanjang perbatasan darat dan laut China merupakan hal-hal yang membutuhkan perhatian utama berkaitan dengan masalah-masalah pertahanan nasional. Tanpa kekuatan militer yang memadai, China tidak akan mampu menjaga dan meningkatkan posisinya sebagai kekuatan besar.

⁷² Paul H.B. Godwin, *Op.Cit*, hal.192-193.

4.2 Dinamika Kerjasama Keamanan Amerika Serikat Di Asia Timur

4.2.1 Pola Hubungan China - Amerika

Kebijaksanaan keamanan dimasa lalu sering cenderung mengambil pendekatan persaingan dari pada pendekatan kerjasama. Akan tetapi dalam era pasca perang dingin ini kebijaksanaan keamanan lebih mengambil pendekatan kerjasama misalnya menghilangkan rasa ketakutan atau ancaman akan terorisme, dan tekanan-tekanan. Terdapat enam konsep kerjasama keamanan yaitu keamanan bersama (*common security*) multilateralisme, keamanan kooperatif (*cooperative security*), keamanan komprehensif (*comprehensive security*), dan *self regionalism*.⁷³

Dalam keamanan bersama (*common security*), keamanan regional dicapai melalui kerjasama, dan tidak bersifat melawan satu sama lain. Kerjasama ini menuntut saling terbuka antara Negara anggota dan harus ditunjang oleh kemampuan militer yang relative sama. Enam prinsip dalam keamanan bersama adalah bahwa⁷⁴: (1) semua negara berhak atas keamanan, (2) menolak keamanan militer sebagai cara untuk menyelesaikan sengketa; (3) membatasi diri dalam menyatakan kebijakan nasional; (4) mengurangi dan memberi batas kualitatif untuk persenjataan; (5) memahami bahwa keamanan tidak dapat dicapai melalui superioritas militer; (6) menghindari menghubungkan perundingan persenjataan dengan kejadian-kejadian politik.

Konsep keamanan bersama sangat sulit diwujudkan di kawasan Asia Timur karena diantara Negara-negara dikawasan ini tidak ada pemahaman yang sama mengenai nilai-nilai keamanan terorisme. Dengan demikian sulit diterapkan usaha-usaha membangun saling percaya di Asia Timur yang menjadi prasyarat

⁷³ Lihat Craig A. Sayder dalam *Structure of Regionalism*.

⁷⁴ *Ibid.*

keamanan bersama guna menanggulangi ancaman terorisme Internasional.⁷⁵ Disamping itu, aliansi keamanan bilateral dengan Amerika Serikat yang dijalin oleh dua Negara di kawasan yaitu Jepang dan Korea Selatan, serta kecenderungan pembangunan kemampuan militer China di Laut China Selatan, merupakan faktor yang menimbulkan kekhawatiran Amerika Serikat akan semakin kuatnya armada militer China di kawasan Asia Timur.⁷⁶

Bentuk kerjasama multilateral juga sulit diwujudkan di kawasan Asia Timur sehubungan dengan semakin meningkatnya volume pembangunan persenjataan modern China. Hal ini terutama karena Negara China merasa khawatir akan aliansi kerjasama militer yang dibentuk Amerika Serikat, Jepang dan Korea Selatan guna mendukung kemerdekaan atau pemisahan Taiwan dari China Daratan.⁷⁷ Sehingga, hasil yang ditunjukkan oleh China adalah melakukan *psywar* (perang urat syaraf) dengan melakukan uji coba nuklir antar benua di Pasifik Selatan.

Kemudian Amerika Serikat menawarkan bentuk kerjasama keamanan komprehensif di kawasan Asia Timur guna mengantisipasi kemungkinan China menjadi Negara adikuasa di Asia, dan pada prinsipnya kerjasama komprehensif ini bukan merupakan kerjasama yang mengutamakan dialog, melainkan kerjasama yang diusahakan dan disusun dalam semua sebuah agenda keamanan bersama, dengan lebih menekankan pada pembentukan institusi-institusi baru secara bertahap sesuai perkembangan yang terjadi di China.⁷⁸ Sedangkan kerjasama lain yang ditawarkan Amerika Serikat adalah kerjasama kooperatif yang mengambil

⁷⁵ *Ibid.*

⁷⁶ Ming Zhang and Ronald N. Montaperto, *A Thief of Another Kind: The United States, China And Japan*, (Macmillan Press Ltd., 1999), Hal. 61.

⁷⁷ *Ibid.*, hal.71.

⁷⁸ *Ibid.*, hal. 115-121.

pendekatan lebih fleksibel terhadap kebutuhan keamanan kawasan.⁷⁹ pada kasus China, Amerika Serikat menempatkan Jepang sebagai Negara sekutu yang dianggap mampu mengembangkan dan memberikan keseimbangan kekuatan militer, dengan alasan Jepang Negara yang memiliki keunggulan teknologi, ironisnya Amerika Serikat masih juga mengkhawatirkan bengkitnya militerisme dalam pemerintahan Jepang seperti pada masa perang dunia II.

Self Regionalism⁸⁰ merupakan konsep kerjasama keamanan yang tidak mengandung dimensi militer, melainkan didasarkan oleh interaksi ekonomi antar Negara anggota. Kerjasama regionalism seperti ini dipelopori oleh sektor swasta meskipun tetap harus didukung oleh pemerintah, seperti pembentukan kerjasama ekonomi Amerika Serikat untuk menganugerahkan Hubungan Dagang Normal Permanen atau *Permanent Normal Trade Relation* (PNTR) kepada China. Self Regionalism bertujuan untuk membentuk suatu rezim yang stabil dimana Negara-negara yang bersangkutan saling mendapatkan manfaat satu sama lain dari stabilitas politik dan keamanan Negara lain. Self Regionalism merupakan suatu proses untuk mencapai interpedensi yang lebih luas, melalui interaksi dan komunikasi diantara RRC dan Amerika Serikat.

4.2.2 Kecaman Terhadap Ekspansi Global Militer AS

China akhirnya mengancam peningkatan keberadaan militer Amerika Serikat secara global menyusul peristiwa 11 September dan menyebutkan ekspansi Amerika Serikat sebagai ancaman terhadap dunia. Kritik tersebut bertolak belakang dengan sikap China selama ini yang mendukung aksi balas dendam militer Amerika Serikat terhadap serangan teroris tahun 2001 lalu.

⁷⁹ *Ibid.*

⁸⁰ *Op.Cit.*, Craig A. Sayder.

Amerika Serikat telah membangun banyak pangkalan militer diseluruh dunia dan menempatkan ratusan ribu tentara, hingga dimana-mana melanggar hak-hak asasi manusia (HAM). Dokumen yang berjudul Catatan HAM di Amerika Serikat pada tahun 2001 adalah suatu tulisan untuk membalas dokumen sejenis yang dikeluarkan Kementerian Luar Negeri Amerika Serikat mengenai catatan HAM di China. Dokumen itu berisi kritikan terhadap aksi militer Amerika Serikat, selain tuduhan yang menyebutkan pihak Amerika Serikat mencampuri urusan internal China.

Kritikan tersebut juga kembali mengungkit peristiwa tabrakan antara pesawat pengintai Amerika Serikat dengan pesawat tempur China pada bulan April 2001 lalu, yang menewaskan seorang pilot China. Pihak China menyebut peristiwa tersebut telah menimbulkan kemarahan didalam negeri China.

Hubungan antara Beijing dan Washington memburuk setelah peristiwa tabrakan tersebut, tetapi kemudian membaik lagi setelah China mendukung Amerika Serikat dalam perang terhadap terorisme, dan kunjungan Presiden Bush hingga duakali berturut-turut ke China. Sementara itu, menurut kantor berita China, Xinhua, laporan itu juga berisi desakan terhadap Amerika Serikat agar menghentikan praktek-praktek konfrontasi dan ikut campur dalam masalah dalam negeri Negara lain menggunakan isu HAM.

AS sebenarnya berulang-ulang mendesak pemerintah China melindungi kebebasan warga sipil serta kebebasan beragama. Tetapi China menolak kritikan Amerika Serikat itu dengan mengatakan pihaknya lebih berkepentingan melindungi hak-hak rakyatnya yang berjumlah 1,3 milyar untuk mendapatkan makanan, tempat tinggal dan pakaian.

4.2.3 Kerjasama Amerika Serikat dengan Negara-Negara Asia Timur lainnya.

Hubungan antara Amerika Serikat dengan Negara-negara di kawasan Asia Timur menunjukkan hubungan interpedensi. Tiga setengah kekuatan di Asia Pasifik dipengaruhi oleh Amerika Serikat, Rusia, Cina (disebut major Power) dan Jepang.⁸¹

China dianggap sebagai security order di Asia Timur, karena pertumbuhan ekonomi yang lebih dari dua dekade. China disebut power in the accident (kekuatan yang sedang muncul), secara ekonomi. Pada nantinya akan relevan dengan kekuatan militer yang tidak puas (menginginkan suatu tindakan yang sesuai dengan kekuatannya), karena pada abad ke-20 China diperlakukan tidak adil oleh Amerika Serikat dan Jepang.⁸²

Sedangkan Jepang, pasca perang dingin perlu mendefinisikan kembali perannya secara internasional. Sebab secara ekonomi dan politik terjadi gap yang jauh, hal ini dikarenakan secara politik Jepang masih dipayungi Amerika Serikat.

Hubungan Amerika Serikat dengan Korea Selatan masih berputar pada masalah Korea Utara dan kekhawatiran Amerika Serikat terhadap serangan spontan yang dilakukan Korea Utara, dengan menggunakan persenjataan nuklir. Pada gilirannya Amerika Serikat terus melakukan pengawasan yang ketat terhadap Korea Utara dengan menerapkan berbagai embargo guna membatasi ruang gerak Korea Utara, sehingga diharapkan oleh Amerika Serikat dan Korea Selatan, Korea Utara dalam situasi tertekan secara politis dan ekonomi yang akhirnya membawa Korea Utara pada meja perundingan yang lebih terhormat.

⁸¹ AN APAP Project, Charles E. Morrison, *Asia Pacific Security Outlook*, (2003), Hal. 14.

⁸² *Ibid.* hal. 15-16.

Alasan-alasan mengapa Negara-negara Asia Timur masih mengharapkan dan membutuhkan kehadiran militer AS diwilayahnya dapat dianalisis sebagai berikut:

1. Lingkup yang sempit dari ekspor Asia Timur
2. Ketergantungan besar pangsa pasar Amerika Serikat bagi Negara-negara di Asia Timur.
3. Infrastruktur yang lebih diakibatkan oleh kompleksnya konflik politik di Asia Timur dan masih adanya sengketa wilayah dan ideologi.
4. Ketergantungan pada impor bahan mentah termasuk energy dari Negara-negara Amerika Serikat dan Eropa.
5. Kegagalan sistem pendidikan untuk penelitian orsinal bagi penyelesaian konflik di Asia Timur.

4.3 Hambatan-hambatan RRC dalam Upaya mengimbangi kekuatan Amerika Serikat di Asia Timur.

Hambatan yang dialami oleh China dalam memodernisasikan peralatan militernya dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal, hambatan internal adalah.⁸³

1. Tingkat ekonomi China masih dikategorikan sebagai Negara berkembang menjadi kesulitan utama China, karena harus tetap memperhitungkan faktor ekonomi dalam pembangunan militer China. Disamping itu, dari pengalaman runtuhnya Negara-negara komunis dikarenakan manajemen ekonomi yang tidak terkendali sehingga dana alokasi kesejahteraan rakyatnya didistribusikan pada pembangunan militer sehingga tingkat kesejahteraan masyarakat terabaikan.
2. Faktor politik dalam negeri China yang cenderung mengalami perubahan secara cepat dapat menimbulkan instabilitas keamanan di dalam negeri. Termasuk belum

⁸³ Evan F. *A China's Military Posture and The New Economic Geopolitics*, (Belfor Center for Science and International Affairs, Jhon F. Kennedy School of Government, Harvard University, 1999).

terselesaikannya masalah Taiwan merupakan hambatan bagi China dalam mempersatukan wilayah pertahanannya.

3. Adanya dua kubu yang bertentangan, yaitu kelompok konservatif yang dipengaruhi oleh pemikiran politik, ekonomi dan militer Mao Zedong. Kelompok kedua adalah kelompok yang lebih moderat dengan mengambil garis pemikiran Deng Xiaoping. Kenyataannya sulit untuk menyamakan persepsi diantara kedua kelompok tersebut terhadap pembangunan militer China.

Sedangkan faktor eksternal yang menjadi hambatan pembangunan militer China adalah:⁸⁴

1. Spionase yang dijalankan Amerika Serikat guna mengetahui kegiatan dan perkembangan militer China terus dilakukan, kasusnya yaitu terjadinya tabrakan pesawat mata-mata Amerika Serikat dengan pesawat tempur China yang menewaskan seorang pilotnya.

2. Aliansi Kerjasama pertahanan Amerika Serikat dengan dua sekutunya di Asia Timur yaitu Jepang dan Korea Selatan menjadi penghambat bagi pembangunan militer di China, karena kedua Negara tersebut dapat melakukan tekanan ekonomi maupun diplomatic di forum internasional.

3. Semakin tingginya kritikan yang disampaikan Negara-negara tetangga terhadap keberhasilan uji coba nuklir, menyurutkan China untuk terus membangun kekuatan militernya. Seperti kekhawatiran yang dilontarkan Negara-negara ASEAN terhadap pembangunan militer di China.

⁸⁴ *Ibid.*

4.4 Upaya-Upaya China Dalam Mengimbangi Kekuatan Strategi Amerika Serikat di Asia Timur.

China sebagai Negara yang luas dan memiliki sumber daya manusia yang melimpah, telah hadir menjadi Negara yang besar dan memiliki pengaruh yang cukup kuat di kawasan Asia Timur. Dalam hubungannya dengan Amerika Serikat, China telah menjadi pusat perhatian dunia terutama dengan keberhasilan China Dalam membangun reactor nuklir dan telah berhasil melakukan uji coba nuklir antar benua.

Kekuatan China dalam forum internasional dibuktikan dari kekuatannya sebagai pemegang hak veto. Sebenarnya, China dapat saja membendung pengaruh Amerika Serikat yang agresif dan ofensif di Kawasan Asia Timur. Kenyataan tersebut terbukti dari kekuatan tekanan diplomatic yang dilakukan China terhadap Amerika Serikat, seperti pada peristiwa tebrakan pesawat mata-mata Amerika Serikat yang menewaskan pilot pesawat tempur China, dimana Amerika Serikat tidak menunjukkan reaksi yang keras atas peristiwa tersebut, melainkan China melakukan penyanderaan terhadap pesawat tersebut.

China mengkhawatirkan Jepang akan menjadi Negara pesaing dalam kekuatan militer setelah Amerika Serikat memberikan lampu hijau bagi peningkatan aktifitas *Self Defences Forces* (pasukan beladiri Jepang), sekalipun masih dalam batas bantuan non-organik pada peristiwa-peristiwa internasional, termasuk pasukan koalisi Amerika Serikat di Afganistan dan Irak.

Secara garis besar upaya China guna memberikan keseimbangan di kawasan Asia Timur adalah sebagai berikut:

1. Secara konsisten China mengalokasikan APBN-nya sebesar 20 % untuk kepentingan pembangunan militer dan modernisasi peralatan militer yang dimilikinya sekarang. Membesarnya anggaran militer China dikarenakan China menganggap masih adanya ancaman dari Timur yaitu Jepang dan dari Selatan yaitu masalah Vietnam-Kamboja.

2. Pada tahun 2000, China telah membuktikan keberhasilannya dalam melakukan uji coba nuklir antar benua, dan telah membangun reactor nuklir untuk memproduksi

senjata nuklir dalam memperkuat jajaran pertahanan militernya. Disamping itu, disinyalir China mentransfer teknologi nuklirnya kepada Pakistan guna membantu Negara Pakistan yang sedang menghadapi ancaman nyata dari India.

3. Kekuatan personil tempur China yang mencapai kurang lebih satu juta pasukan, memberikan kekuatan tempur yang handal dan disegani oleh Negara-negara di sekitar China, termasuk oleh Negara-negara Asia Tenggara.

4.5 Evaluasi Strategi Amerika Serikat di Asia Timur.

Untuk mempertahankan hegemoninya, Amerika Serikat sebagai satu-satunya Negara adidaya di Dunia, tidak segan-segan untuk menciptakan suatu kebijakan yang diarahkan keluar maupun kedalam negerinya, yang tentu akan memerlukan suatu strategi, baik jangka pendek maupun jangka panjang dengan mempergunakan sarana dan prasarana, baik dalam bidang komunikasi, transportasi maupun teknologi persenjataan yang cukup potensial dan modern dalam melaksanakan strategi global Amerika Serikat demi mewujudkan ambisinya menjadi pemimpin dunia.

Benjamin Schwarz menyatakan bahwa strategi global Amerika Serikat adalah *the Imperative of Continued United States World Leadership, need to shape a favorable internasional environment reassurance of allies and the on going need for stability and continuing engagement*. Dari pandangan diatas tersebut, mengemukakan bahwa kepemimpinan global merupakan keharusan dan hal yang penting bagi Amerika Serikat untuk menjaga stabilitas keamanan internasional yang menuju pada terciptanya perdamaian dunia, dengan Amerika Serikat sebagai *The Global Cop*.

Pandangan Amerika Serikat terhadap Asia Timur sebagai suatu kawasan tidak dapat disangkal lagi telah menjadi arena penting aktivitas ekonomi dan diplomasi. Hal yang

masih diperhatikan adalah perkembangan karakter, geografi dan ketertarikan antara aktifitas ekonomi dan diplomasi dengan kerjasama politik yang melintasi wilayah geografi tersebut.

Asia Timur telah berkembang pada level integrasi informal tanpa diukur oleh institusi regional karena tidak melarang masuknya kepentingan luar. Integrasi terbuka itu terlihat dalam mengendalikan pasar sebagai prioritas, walaupun adanya upaya untuk menciptakan kondisi kondusif untuk liberalisasi perdagangan. Hal ini mungkin berbeda dengan integrasi institusi.

Asia Timur jauh lebih kohesif dibandingkan dengan Amerika Utara, atau bahkan Eropa. Kawasan Asia Timur memiliki keragaman secara rasial dan cultural namun mencakup lingkup sistem politik yang berlainan, dari apa yang sangat mirip dengan demokrasi parlementer Barat sampai kediktatoran komunis garis keras. Kawasan Asia Timur bukan hanya mencakup salah satu Negara kaya, yaitu Jepang tetapi juga beberapa Negara miskin.

Kawasan Asia Timur tidak terlepas dari peranan Amerika Serikat, terutama pasca Perang Dingin tidak biasa disebut antipolarity, sebab dimasing-masing region (Eropa, Amerika Utara dan Asia Pasifik/Asia Timur dan Tenggara) memiliki *Potential Contender* sebagai leader di kawasan tersebut.

Pada masyarakat di Asia Timur memiliki kesamaan, seperti adanya sifat-sifat umum dikawasan ini seperti, (1) kelenturan industry, (2) pengembangan atau peniruan produk yang cepat, (3) tingkat simpanan yang tinggi, (4) rasa hormat kepada pencapaian prestasi pendidikan dan (5) etika kerja.

Kepentingan Amerika Serikat di Asia Timur sangat besar di bidang keamanan. Oleh karena itu, pemerintah Amerika Serikat memiliki berbagai kekhawatiran terhadap stabilitas kawasan sehubungan dengan beberapa krisis keamanan yang telah terjadi dalam kurun waktu 1993-1998, berbagai peristiwa tersebut antara lain adalah ketegangan antara RRC- Taiwan, program nuklir Korea Utara dan ujicoba peluncuran rudal Taipo Dong I Korea Utara yang melintasi wilayah Jepang.

Dalam rangka mempertahankan keterlibatan keamanan kawasan, pada awal tahun 1995, Departemen Pertahanan Amerika Serikat telah menerbitkan *United States Strategy For The East Asia Pacific Region* yang merinci strategi keamanan Amerika Serikat berdasarkan kebijakan *engagement and enlargement* sebagai strategi global⁸⁵, sedangkan strategi keamanan Amerika Serikat di Asia Timur cenderung menggunakan keamanan berupa *engagement strategy* secara kooperatif dengan sekutu-sekutunya yaitu strategi militer Amerika Serikat yang memberdayakan kekuatan, asset, dana dan program dalam tiga bentuk utama, yaitu⁸⁶ 1) Mempertahankan kehadiran pasukan Amerika Serikat di Asia Timur dan tenggara; 2) memperkuat aliansi dengan sekutu Amerika Serikat dan 3) merespon berbagai krisis yang timbul.

Garis besar dari strategi keamanan Amerika Serikat di kawasan Asia Timur tertuang dalam *East Asia Strategic Initiative* (EASI) yang disampaikan oleh Badan Internasional *Security Affairs* (ISA)⁸⁷. Didalamnya menjelaskan berbagai hal menjadi kepentingan Amerika Serikat terhadap kawasan Asia Timur. Dalam EASI (1990-1993) dibawah pemerintahan Bush, menjelaskan hal-hal yang menjadi kepentingan Amerika Serikat dari berbagai bentuk serangan, mendukung kebijakan global *deterrence*, melindungi akses politik dan ekonomi Amerika Serikat di kawasan Asia Timur, mempertahankan *balance of power* untuk mencegah munculnya hegemoni di kawasan, mempercepat orientasi

⁸⁵ Lihat *Americas Defence, Strategy, Forces and Resources for A New Century, A Report of The Project for the New American Century*, September 2006.

⁸⁶ *Ibid.*

⁸⁷ *Ibid.*

barat terhadap Negara-negara Asia, mengembangkan pertumbuhan demokrasi dan hak asasi manusia, mencegah proliferasi nuklir.

Dalam EASI II⁸⁸(1993-1995) menjelaskan strategi keamanan Amerika Serikat yang terdiri atas enam prinsip dasar, yaitu: memastikan keterlibatan Amerika Serikat di Asia dan Pasifik, memperkuat kesepakatan dalam system keamanan bilateral, mempertahankan pengeluaran pasukan militer Amerika Serikat, memberikan tanggung jawab pertahanan yang lebih besar kepada sekutu-sekutu Amerika Serikat, saling mendukung dalam kerjasama pertahanan.

EASI III⁸⁹(1995-1998) yang dikeluarkan bulan februari 1995, kebijakan strategis Clinton (Amerika Serikat) diarahkan pada: memperkuat hubungan bilateral Amerika Serikat dan mengejar kesempatan-kesempatan baru melalui dialog-dialog keamanan multilateral, mempertahankan pengeluaran pasukan sekutunya, memastikan kebijakan keamanannya mendapat dukungan rakyat Amerika Serikat dan kongres, memperluas hubungan militer-militer dan bantuan keamanan, mencegah pengembangan senjata pemusnah missal, berbagai tanggung jawab dalam rangka mempertahankan keamanan regional dan global.

Dalam *East Asian Strategy Report*⁹⁰ (EASR) ke-4 tahun 1998, disebutkan bahwa strategi keamanan Amerika Serikat di Asia Pasifik merupakan refleksi dan dukungan terhadap strategi keamanan global Amerika Serikat. Dalam laporan empat bulanan Departemen Pertahanan amerika Serikat tahun 1997, disebutkan bahwa Amerika Serikat menggunakan tiga konsep terpadu dalam kebijakan militernya, yaitu; Amerika Serikat akan terlibat secara global untuk membentuk (*shape*) lingkungan internasional yang aman dan damai; merespon berbagai krisis yang timbul; dan mempersiapkan diri dalam menghadapi berbagai kemungkinan.

⁸⁸ *Ibid.*

⁸⁹ *Ibid.*

⁹⁰ Lihat Dalam *The Japan Institute of International Affairs (JIIA), Politics of US Policy Toward China: Analysis of Domestic Factors*, September, 2006.

Langkah-langkah strategi yang telah dilakukan Amerika Serikat dalam kurun waktu 1995-1998 guna mengurangi ketegangan di kawasan Asia Timur dan untuk memperkuat pertumbuhan kawasan menuju kemakmuran ekonomi dan kerjasam politik, adalah antara lain: mempertahankan sekitar 100.000 personil militer Amerika Serikat di wilayah Asia Timur dan Tenggara, memperkuat aliansi dengan Jepang melalui *Joint Security Declaration*(1996)⁹¹, serta merevisi garis pedoman kerjasama pertahanan bilateral Amerika Serikat – Jepang, bekerjasama dengan Korea Selatan dan China dalam mensikapi ancaman militer Korea Utara melalui *Four Party Talks* dalam rangka mencari solusi untuk meredakan ketegangan dan menciptakan perdamaian di Semenanjung Korea, memfokuskan perhatiannya terhadap ancaman senjata menghancurkan missal (WMD), nuklir dan peluru kendali *Argeed Framwork* dan pembicaraan bilateral dengan Korea Utara, serta meningkatkan kemampuan pengendalian terhadap pengembangan senjata nuklir melalui berbagai macam cara, termasuk penelitian dan pengembangan system Pertahanan Rudal Mandala atau *Theater Missile Defense* (TMD)⁹².

Atas dasar itulah, Asia Timur dan Tenggara merupakan bagian dari struktur politik global dengan suatu retorika sebagai suatu ekspresi dari penataan konfigurasi kekuatan yang didominasi oleh Amerika Serikat sebagai *key actors*. Sehingga yang dilakukan oleh Amerika Serikat di Asia Timur merupakan suatu bukti kebijakan standar yang anti regional.

⁹¹ *Ibid.*

⁹² Lihat pada Jurnal CSIS, *Theatre Missile Defence (TMD) in The Asia Pasific*, (*Strategic Briefing Papers*, Vol 1, Part 4, Desember, 1999).

4.6 Prospek Strategi Amerika Serikat di Kawasan Asia Timur

Rangsangan internasional yang mempengaruhi pandangan China tentang dunia kompleks sifatnya. Antara lain kepemimpinan China dalam Dunia Ketiga, yang sesungguhnya tidak China inginkan berlanjut pada ekspansi militer Soviet di Asia dan Pasifik; berkembangnya hubungan China di bidang ekonomi dan militer dengan Jepang maupun Amerika Serikat dan Eropa Barat; dan kegelisahan China atas hubungan politiknya dengan Amerika Serikat yang tegang akibat penolakan Amerika Serikat untuk menghentikan penjualan senjata ke Taiwan merupakan sekelumit dinamika hubungan Amerika Serikat-China.

Kondisi-kondisi domestik dan internasional ini, mendorong kepemimpinan China era Jiang Zemin untuk memilih menjaga jarak dengan Barat dan China mulai menjalani hubungan seimbang dimana kepentingan-kepentingan ideologisnya dengan hati-hati dan dengan tujuan-tujuan yang pragmatis.

Selama perkembangan tersebut, pemikiran nasionalistik kepemimpinan komunis China di era Jiang Zemin menekankan sikap defensive sebagai prioritas utama China dalam hubungan internasionalnya dengan Amerika Serikat. Hal itu dapat disimak melalui hirarki prioritas dalam perumusan politik luar negeri China sejak tahun 1990-an, sebagai berikut⁹³:

1. Pertahanan melawan serangan militer atau dominasi luar negeri.
2. Penyatuan kembali daerah-daerah terpencil dan terasing (terutama Tibet, Sinkiang, dan Mongolia Dalam).
3. Penggabungan Taiwan dalam struktur administrative nasional.
4. Pencegahan campur tangan non-militer asing dalam urusan-urusan dalam negeri China.
5. Pembangunan kembali respek/sikap hormat internasional dan mencapai peranan memimpin dalam urusan-urusan regional dan internasional.

⁹³ Lihat pada FORUM 21 held at College of William and Mary in September 2000, Masayuki Masoda, *Between New Terms and Classical Thought: Logic of Strategic Partnership of Chinese Foreign Policy*, 12 September 2000.

Pertahanan wilayah nasional dan nilai-nilai nasional jelas merupakan perhatian utama Negara manapun. Selama suatu Negara merasa integritas wilayahnya terancam, perhatian akan pertahanan menjadi lebih besar. Sejak tahun 1949 sampai dengan masa kepemimpinan Jiang Zemin, China selalu merasa dirinya terancam oleh Amerika Serikat, ditambah karakteristik geopolitics China menambah perhatiannya pada pertahanan nasional. Tanah perbatasan sepanjang 6.000 mil yang memisahkan China dengan Rusia (termasuk Mongolia bagian luar yang dipengaruhi Rusia) merupakan perbatasan yang bermusuhan terpanjang di dunia, dan tidak mungkin dipertahankan mil per mil. Di sebelah timur, angkatan laut China tidak dapat mempertahankan wilayah pantainya di sekitar laut Kuning, laut China Selatan dan Timur atau selat-selat Taiwan. Bahkan perbatasannya dengan India di barat daya juga menuntut persiapan-persiapan pertahanan yang ekstensif. Kondisi seperti ini mengharuskan China bergantung pada penangkalan nuklir primitive dan pada keengganan lawan-lawannya untuk melakukan penyerbuan. Tidaklah sulit untuk memahami obsesi pimpinan China terhadap masalah kesiagaan keamanan dan pertahanan.

Perekonomian China telah mengalami langkah-langkah mengesankan sejak tahun 1990 dibawah kepemimpinan Deng Xiaoping, namun langkah-langkah tersebut tidak cukup terus menerus mendukung kerjasama yang baik dengan Amerika Serikat karena tuntutan-tuntutan teknologi untuk menyiapkan perang modern (termasuk ketangguhan rudal dan nuklir) maupun peningkatan taraf kehidupan menjadi factor penghambat terciptanya hubungan harmonis China-Amerika Serikat. China bahkan merasa sulit untuk menopang usaha industri utama, terutama akibat kemacetan-kemacetan dalam penyediaan energy dan transportasi. Perang-perang di luar negeri , sekalipun terbatas, menimbulkan dampak merugikan terhadap rencana-rencana modernisasi di akhir 1990-an.

Meskipun China membelanjakan sebagian GNP-nya untuk pertahanan dalam jumlah yang sama besarnya dengan yang digunakan Jerman Barat, kemampuan pertahanan China jauh tertinggal di belakang. Dibandingkan dengan angkatan udara Amerika Serikat, angkatan udara China termasuk kecil dan bahkan tidak dapat menyamai tingkat kecanggihan teknologi dari kekuatan musuhnya di Taiwan. Angkatan lautnya tidak

berarti apa-apa; dan persenjataan nuklirnya, walaupun merupakan suatu ancaman yang nyata dalam pertempuran regional, juga kecil jika dibandingkan dengan milik Amerika Serikat.

China memang telah mencoba peluncuran rudal dari kapal selam di akhir tahun 1992, yang jangkauannya mampu mencapai sasaran-sasaran di Asia dan Pasifik. Percobaan ini memungkinkan China untuk menyombongkan diri bahwa China sekarang mampu masuk dalam kelompok Negara-negara maju dalam hal kecanggihan teknologi pertahanan nasional walaupun masih terbelakang dalam modernisasi ekonomi. Tetapi sesungguhnya, meskipun sudah menjadi tujuan tertinggi China untuk dapat berdiri sendiri dalam hal teknologi militer, sekarang ini China masih tergantung terutama pada suplai dari barat. Pada tahun 1995 Amerika Serikat sendiri telah mengesahkan lisensi-lisensi ekspor yang berhubungan dengan peralatan radar pertahanan udara, helikopter, pengangkutan, peralatan untuk menuji mesin jet, sistem komunikasi, peralatan computer, integrated circuit (merupakan istilah baku yang berarti komponen elektronik utama yang mengatur distribusi energy dalam suatu perangkat elektronik), sistem pelacakan kapal selam, peralatan penginderaan jarak jauh, dan mesin-mesin tank. Meskipun China menyombongkan diri, Amerika Serikat memperkirakan bahwa militer China ketinggalan 15 tahun di belakang baik dari Amerika Serikat maupun Taiwan dalam teknologi militer. Amerika Serikat juga memperkirakan biaya untuk menutup kesenjangan tersebut hingga akhir abad ini mencapai \$ 41 milyar sampai \$ 63 milyar, itu pun hanya untuk barang-barang non strategis (yaitu: truk, tank, peluncur roket dari darat ke udara, pesawat udara dan sejenisnya).

Jumlah penduduk yang sangat besar dan wilayah yang luas dari China, serta potensi kekayaan alam dalam wilayahnya, belum didayagunakan untuk memupuk kemampuan militer dan ekonomi yang modern. China berpaling ke Amerika Serikat untuk mengimbangi beberapa kekurangan tersebut, tidak hanya melalui teknologi dan peralatan militer, tetapi juga melalui hubungan-hubungan militer yang terkadang disertai dengan peninjauan pembentukan persekutuan tahap awal. Sesungguhnya walaupun hubungan perdagangan senjata telah berkembang di tahun 1990an, pandangan dunia China yang fleksibel membuat hubungan China-Amerika Serikat pada tahun 1993 menolak usul

menteri pertahanan Caspar Weinberger bagi pertukaran misi militer dan pada tahun 1994 dalam kunjungan kenegaraannya ke Amerika Serikat, Perdana Menteri Zhao Ziyang (Chao Tzu-yang) mengumumkan bahwa China tidak berkeinginan ambil bagian dalam persekutuan dengan Washington.

Dalam tulisan ini saya mengambil contoh negara Amerika Serikat sebagai objek analisis dan melihat kecenderungan apakah tindakan negara tersebut dalam konteks hubungan internasional lebih berdasarkan pada offensive atau defensive realism. Jika Amerika Serikat dalam mencapai tujuannya lebih mengarah pada ancaman bagi negara lain atau justru negara tersebut tidak menjadi sebuah ancaman dan cenderung mencari kerjasama sebagai bentuk integritas dalam aturan internasional, maka dapat dikatakan bahwa Amerika Serikat adalah negara yang menggunakan offensive atau defensive realism sebagai bentuk strategi negara tersebut dalam memainkan peranannya di dunia internasional. Di sini akan melihat pada dua hal yang dapat menggambarkan apakah negara tersebut menggunakan offensive atau justru sebaliknya, defensive realism sebagai bentuk aplikasi dari strategi keamanan negara tersebut, yaitu kebijakan Amerika Serikat terhadap Negara - negara tetangga yang lebih lemah dan kebijakan mengenai kontrol militer negara tersebut.

Amerika Serikat sangat layak dikategorikan sebagai Negara great power karena itu hal tersebut dapat menjadi alasan bagi negara tersebut untuk meraih hegemoni atau sebaliknya, berusaha untuk mempertahankan *balance of power*-nya di antara negara-negara aliansi. Di sisi lain, lebih dari dua dekade, adanya perdebatan yang mengarah pada posisi China sebagai negara yang memiliki peningkatan instrument ekonomi, finansial, legal dan psikologi dalam rencana perang negara tersebut dimana the PLA Academy of Military Science text, the Science of Military Strategy (2000) menyatakan bahwa perang tidak hanya sebuah perjuangan militer, tapi juga pertentangan di dalam politik, ekonomi, diplomasi, dan hukum. Pernyataan tersebut secara tersirat memang mengindikasikan adanya sebuah persiapan bagi China untuk mencapai titik hegemoni secara regional dan global, namun hal tersebut juga mesti disikapi secara rasional, bukankah pendapat tersebut hanyalah pendapat sepihak Amerika Serikat sebagai respon atas rasa khawatirnya terhadap eksistensi China dalam sistem internasional. Selain itu,

adanya langkah kerjasama yang dilakukan negara tersebut untuk terus menjalin kerjasama adalah bentuk aplikasi bahwa China adalah negara yang memang menganut prinsip defensive realism, dimana hal tersebut mengarah kepada bagaimana negara tersebut bersifat multilateralisme dengan bertransformasi ke dalam ASEAN sebagai langkah kerjasama yang dinilai tepat, mengingat secara geopolitik, ASEAN adalah sebuah bentuk komunitas kerjasama yang paling berpengaruh di kawasan Asia Tenggara.

Melihat bagaimana Amerika Serikat dengan segala kekuatannya lebih mengedepankan proses kerjasama seperti yang terdapat pada nilai-nilai *defensive realism*, yaitu mempertahankan *status quo* daripada meningkatkan kekuatan dengan melemahkan pihak lain sehingga peperangan bisa dihindari dan hal itu kemudian menciptakan sebuah ruang diskusi untuk mencapai makna multilateralism. Selain itu, tindakan dan pemahaman bagaimana negara tersebut melihat kekuatan lemah maupun kekuatan besar Negara seperti China bukanlah dianggap sebagai sebuah kesempatan ataupun tantangan untuk mencapai titik hegemoni, namun lebih mencerminkan pada bentuk integritas dalam sistem internasional untuk mencapai *balance of power* dalam interaksi internasionalnya. Kebijakan Amerika Serikat terhadap negara-negara lainnya tidak lagi menekankan pada pemikiran tradisional namun adanya reaksi dan aksi untuk mempertahankan *balance of power* sebagai bentuk integritas dan kerjasama serta bagaimana kebijakan di bidang militer juga memberikan dampak positif bagi perdamaian dimana secara jelas Amerika Serikat dalam kasus ini Negara nilai-nilai defensive realism. Satu hal yang paling mendasar adalah bagaimana Amerika Serikat memiliki kerjasama dengan negara lain, adalah bukan untuk menjadi ancaman, namun berusaha untuk mendapatkan dan mempertahankan situasi damai dalam interaksinya secara internasional. Peranan militer antara Amerika dan China dapat dikatakan berbeda, meski pada kenyataannya keduanya adalah negara besar yang memiliki ambisi untuk mendapatkan *political interest*-nya, namun sangat jelas bahwa *interest* keduanya dijalankan secara berbeda dimana China tidak menggunakan kekuatan militernya sebagai ancaman untuk mencapai tujuan, seperti halnya Amerika namun pada akhirnya dalam hal ini menerapkan *defensive realism*.

BAB V

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan di muka, penulis menyimpulkan, sebagai berikut:

Pertama, peningkatan pembangunan militer RRC telah menimbulkan kekhawatiran Amerika Serikat, sehingga strategi yang dijalankan Amerika Serikat guna mengantisipasi pembangunan militer China adalah dengan melakukan kerjasama regional di kawasan Asia Timur terutama dengan Jepang dan Korea Selatan. Secara tunggal Amerika Serikat melakukan tindakan memata-matai China, seperti pada kasus tabrakan pesawat tempur China dengan pesawat mata-mata Amerika Serikat yang melintas wilayah China.

Kedua, pertimbangan strategis Amerika Serikat terhadap China adalah adanya keinginan China menjadi Negara adikuasa di bidang militer di kawasan Asia Timur, sehingga akan menurunkan wibawa dan mengancam kepentingan Amerika Serikat di kawasan Asia Timur, sehingga Amerika menganggap masih perlunya dipertahankan kekuatan militer Amerika Serikat di Asia Timur.

Ketiga, hambatan yang dialami China dalam pembangunannya adalah kondisi ekonomi dan politik yang masih rawan, sehingga sewaktu-waktu dapat menjadi boomerang bagi keberlangsungan pemerintahan di China.

Keempat, upaya yang dilakukan Amerika untuk mengimbangi kekuatan militer China adalah dengan tetap menghadirkan pasukan militer Amerika Serikat di kawasan Asia Timur dengan dukungan penuh dari Jepang dan Korea Selatan. Dan Amerika Serikat konsisten melakukan perlindungan militer dan politis terhadap Taiwan untuk memisahkan diri dari China daratan.

Kelima, evaluasi militer di China tetap masih menyisakan sejumlah konflik internal, terutama kemunculan tokoh militer China pasca Deng Xiaoping yang terus mengalami pertarungan politik, hal ini dapat berimbas pada pecahnya

kekuatan internal militer China, sehingga dikhawatirkan akan dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang kontra terhadap kepemimpinan China dewasa ini, baik oleh kelompok dalam negeri China maupun oleh Negara-negara yang anti China.

Keenam, hubungan China-Amerika Serikat dalam beberapa waktu kedepan, lebih ditekankan dan diarahkan pada pembangunan ekonomi kedua Negara, akan tetapi China masih tetap tidak menghendaki adanya intervensi Amerika Serikat dalam segala hal pada kepentingan dalam negeri China. Khususnya prospek pembangunan militer China, Amerika Serikat menanggapinya dengan sangat hati-hati, Amerika Serikat sendiri tidak menghendaki China daratan pecah, karena jika China pecah maka keamanan di Asia Timur akan semakin kompleks melebihi kekalutan politik yang terjadi di Timur Tengah.

Ketujuh, China sangat berkepentingan untuk memiliki Angkatan Bersenjata yang modern dan kuat sebagai kekuatan pengungkit dalam ranah strategi dan politik baik untuk kepentingan dalam negeri maupun internasional. Dalam hubungan ini, Tentara Pembebasan Rakyat (*People's Liberation Army*) menempati posisi yang sangat strategis dan merupakan unsur utama dalam sistem pertahanan nasional dan merupakan kekuatan terdepan untuk melindungi kepentingan nasional. Sasaran utama modernisasi militer China, sejalan dengan kebijakan pertahanan nasionalnya, adalah menyiapkan kekuatan yang cukup untuk menghadapi musuh di kawasan, mempertahankan kredibilitas militer untuk menopang klaim teritorial, melindungi kepentingan nasional, menjaga keamanan dalam negeri, menangkai setiap langkah Taiwan untuk memerdekakan diri, serta menangkai setiap tindakan agresi. Dalam jangka panjang, kekuatan militer China ini juga diarahkan untuk mampu menjamin negara ini menjadi bagian integral dari pengaturan keamanan di kawasan, khususnya Asia Timur, dan juga sebagai penjamin untuk menopang pengaruh politik luar negeri China di dunia internasional. Terlihat di sini bahwa *hard power* (kekuatan militer), sebagai ciri utama realisme, menjadi salah satu instrumen penting yang digunakan China untuk meningkatkan pengaruh dalam politik hubungan antarbangsa, terutama di Asia Timur.

Pengembangan kekuatan militer dan modernisasi persenjataan China yang terus berkembang perlu diantisipasi dan disikapi secara kritis oleh Negara-negara di kawasan, mengingat potensi konflik masih mewarnai hubungan China dengan negara-negara tetangganya di kawasan Asia Timur. Adanya sikap kritis dan respon negara-negara di kawasan terhadap pengembangan kekuatan militer China, yang antara lain juga dilakukan melalui peningkatan kemampuan militernya, menunjukkan bahwa nuansa *power* telah mewarnai hubungan politik keamanan diantara negara-negara kawasan Asia Timur tersebut. Meskipun demikian, pengembangan diplomasi konstruktif perlu terus dilakukan diantara Negara-negara kawasan ini. Ini artinya, di tengah potensi konflik dan berlangsungnya hubungan antarnegara yang bernuansakan *power*, pada saat yang sama perlu terus dibangun sikap saling percaya (*Confidence Building Measures*) antara China dengan negara-negara tetangganya di kawasan Asia Timur.

Kebangkitan China hanyalah sebuah mitos jatuh banggunya sebuah peradaban. Kebangkitan China dipersepsikan oleh Amerika Serikat setelah jatuhnya rival AS, yakni Uni Sovyet atau Jepang yang mampu dikendalikan AS. Kebangkitan China tidak bertumpu pada aspek militer tapi pada aspek sejarah dan identitas ke-China-an. Identitas ini mampu menjadi kunci pendorong kepercayaan rakyat China untuk mewujudkan kembali mimpi menjadi great power karena mereka pernah menjadi suatu imperium besar yang berkuasa lebih dari 5.000 tahun. Langkah awalnya adalah dengan menggenjot sektor perekonomian sebagai fondasi aspek-aspek kebangsaan lainnya. Namun, kebangkitan China menimbulkan reaksi Anti-China. Para think tanks China memandang reaksi ini sebagai hal negatif bagi kemajuan China dan merasa perlu untuk melakukan counter pemahaman. Karenanya, kebangkitan China diupayakan melalui aspek non-militer dengan mengedepankan kerjasama ekonomi, budaya atau kerjasama militer tanpa mengarah pada aliansi atau gerakan militer.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Bakry, Suryadi Umar (Editor), (1996), *China, Quo Vadis ?*. Jakarta : Pustaka Sinar Harapan.
- Crabb Jr. Cecil V. , Edisi Ketiga. (1972) *American Foreign Policy in The Nuclear Age*
New York : Harper & Row,
- Dahana, A. (1996.) Partai Komunis China dan Dunia yang Berubah dalam *China, Quo Vadis ?*, Umar Suryadi Bakry, (Editor). Jakarta : Pustaka Sinar Harapan,
- Dreyer, June Teufel. (1993) *China's Political System : Modernization and Tradition*.
New York : Paragon House,
- Godwin, Paul H.B. (1989) *Soldiers and Statesmen : Chinese Defense and Foreign Policies in the 1990s dalam China and the World : New Directions in Chinese Foreign Relations*, Samuel S. Kim (Editor). San Fransisco : Westview Press.
- Gregor, A. James. (1986) *The China Connection, US Policy and The People,s Republic of China*. California : Stanford University, 1986.
- Hamrin, Carol Lee. (1994) “*Elite Politics and the Development of China's Foreign Relations*” dalam *Chinese Foreign Policy : Theory and Practice*, Thomas W Robinson dan David Shambaugh (Editors). Oxford : Clarendon Press.
- Kim, Samuel S (Editor).(1989) *China and The World : New Directions in Chinese Foreign Relations*. San Fransisco : Westview Press.
- Kim dan W. Boulder (Editors). San Fransisco : Westview Press,
Lam, Willy Wo-Lap. (1995) *China after Deng Xiaoping : The Power Struggle in Beijing Since Tiananmen*. Singapore : John Wiley & Sons.
- Mackerras, Colin dan Amanda Yorke. (1991) *The Cambridge Handbook of Contemporary China*. New York: Cambridge University Press.
- Mulvenon, James C dan Richard H Yang (Editors) (1999) *The People's Liberation Army in the Information Age*. Santa Monica : RAND.
- Palmer, Alan. (1979) *The Penguin Dictionary of Twentieth Century History (1990-1978)*. New York : Penguin Books Ltd.
- Robinson, Thomas W dan David Shambaugh (Editors).(1995) *Chinese Foreign Policy : Theory and Practice*. Oxford:Clarendon Press.

- Salisbury, Harrison E. The New Emperors (1992) *China in the Era of Mao and Deng*. Boston : Little, Brown and Company, Inc.
- Spence, Jonathan D (1990) *The Search for Modern China*. New York : W.W Norton & Company.
- Sukma, Rizal.(1995) *Pemikiran Strategis China dari Mao Zedong ke Deng Xiaoping*. Jakarta : CSIS.
- Trodd, Russell (1993) The Changing Security Environment in Asia and the Pacific dalam *Security in the Asia-Pacific Region : The Challenge of A Changing Environment*, Viberto Selochan (Editor). Australian Defence Studies Centre.
- Viotti, Paul R. (1994) International Relations and Defence Policy of Nations : International Anarchy and The Common Problem of Security dalam *The Defense Policies of Nations : A Comparative Study* 3rd edition, Douglas J Murray dan Paul R Viotti (Editors). London : John Hopkins University Press.
- Viotti, Paul R dan Mark V Kauppi (1993) *International Theory : Realism, Pluralism, Globalism*. New York : MacMillan Publishing Company.
- Wang, James C.F (1992) *Contemporary Chinese Politics : An Introduction*. New Jersey : Prentice-Hall International, Inc.

ARTIKEL/ JURNAL

- Anggoro, Kusananto (1996) Senjata Nuklir, Doktrin Penangkalan dan Kerjasama Keamanan Pasca Perang Dingin dalam *perkembangan Studi Hubungan Internasional dan Tantangan Masa Depan*, Jakarta : PT Dunia Pustaka Jaya.
- Asian Affairs vol 27 No.1. (2000) *Relations between the Chinese Mainland and Taiwan : PRC White Paper*.
- Burns, John P. (1999). *The People's Republic of China at 50 : National Political Reform*. The China Quarterly. No. 159
- Godwin, Paul H.B. (1990) Chinese Defence Policy and Military Strategy in the 1990's dalam *Changing Patterns of East Asian Security*. Proceeding and papers of ASEAN China Hongkong Forum 7-9 Agustus 1990.
- Godwin, Paul H.B (1996) *From Continent to Periphery : PLA Doctrine, Strategy and Capabilities Towards 2000*. The China Quarterly No.146.

Shambaugh, David.(1996) *China's Military in Transition : Politics, Professionalism, Procurement and Power Projection* The China Quarterly No.146.

Sudarsono, Juwono (1996) State of the Art Hubungan Internasional : Mengkaji Ulang Teori Hubungan Internasional dalam *Perkembangan Studi Hubungan Internasional dan Tantangan Masa Depan*. Depok : Pustaka Jaya .

Tobing, Fredy B.L (1996) Perkembangan Model Penelitian Tentang Hubungan Internasional dalam *Perkembangan Studi Hubungan Internasional dan Tantangan Masa Depan*, Depok : Pustaka jaya.

Whiting, Allen S. (1996) *The PLA and China's Threat Perception* The China Quarterly No.146.

